



Transformasi Dunia Islam: Sejarah dan Dinamika Perkembangan di Era Modern

Buku ini menyajikan sejarah panjang dunia Islam secara komprehensif, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan peradaban Islam di era klasik yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pemerintahan. Bagian awal buku menggambarkan penyebaran Islam dari Jazirah Arab ke wilayah lainnya, serta kejayaan peradaban Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia.

Memasuki era modern, buku ini menyoroti tantangan yang dihadapi dunia Islam, seperti kolonisasi, modernisasi, dan dinamika sosial-politik. Ditekankan pula ketegangan antara tradisionalisme dan modernitas, serta konflik-konflik di Timur Tengah seperti perang Irak, konflik Palestina, dan kegangan Sunni-Syiah. Dengan pendekatan kritis dan objektif, buku ini menawarkan analisis mendalam atas gerakan reformasi dan perjuangan dunia Islam dalam menjaga identitas historis di tengah arus globalisasi.



IAIN Parepare Nusantara Press
Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132



Transformasi Dunia Islam: Sejarah dan Dinamika Perkembangan di Era Modern

Ahmad Yani, dkk



Transformasi Dunia Islam: Sejarah dan Dinamika Perkembangan di Era Modern



Transformasi Dunia Islam: Sejarah dan Dinamika Perkembangan di Era Modern

Penulis:

Ahmad Yani, dkk.

Editor:

Syafa'at Anugrah Pradana

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



Transformasi Dunia Islam: Sejarah dan Dinamika Perkembangan di Era Modern

Penulis

Ahmad Yani, Hasaruddin, Rustam Magun Pikhulan, Lin Mutmainnah, Sri Karmila Dol, Muh. Isra Syarif, Muhammad Rusydi Kadir, Abdul Hafid, Nurhidayat, Zulayka Muchtar, Rudianto, Nur Saiful, Tahwin Alamsyah, Muh. Fadel As'ad, Abdul Rahim

Editor

Syafa'at Anugrah Pradana

Desain Sampul

Hasniati

Penata Letak

Hasniati

Copyright IPN Press,
ISBN 978-623-8563-36-4
xii + 246 hlm., 14,8 cm x 21 cm
Cetakan I, Agustus 2025

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

PENGANTAR REKTOR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, kami sampaikan salam dan terima kasih kepada para pembaca yang setia, serta kepada seluruh civitas academica IAIN Parepare yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

Berkat usaha keras dan dedikasi tinggi, kini kami merasa bangga dan bahagia untuk memberikan apresiasi kepada penulis yang terpilih sebagai penerima bantuan Buku Ilmiah 2025. Buku Ilmiah ini bukan hanya menjadi suatu prestasi individu, tetapi juga menjadi cermin keberhasilan institusi dalam mendorong dan mengembangkan potensi akademis.

Saya, selaku Rektor IAIN Parepare, mengucapkan selamat kepada penulis yang telah berhasil meraih dukungan ini. Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi Anda dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Semoga buku ilmiah yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan masyarakat.

Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Dekan dan tim penilai yang telah

menjalankan seleksi dengan adil dan transparan. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan program Buku Ilmiah 2025, terima kasih atas peran serta dan kerja kerasnya.

Selamat membaca dan semoga buku ilmiah ini dapat menjadi sumber inspirasi serta pengetahuan yang berharga bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 25 Mei 2025
Rektor IAIN Parepare,

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

PENGANTAR PENULIS

Transformasi dunia Islam dalam konteks sejarah dan dinamikanya di era modern merupakan sebuah topik yang penuh tantangan dan kompleksitas. Dalam perjalanan panjang peradaban Islam, kita melihat suatu proses yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi dengan peradaban lain. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah, perkembangan, dan dinamika dunia Islam, serta bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi membentuk wajah dunia Islam di era modern ini.

Sejarah panjang dunia Islam dimulai dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yang menjadi dasar bagi pembentukan suatu peradaban besar. Setelah itu, Islam berkembang pesat, menyebar ke berbagai belahan dunia, dan melahirkan berbagai kerajaan besar seperti Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Masing-masing dari peradaban ini menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang sangat berpengaruh pada dunia saat itu.

Namun, memasuki era modern, dunia Islam menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar. Kolonisasi oleh kekuatan Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik, sosial,

dan ekonomi negara-negara Muslim. Selain itu, modernisasi, globalisasi, dan pengaruh teknologi juga memperkenalkan dinamika baru dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim merespons dan menanggapi berbagai perubahan tersebut.

Buku ini membahas secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi transformasi dunia Islam di era modern, termasuk peran negara-negara Islam dalam geopolitik global, hubungan antar mazhab, serta tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Pembahasan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang sejarah, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan politik terkini yang memengaruhi perkembangan dunia Islam saat ini.

Dengan menghadirkan perspektif yang luas dan mendalam, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana dunia Islam bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta bagaimana tantangan global saat ini membentuk dinamika sosial dan politik umat Islam di seluruh dunia. Buku ini juga diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang sejarah dan perkembangan dunia Islam di era modern ini.

Parepare, 1 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR	iii
PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1	
Pendahuluan.....	1
Bab 2	
Islam di Abad Modern: Dinamika dan Perubahan dalam Sejarah Indonesia	7
A. Peran Islam dalam Pembentukan Identitas Nasional di Indonesia pada Abad Modern	14
B. Dinamika Islam dan Modernitas: Tantangan dan Transformasi Sosial di Indonesia	19
Bab 3	
Kedudukan Hamas dalam Konflik Palestina.....	25
A. Sejarah, Ideologi dan Kedudukan Hamas di Palestina ...	29
B. Posisi Negara-Negara Arab dan Timur Tengah dalam Menghadapi Peran Hamas Dalam Konflik Palestina	46

Bab 4

Kelompok Houthi di Yaman: Sejarah, Ideologi, dan Dinamika Konflik.....	55
A. Sejarah Awal Kemunculan.....	58
B. Perkembangan Konflik dan Eskalasi Hingga Situasi Terkini.....	60
C. Analisis Ideologi.....	65
D. Basis Pendukung Sosial	66
E. Dinamika Politik dan Peran Aktor Domestik-Internasional.....	68
F. Strategi Militer dan Taktik Tempur.....	70
G. Analisis Pelanggaran Hukum Internasional oleh Kelompok Houthi.....	73

Bab 5

Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi Sehingga Menjalin Kerjasama di Madinah	79
A. Kondisi Sosial Politik Madinah Sebelum Kedatangan Nabi Muhammad SAW	81
B. Hubungan Awal Nabi Muhammad SAW dengan Kaum Yahudi	83
C. Piagam Madinah Sebagai Landasan Kerjasama.....	86
D. Bentuk-Bentuk Kerjasama antara Nabi Muhammad SAW dan Kaum Yahudi.....	89
E. Faktor Pendukung Terjalannya Kerjasama.....	91

F. Perkembangan Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi Setelah Terjalin Kerjasama	94
---	----

Bab 6

Pembebasan Yahudi Pada Masa Umar Bin Khattab	97
A. Bentuk Pembebasan yang Dilakukan Umar bin Khattab terhadap Kaum Yahudi	99
B. Fungsi Umar sebagai Pelaksana Wasiat Kenabian dalam Tataran Kenegaraan.....	103
C. Pengaruh Tindakan Umar terhadap Hubungan Muslim–Yahudi di Masa Selanjutnya.....	105
D. Perlakuan terhadap Ahl al-Dhimmah dalam Pemerintahan Islam Pasca-Umar	105
E. Penilaian Ulama dan Sejarawan tentang Keadilan Kebijakan Umar	107

Bab 7

Sejarah Masuknya Islam di Dunia Barat	109
A. Awal Masuknya Islam Ke Dunia Barat.....	112
B. Masuknya Islam ke Spanyol (Eropa Selatan).....	113
C. Masuknya Islam ke Sisilia (Eropa Barat)	114
D. Kehadiran Islam di Dunia Barat	117

Bab 8

Zionis.....	121
A. Sejarah Berdirinya Zionis	122

B. Tujuan dan Pola Gerakan Zionis	128
C. Pengaruh Zionis dalam Konteks Global.....	131

Bab 9

Hubungan Islam dan Kristen Abad Modern.....	135
A. Hubungan Islam dan Kristen pada Masa Awal Munculnya Islam.....	136
B. Hubungan Islam dan Kristen abad Modern	141
C. Hubungan Islam dan Kristen di Masa Imperialisme	148

Bab 10

Bashar al-Assad	151
A. Kehidupan Bashar Al-Assad	154
B. Latar Belakang Politik.....	155
C. Kepemimpinan Bashar Al-Assad	156
D. Konflik Suriah dan Dampak Terhadap Dunia Islam.....	159

Bab 11

Fatah	165
A. Ideologi Fatah dalam Pembebasan Tanah Palestina	167
B. Gerakan Perjuangan Fatah	170

Bab 12

Orientalis dan Pandangannya Terhadap Islam dalam Lintasan Sejarah	175
A. Karakter Kajian Orientalis.....	179
B. Perkembangan Orientalisme	182

C. Pengaruh Orientalisme terhadap Dunia Islam	184
D. Penyimpangan Pemahaman Orientalis Tentang Hadis..	185
E. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Orientalisme	188

Bab 13

Hubungan Islam dan Kristen Abad Pertengahan.....	195
A. Kondisi Hubungan Islam dan Kristen Sebelum Abad Pertengahan.....	196
B. Hubungan Islam dan Kristen Abad Pertengahan.....	198

Bab 14

Bagaimana Islam Mempengaruhi Dunia Barat yang Telah Mencapai Kemajuan Ini (Dunia Modern).....	203
A. Proses Transfer Ilmu Pengetahuan dari Dunia Islam ke Dunia Barat	205
B. Warisan Intelektual Islam dalam Dunia Modern Barat: Jejak yang Masih Nyata	210

Bab 15

Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Pembuatan Piagam Madinah	215
---	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	223
---------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS.....	237
-----------------------	-----

BAB I

Pendahuluan

Ahmad Yani



Sejarah merupakan fondasi penting dalam memahami perjalanan umat manusia, termasuk umat Islam. Melalui sejarah, kita dapat menelusuri kembali jejak kehidupan masa lalu yang membentuk identitas, keyakinan, dan arah gerak suatu peradaban (Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, 2011). Sejarah bukanlah catatan yang lengkap, ia hanya merekam sebagian dari totalitas peristiwa yang terjadi. Namun, dari potongan-potongan inilah kita bisa menyusun makna, mengambil pelajaran, dan memahami bagaimana suatu masyarakat pernah hidup, berjaya, atau bahkan mengalami kemunduran.

Sering kali kita mendengar pepatah bahwa sejarah berulang. Pepatah ini mengandung makna penting bahwa kejadian-kejadian di masa lalu bisa menjadi cermin bagi generasi masa kini dan masa depan. Jika umat manusia tidak

belajar dari sejarah, maka besar kemungkinan mereka akan jatuh dalam lubang yang sama. Sebaliknya, dengan memahami sejarah, seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan zaman karena memiliki wawasan terhadap akar masalah dan proses historisnya.

Dalam konteks umat Islam, mempelajari sejarah menjadi sangat penting, terlebih di tengah kompleksitas dunia modern saat ini. Pemahaman sejarah yang baik akan mencegah kita dari penilaian yang keliru atau penyederhanaan atas peristiwa besar. Sejarah Islam, khususnya pada masa modern, mencakup berbagai aspek yang saling terkait: mulai dari ideologi, gerakan sosial-politik, perubahan institusi, hingga relasi dengan dunia luar, terutama dunia Barat (Yunus, 2011).

Sejarah Islam modern menggambarkan bagaimana umat Islam mengalami berbagai tantangan dari luar dan dalam, lalu meresponsnya melalui pembaharuan pemikiran, modernisasi struktur sosial, dan berbagai gerakan reformasi. Masa modern dalam sejarah Islam umumnya dimulai pada awal abad ke-19, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi Barat mulai masuk dan memberi dampak signifikan terhadap cara berpikir dan tatanan sosial dunia Islam. Kontak ini tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga mengguncang fondasi lama umat Islam yang telah lama statis (Rasyid, 2013).

Kemajuan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan adanya peradaban baru yang kuat, progresif, dan cenderung sekuler. Sebaliknya, dunia Islam pada masa itu sedang berada dalam kondisi stagnan, lemah

secara politik, dan tertinggal secara ekonomi. Keadaan ini menyadarkan sebagian pemuka Islam akan pentingnya pembaharuan. Mereka tidak hanya melihat kepada aspek fikih semata, melainkan mulai menelaah aspek lain dari ajaran Islam yang relevan dengan tantangan zaman (Badri Yatim, 2008).

Salah satu aspek penting dalam pembaharuan ini adalah bagaimana menyesuaikan ajaran agama dengan realitas ilmu pengetahuan dan perkembangan sosial modern. Gerakan modernisme Islam muncul dengan semangat untuk menghubungkan nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki dengan filsafat, rasionalitas, dan nilai-nilai modern lainnya. Upaya ini tidak mudah karena harus menghadapi dua tantangan sekaligus: resistensi dari kalangan internal umat Islam yang konservatif, dan hegemoni Barat yang kadang menaruh curiga terhadap Islam (Lapidus, 2000).

Dalam proses ini, muncul pula studi-studi dari kalangan orientalis yang mengkaji Islam dengan sudut pandang luar. Kajian orientalis banyak memberi kontribusi dalam bidang ilmu, namun tidak sedikit pula yang berangkat dari motif kolonial dan politis. Pandangan orientalis terhadap Islam, meskipun akademis, kerap kali bias dan mempengaruhi opini Barat terhadap dunia Islam (Rasyid, 2013). Hal ini semakin kompleks dengan hadirnya gerakan Zionisme yang dalam sejarahnya memiliki implikasi besar terhadap kawasan Timur Tengah dan konflik-konflik yang masih berlangsung hingga kini.

Buku ini disusun untuk memperkenalkan berbagai dinamika tersebut secara komprehensif kepada pembaca, terutama generasi muda dan kalangan intelektual yang ingin memahami sejarah Islam secara lebih luas. Tidak seperti pendekatan fikih yang lebih normatif dan legalistik, pendekatan sejarah bersifat deskriptif dan analitis. Ia menampilkan Islam sebagai kekuatan peradaban yang berkembang dalam ruang dan waktu, lengkap dengan interaksi politik, sosial, budaya, bahkan militer.

Kajian dalam buku ini terbagi ke dalam tiga belas bagian pokok. Bagian awal membahas hubungan Islam dan Kristen sejak abad pertengahan hingga masa modern. Tema ini penting untuk memahami dinamika dialog, konflik, dan pertukaran budaya antara dua agama besar dunia yang telah lama berinteraksi. Dalam bagian ini juga dibahas bagaimana pengaruh Islam terhadap kemajuan peradaban Barat suatu topik yang sering diabaikan, padahal kontribusi ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam sangat besar terhadap kebangkitan Eropa.

Selanjutnya, buku ini mengkaji periode awal Islam, khususnya hubungan Nabi Muhammad SAW dengan komunitas Yahudi di Madinah dan peran beliau dalam penyusunan Piagam Madinah. Piagam ini merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang menjamin hak hidup bersama antar umat beragama. Dari sana dilanjutkan pembahasan masa Khalifah Umar bin Khattab yang juga menunjukkan bagaimana Islam memperlakukan

komunitas Yahudi dan agama lain secara adil dalam wilayah kekuasaan Islam.

Bab-bab berikutnya mengulas tentang orientalis dan zionis sebagai dua kekuatan pemikiran dan politik yang banyak mempengaruhi persepsi dan kebijakan terhadap dunia Islam di era modern. Kajian terhadap orientalisme penting untuk membekali umat Islam agar mampu membaca kritik, menyaring informasi, serta memahami posisi intelektual Barat terhadap Islam. Sedangkan studi tentang Zionisme tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik Palestina dan munculnya gerakan perlawanan seperti Hamas dan Fatah, yang juga dibahas dalam buku ini.

Akhir bagian buku ini menyoroti konflik kontemporer yang melibatkan kelompok Houthi dan rezim Bashar al-Asad di kawasan Timur Tengah. Konflik-konflik ini memperlihatkan kompleksitas politik Islam di era modern, di mana perbedaan teologis, sektarian, dan kepentingan geopolitik saling berkelindan. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami dinamika internal umat Islam dan tantangan global yang mereka hadapi.

Melalui buku ini, kami ingin memperluas cakrawala berpikir pembaca tentang Islam. Islam bukan hanya agama yang membahas halal dan haram, tetapi juga sistem peradaban yang kaya akan pemikiran, sejarah, dan kebudayaan. Membatasi pemahaman Islam hanya pada fikih, apalagi satu mazhab saja, dapat mengerdilkan keagungan ajarannya. Dengan menjadikan sejarah sebagai jendela

pemahaman, kita akan lebih bijak melihat Islam dalam berbagai dimensinya: spiritual, politik, sosial, dan kebudayaan.

Akhirnya, buku ini ditulis bukan hanya untuk kalangan akademik, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin mengenal Islam secara historis dan luas dengan menelusuri jalan panjang umat Islam dari masa klasik, pertengahan, hingga modern, dengan harapan agar kita bisa belajar dari masa lalu, memahami realitas masa kini, dan merancang masa depan yang lebih baik.

BAB II

Islam di Abad Modern: Dinamika dan Perubahan dalam Sejarah Indonesia

Hasaruddin



Sejak kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13, agama ini telah memainkan peran penting dalam pembentukan budaya, politik, dan sosial di nusantara. Islam tidak hanya menjadi agama dominan di sebagian besar wilayah Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu elemen utama dalam dinamika sejarah bangsa. Di abad modern, khususnya sejak abad ke-19 hingga abad ke-21, Islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dinamika ini mencerminkan perkembangan ideologi, sosial, ekonomi, dan politik yang terus berlanjut seiring dengan perubahan zaman (Idris, 2022).

Abad modern Indonesia diwarnai oleh kolonialisasi Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Selama

periode ini, Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial maupun politik. Meskipun pada awalnya Islam menyatu dengan budaya lokal dan membentuk berbagai tradisi, penjajahan Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang sekuler dan memisahkan agama dari kehidupan negara. Dalam konteks ini, umat Islam Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka memandang peran agama dalam kehidupan sosial dan politik (Kusuma et al., 2022). Pada masa kolonial, para ulama dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam mempertahankan ajaran Islam dan melawan penjajahan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan modernitas yang semakin pesat.

Puncaknya, ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, Islam menjadi salah satu elemen yang paling dibutuhkan dalam pembentukan identitas bangsa. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga berperan dalam membentuk dasar-dasar ideologi negara. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Namun, meskipun ada kesepakatan untuk meletakkan agama dalam kerangka negara yang pluralistik, munculnya perbedaan interpretasi mengenai hubungan antara agama dan negara menjadi tantangan besar dalam sejarah Islam di Indonesia (Tamin & Mollah, 2021). Beberapa kelompok menginginkan negara yang lebih

berlandaskan syariat Islam, sementara yang lain lebih memilih negara yang sekuler dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Pada abad ke-20, dinamika Islam di Indonesia semakin kompleks dengan munculnya berbagai aliran pemikiran dan organisasi Islam yang berusaha merespons perubahan sosial-politik. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran sentral dalam perkembangan pendidikan dan sosial di Indonesia. Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912, berfokus pada pembaruan dan modernisasi pendidikan Islam, sementara NU, yang lebih tradisional, mempertahankan ajaran-ajaran pesantren dan budaya lokal. Kedua organisasi ini, meskipun berbeda dalam pendekatan, tetap berperan besar dalam membentuk arah peradaban Islam di Indonesia (Rosanti, 2022).

Selain itu, abad modern juga menyaksikan kebangkitan pemikiran Islam yang lebih kritis terhadap sistem sosial dan politik yang ada. Fenomena ini tercermin dalam gerakan-gerakan Islam politik yang muncul, seperti yang terlihat pada reformasi Islam di tahun 1970-an dan 1980-an, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap semakin sekuler dan otoriter. Dalam periode ini, banyak cendekiawan dan aktivis Islam yang mengusulkan agar Islam berperan lebih besar dalam mengatur kehidupan negara, baik melalui pendidikan, ekonomi, maupun politik (Mulyawan & Tiara, 2020). Mereka menuntut agar

prinsip-prinsip Islam lebih diterapkan dalam kebijakan publik dan hukum negara.

Namun, dinamika Islam di Indonesia juga tak terlepas dari pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Memasuki abad ke-21, internet dan media sosial telah mengubah cara umat Islam Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan menyebarkan pemikiran keagamaan. Kemunculan berbagai kelompok Islam radikal yang terinspirasi oleh ideologi global juga memberi tantangan baru dalam memahami dinamika Islam di Indonesia. Di sisi lain, kelompok Islam moderat yang lebih terbuka terhadap dialog lintas agama dan kebebasan berpendapat juga semakin berkembang (Majid et al., 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Islam di Indonesia bukanlah monolitik. Ada beragam interpretasi dan praktik Islam yang hidup berdampingan di Indonesia. Dinamika dan perubahan yang terjadi dalam sejarah Islam di Indonesia adalah hasil dari interaksi antara ajaran agama, kebijakan negara, budaya lokal, serta faktor-faktor global yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, pembahasan mengenai Islam di abad modern harus memperhatikan keberagaman tersebut dan bagaimana Islam beradaptasi dengan tantangan zaman (A. S. Nasution, 2023). Perubahan yang terjadi dalam praktik dan pemikiran Islam di Indonesia tidak hanya mencerminkan respons terhadap modernitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam terus berkembang

dan bertransformasi di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan dinamis.

Islam di abad modern merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dari pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga globalisasi, Islam telah menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan perubahan ini, kita dapat melihat bahwa Islam di Indonesia adalah sebuah agama yang hidup, berkembang, dan terus beradaptasi dengan tantangan zaman(Hasnida, 2017).

Perubahan-perubahan ini juga terlihat dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada masa setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun struktur ekonomi yang lebih modern dengan pengaruh kapitalisme dan pasar global yang semakin kuat. Hal ini juga berdampak pada umat Islam di Indonesia, yang mulai beradaptasi dengan sistem ekonomi modern, tetapi tetap berusaha menjaga prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi mereka. Misalnya, semakin berkembangnya perbankan syariah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam(Muthoharoh & Ronal madiih, 2023). Perbankan syariah ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana umat Islam Indonesia menghadapi tantangan ekonomi modern tanpa harus mengorbankan keyakinan agamanya.

Dalam bidang sosial, perubahan dalam cara hidup masyarakat Indonesia juga memberi dampak pada praktik keagamaan. Urbanisasi dan modernisasi yang pesat membuat gaya hidup tradisional mulai bergeser, termasuk cara beribadah dan menjalankan ajaran Islam. Namun, meskipun banyak dari umat Islam yang beralih ke gaya hidup modern, ajaran Islam tetap menjadi pegangan utama bagi sebagian besar masyarakat. Perubahan-perubahan ini juga tercermin dalam cara umat Islam berinteraksi dengan dunia luar, baik dalam konteks hubungan antar umat beragama maupun dalam kehidupan global yang semakin terhubung. Oleh karena itu, munculnya kelompok-kelompok Islam yang lebih terbuka terhadap dialog antar agama dan kerja sama internasional mencerminkan dimensi baru dalam hubungan sosial umat Islam Indonesia(Zakaria & Wahid, 2020).

Tidak hanya itu, perkembangan politik Indonesia juga sangat memengaruhi wajah Islam di abad modern. Sejak era Orde Baru hingga reformasi 1998, hubungan antara agama dan negara mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha menata hubungan dengan umat Islam melalui kebijakan yang lebih sekuler, meskipun tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh agama. Namun, setelah reformasi, terdapat kecenderungan untuk mengembalikan agama pada posisi yang lebih sentral dalam kehidupan politik Indonesia(Aditya, 2019). Kelompok-kelompok Islam mulai mendapatkan tempat yang lebih besar dalam pembahasan politik dan kebijakan negara, bahkan ada

dorongan untuk lebih mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam sistem hukum negara.

Selain itu, fenomena gerakan Islam transnasional yang semakin menguat juga turut membentuk dinamika Islam di Indonesia. Berbagai pengaruh ideologi Islam dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah, semakin memengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan di Indonesia. Kelompok-kelompok Islam yang terinspirasi oleh gerakan Islam transnasional ini sering kali menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara ketat, yang kadang-kadang berbenturan dengan pandangan moderat yang lebih terbuka terhadap pluralisme. Gerakan ini, meskipun sebagian besar kecil, membawa tantangan tersendiri bagi stabilitas sosial dan politik Indonesia, terutama dalam hal menjaga keberagaman dan toleransi yang selama ini menjadi ciri khas bangsa ini (Tabroni et al., 2020).

Di sisi lain, hadirnya kelompok-kelompok Islam moderat yang terus berkembang, seperti kelompok Islam yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa Islam di Indonesia juga memiliki sisi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kelompok-kelompok ini cenderung menekankan pentingnya nilai-nilai universal Islam yang bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, tanpa terjebak dalam ekstremisme atau fanatisme yang dapat merusak harmoni sosial. Dalam konteks global, peran Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar juga memberi dampak pada

hubungan internasional(Tabroni et al., 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang mewakili suara Islam moderat di panggung dunia, berusaha untuk menunjukkan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia juga sering kali menjadi tempat bagi dialog antar agama dan antarbudaya, yang mencerminkan sikap terbuka dan toleran umat Islam Indonesia terhadap keragaman.

Dinamika dan perubahan Islam di Indonesia dalam abad modern menggambarkan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pembaruan. Sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk wajah Islam di dunia, sekaligus menjadi contoh bagaimana agama dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. Islam di Indonesia tidak hanya hidup dalam bentuk tradisional, tetapi terus berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, politik, dan global. Dengan demikian, perjalanan Islam di abad modern adalah perjalanan yang penuh dengan dinamika dan transformasi, di mana nilai-nilai agama terus dipertahankan, namun tetap terbuka untuk menghadapi tantangan dan perubahan dunia yang terus berkembang.

A. Peran Islam dalam Pembentukan Identitas Nasional di Indonesia pada Abad Modern

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipisahkan dari

pengaruh besar Islam dalam pembentukan identitas nasionalnya. Sejak kedatangan Islam di tanah air pada abad ke-13, peran agama ini tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual dan keagamaan, tetapi juga turut membentuk karakter sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Pembentukan identitas nasional Indonesia pada abad modern memiliki hubungan erat dengan Islam, terutama dalam konteks perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan pembentukan nilai-nilai kebangsaan. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-13, yang dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat (Susilo & Wulansari, 2020). Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Aceh, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga sebagai sumber kekuatan politik dan budaya. Kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Indonesia, seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Mataram, memengaruhi struktur sosial, kebudayaan, serta sistem pemerintahan di wilayah tersebut.

Pada masa kolonialisme Belanda, meskipun Islam dihadapkan dengan kebijakan penjajahan yang bertujuan untuk memecah belah dan mengendalikan, agama ini tetap menjadi salah satu pilar dalam menjaga semangat perlawanan terhadap penjajah. Para ulama dan kelompok Muslim memainkan peran kunci dalam membangkitkan kesadaran nasional dan solidaritas di kalangan rakyat Indonesia yang tertindas. Islam, dalam konteks ini, menjadi kekuatan ideologis

yang melawan penjajahan, serta memberikan dasar moral dan etika untuk perjuangan kemerdekaan. Islam berperan sangat penting dalam memperkuat semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda, baik melalui organisasi-organisasi Islam maupun tokoh-tokoh penting yang mengembangkan ideologi perlawanan (Hasnida, 2017). Salah satu contoh konkret dari peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan adalah pendirian organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI) pada awal abad ke-20, yang menggabungkan gerakan sosial dengan semangat nasionalisme. Sarekat Islam, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim dan KH. Mas Mansyur, menjadi salah satu kekuatan politik terbesar dalam menggerakkan masyarakat Muslim untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional, banyak ulama dan pemimpin Islam yang bergabung dalam organisasi politik, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berperan dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, Muhammad Hatta, wakil proklamator Indonesia, yang memiliki latar belakang Islam, melihat pentingnya nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat (Hafizd, 2021). Menurut Profesor Azyumardi Azra, seorang sejarawan Islam Indonesia, “Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari identitas nasional. Tidak hanya dalam bentuk agama, tetapi juga dalam bentuk budaya,

politik, dan sosial yang membentuk karakter bangsa Indonesia.”

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun negara yang dapat mencakup berbagai golongan dan agama. Islam, dengan jumlah penganut yang sangat besar, memainkan peran sentral dalam merumuskan dasar negara dan identitas nasional. Namun, proses ini tidak tanpa tantangan, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), peran Islam sangat jelas. Terdapat dua kelompok utama: kelompok yang menginginkan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir dan K.H. Wahid Hasyim, dan kelompok yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip nasionalisme dan sekularisme, yang diwakili oleh tokoh seperti Soekarno dan Hatta (Tomadehe et al., 2023). Akhirnya, dengan berkompromi, Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara, yang secara filosofis mengakomodasi nilai-nilai Islam, terutama dalam sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, “Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan refleksi dari cara Islam memahami kebersamaan dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang beragam.” Dengan demikian, Islam memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan

negara, yang tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain peranannya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara, Islam juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia (Rosanti, 2022). Nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persaudaraan, dan toleransi, telah mengakar dalam masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari identitas nasional. Salah satu contoh penting adalah prinsip "Bineka Tunggal Ika" yang tercantum dalam semboyan negara Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Prinsip ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan toleransi antar umat beragama dan persaudaraan umat manusia.

Islam juga berperan dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan NU, memiliki kontribusi besar dalam pendidikan, dengan mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan universitas yang menghasilkan banyak tokoh intelektual, pemimpin, dan aktivis yang berperan dalam pembentukan Indonesia modern. Melalui lembaga-lembaga ini, Islam telah mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya membantu membentuk karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan keadilan. Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia, baik dalam

aspek sosial, politik, maupun budaya. Sebagai agama mayoritas, Islam tidak hanya memberikan dasar moral dan etika bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara, Islam tetap menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia, yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, serta dalam semangat persatuan, toleransi, dan keadilan.

B. Dinamika Islam dan Modernitas: Tantangan dan Transformasi Sosial di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan gelombang modernitas yang melanda dunia saat ini. Proses interaksi antara Islam dan modernitas di Indonesia tidak bisa dipandang secara sederhana, karena melibatkan dinamika sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Dalam konteks ini, ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman modern yang penuh dengan perubahan teknologi, globalisasi, dan ideologi yang terus berkembang(faizah Nasution, 2020). Modernitas, dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada serangkaian perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu elemen penting dari

modernitas adalah pemikiran rasional, individualisme, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Di sisi lain, Islam adalah agama yang mengajarkan ajaran-ajaran yang relatif tetap, dengan prinsip-prinsip yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis(Makrufli, 2021). Namun, interpretasi terhadap ajaran Islam telah mengalami berbagai perkembangan seiring waktu.

Menurut Nurcholish Madjid, seorang intelektual Muslim Indonesia yang terkenal, ada dua pendekatan utama dalam menyikapi modernitas dalam Islam: pertama adalah pendekatan konservatif, yang menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan ajaran-ajaran Islam yang sudah ada. Kedua, adalah pendekatan progresif, yang melihat pentingnya pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri(Zakaria & Wahid, 2020). Madjid, dalam pemikirannya yang dikenal dengan istilah "Islam Keindonesiaan," menekankan pentingnya Islam untuk bersikap terbuka terhadap modernitas, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Tantangan terbesar dalam hubungan antara Islam dan modernitas di Indonesia adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan identitas keagamaan mereka sambil menerima perubahan-perubahan yang datang dengan modernitas(Mujib, 2021). Di tingkat sosial, Islam di Indonesia menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana agama ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang

semakin terpengaruh oleh gaya hidup modern yang global dan sekuler.

Ada beberapa isu utama yang menjadi titik pertemuan dan perdebatan antara Islam dan modernitas di Indonesia. Salah satunya adalah penerimaan terhadap teknologi dan informasi global. Perkembangan media sosial, internet, dan teknologi komunikasi lainnya telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan memandang dunia (Salim, 2016). Bagi sebagian kalangan konservatif, perkembangan ini sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Islam yang lebih konservatif. Namun, di sisi lain, kelompok progresif melihat teknologi sebagai peluang untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Dalam menghadapi tantangan modernitas, peran ulama dan lembaga pendidikan Islam menjadi sangat penting. Ulama sebagai tokoh agama di Indonesia memiliki peran besar dalam memberikan pandangan dan tafsir yang relevan terhadap ajaran Islam dalam konteks modern. Sebagian besar ulama di Indonesia, melalui organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menunjukkan sikap moderat terhadap modernitas. Sebagai contoh, KH. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia dan tokoh NU, menekankan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam ajaran Islam. Wahid berpendapat bahwa Islam tidak hanya dapat beradaptasi dengan modernitas, tetapi juga dapat memperkaya dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal (Yahdi, 2023).

Pendidikan Islam juga memainkan peran kunci dalam mendidik generasi muda Indonesia untuk lebih memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia modern, seperti sains, teknologi, dan manajemen. Secara politik, dinamika antara Islam dan modernitas di Indonesia sering kali tercermin dalam perdebatan mengenai peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sebagai negara yang mengakui kebebasan beragama dalam konstitusinya, memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara negara yang sekuler dengan identitas agama mayoritas yang kuat.

Menurut Abdurrahman Wahid, meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, negara haruslah bersifat netral dalam hal agama, memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang. Dalam hal ini, Wahid menekankan pentingnya keberagaman dan pluralisme sebagai bagian dari prinsip dasar negara Indonesia, yang juga tercermin dalam ajaran Islam yang moderat (Majid et al., 2023). Namun, bagi sebagian kalangan yang lebih konservatif, modernitas sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan negara. Beberapa kelompok, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),

berpendapat bahwa negara Indonesia harus lebih mendasarkan sistem hukumnya pada syariat Islam. Pandangan ini, yang bertujuan untuk menerapkan hukum Islam secara lebih ketat, sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip sekularisme yang menjadi dasar negara Indonesia.

Dalam konteks globalisasi, Islam di Indonesia tidak hanya berinteraksi dengan modernitas di tingkat lokal, tetapi juga dengan dinamika global. Fenomena globalisasi telah memperkenalkan berbagai ideologi, nilai, dan budaya dari seluruh dunia, yang sering kali bertentangan dengan tradisi Islam yang telah berlangsung lama di Indonesia. Munculnya gerakan Islam transnasional, seperti Salafi dan Wahabi, yang memiliki pandangan konservatif terhadap ajaran Islam, telah menambah kerumitan dalam hubungan Islam dengan modernitas. Namun, di sisi lain, ada juga gerakan-gerakan Islam progresif yang memanfaatkan globalisasi untuk menyebarkan ajaran Islam yang lebih inklusif dan moderat. Gerakan ini, yang didorong oleh pemikiran intelektual Islam yang berorientasi pada pembaruan, mencoba untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kemajuan dan modernitas.

Dinamika antara Islam dan modernitas di Indonesia adalah proses yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya, berusaha menemukan keseimbangan antara menjaga tradisi Islam dan merespons perubahan zaman. Proses ini tidak selalu mudah, karena

perbedaan pandangan di kalangan umat Islam sendiri tentang bagaimana modernitas harus diterima atau ditolak. Namun, dengan sikap terbuka dan pembaruan dalam berbagai sektor, Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara.

BAB III

Kedudukan Hamas dalam Konflik Palestina

Rustam Magun Pikahulan



Konflik Palestina telah menjadi salah satu isu global yang paling kompleks dan tahan lama dalam sejarah modern. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, Palestina terus berjuang untuk mencapai kedaulatan, hak asasi manusia, dan kemerdekaan. Selama beberapa dekade, wilayah ini telah dihantui oleh kekerasan, ketegangan politik, dan ketidakstabilan sosial yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang bertentangan (Mahmoud & Abuzerr, 2023). Salah satu aktor utama dalam dinamika konflik ini adalah Hamas, sebuah organisasi Islam yang berperan penting dalam perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

Hamas, yang didirikan pada tahun 1987 selama intifada pertama, memiliki tujuan utama untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan ideologi yang berakar pada perlawanan terhadap okupasi Israel, Hamas mengambil pendekatan militan dalam

memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Organisasi ini menjadi bagian dari berbagai pertempuran, baik di jalur diplomatik maupun militer, yang mengguncang kawasan Timur Tengah, dengan dampak yang jauh melampaui perbatasan Palestina sendiri (Sari, 2018).

Keberadaan Hamas sebagai bagian dari perlawanan Palestina tidak hanya mempengaruhi dinamika internal Palestina, tetapi juga membawa dampak besar terhadap stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah. Konflik ini melibatkan berbagai kekuatan internasional, baik yang mendukung Palestina maupun Israel, menciptakan situasi yang sangat kompleks. Dari sisi politik, Hamas tidak hanya menghadapi Israel tetapi juga bersaing dengan Fatah, organisasi politik utama di Palestina yang cenderung lebih moderat dan bersedia bernegosiasi dengan Israel. Perbedaan ini memperburuk ketegangan internal Palestina dan menciptakan perpecahan yang memperburuk situasi (Wardoyo, 2017).

Sejak berdirinya, Hamas telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya Palestina untuk meraih kemerdekaan. Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menindas oleh Israel serta ketidakmampuan Otoritas Palestina (PA) untuk memenuhi tuntutan rakyat Palestina. Hamas, dengan basis ideologi Islamnya, menawarkan alternatif terhadap pendekatan diplomatik yang diambil oleh Fatah dan PA. Tujuan utama Hamas adalah pembebasan Palestina melalui perlawanan

bersenjata, dan organisasi ini menolak untuk mengakui eksistensi Israel, meskipun ada upaya diplomatik untuk mencari solusi dua negara (Kurniyawan, 2021).

Hamas memperoleh dukungan luas dari rakyat Palestina, terutama di Gaza, karena dianggap lebih tegas dan berani dalam menghadapi Israel. Mereka juga dianggap lebih mendekati rakyat dalam menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang telah membantu meningkatkan popularitasnya. Namun, perjuangan Hamas juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dukungan dari negara-negara seperti Iran yang memiliki agenda politik dan ideologis yang beragam, serta ketegangan regional yang terus berkembang (Kurniyawan, 2021).

Salah satu faktor yang membuat Hamas berbeda dari Fatah adalah penggunaan kekerasan dalam perlawanan terhadap Israel. Serangan roket dan operasi militer lainnya menjadi bagian dari strategi Hamas untuk menekan Israel dan mendapatkan perhatian internasional terhadap penderitaan rakyat Palestina (Bartal, 2023). Namun, tak jarang tindakan militan ini mengarah pada pembalasan dari Israel yang lebih kuat, memperburuk situasi di Gaza dan menambah penderitaan rakyat Palestina. Hal ini juga memperburuk posisi Hamas di mata negara-negara Barat yang menganggapnya sebagai organisasi teroris.

Hamas memainkan peran penting dalam dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Keberadaannya memengaruhi hubungan internasional, baik dalam konteks

negara-negara besar maupun aktor regional. Salah satu dampak terbesar dari eksistensi Hamas adalah ketegangan yang terus meningkat antara blok negara-negara yang mendukung Palestina dan blok negara-negara yang mendukung Israel (Simarmata & Yuliana, 2023). Negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Arab tertentu memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada Israel, sementara negara-negara yang mendukung Palestina, seperti Iran, Qatar, dan Turki, sering terlibat dalam penyediaan bantuan kepada Hamas.

Keberadaan Hamas juga memengaruhi hubungan antara negara-negara Arab. Meski ada dukungan terhadap perjuangan Palestina, namun hubungan antara negara-negara Arab dan Hamas tidak selalu harmonis. Beberapa negara, seperti Mesir dan Arab Saudi, lebih memilih pendekatan diplomatik yang lebih moderat dan mendukung Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah, sementara yang lainnya, seperti Iran, mendukung Hamas dengan memberikan bantuan militer dan finansial. Ketegangan ini memperburuk dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang sudah sangat kompleks.

Konflik yang melibatkan Hamas juga berpengaruh pada kebijakan luar negeri negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. AS secara konsisten menyatakan bahwa Hamas adalah kelompok teroris, dan dengan demikian, AS memberikan dukungan penuh terhadap Israel dalam konflik ini. Sementara itu, negara-negara Eropa, meskipun mendukung hak-hak Palestina, lebih memilih

pendekatan diplomatik dan lebih berhati-hati dalam memberikan dukungan kepada Hamas, mengingat status organisasi tersebut sebagai kelompok teroris.

Di sisi lain, aksi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas sering kali memperburuk citra Palestina di mata dunia internasional. Pengeboman dan serangan roket terhadap Israel tidak hanya menyebabkan kerusakan materi, tetapi juga menciptakan ketegangan lebih lanjut antara kedua pihak dan mempersulit upaya-upaya perdamaian. Oleh karena itu, meskipun Hamas dianggap sebagai bagian integral dari perjuangan Palestina, pendekatannya yang lebih militan sering kali berkontribusi pada penurunan dukungan internasional untuk Palestina.

A. Sejarah, Ideologi dan Kedudukan Hamas di Palestina

Hamas, yang berasal dari singkatan bahasa Arab Harakat al-Muqawama al-Islamiyya atau Gerakan Perlawanan Islam, adalah organisasi politik dan militan yang berfokus pada perjuangan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan mengusir pendudukan Israel dari wilayah Palestina. Didirikan pada tahun 1987 selama Intifada pertama, Hamas memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi Islam, terutama dalam cabang ideologi Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islam yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 (Adwan, 2019).

Pada awalnya, Hamas bukanlah organisasi yang muncul dari ruang hampa, melainkan bagian dari latar belakang sejarah yang lebih besar tentang perjuangan Palestina

melawan penjajahan dan pendudukan Israel. Palestina, yang sejak awal abad ke-20 menjadi medan perebutan antara kekuatan internasional dan wilayah Arab, mengalami kesulitan yang luar biasa akibat pendudukan Israel pasca-Perang Arab-Israel 1948 dan pembentukan negara Israel. Konflik ini memuncak pada 1967 dengan Perang Enam Hari, di mana Israel berhasil merebut lebih banyak wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Gaza. Dalam periode ini, banyak kelompok perlawanan yang muncul, dengan berbagai ideologi dan tujuan, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil menggulingkan kekuasaan Israel atau mendorong solusi damai yang langgeng (Faeq & Jahnata, 2020).

Seiring berjalannya waktu, perlawanan terhadap Israel mengarah pada munculnya Hamas. Pada tahun 1987, dalam suasana Intifada, yang merupakan pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel, Hamas mulai terbentuk sebagai sayap militan dari Ikhwanul Muslimin di Palestina. Organisasi ini dipimpin oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama yang sebelumnya aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah di Gaza. Hamas menyatakan tujuannya untuk memperjuangkan Palestina melalui jihad dan membentuk negara Islam Palestina yang bebas dari pendudukan Israel (Hannase, 2018).

Pada tahun 2006, Hamas berhasil meraih kemenangan besar dalam pemilu legislatif Palestina, yang dilaksanakan di Gaza dan Tepi Barat. Kemenangan ini menandai titik balik penting dalam sejarah Palestina. Hamas memenangkan

mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina, mengalahkan Fatah yang didukung oleh komunitas internasional. Keberhasilan ini, meskipun disambut dengan antusiasme oleh sebagian besar rakyat Palestina, juga menimbulkan ketegangan besar di dalam politik Palestina. Hal ini berujung pada perpecahan internal antara Hamas yang berbasis di Gaza dan Fatah yang berbasis di Tepi Barat. Sejak saat itu, Gaza dan Tepi Barat menjadi terpisah secara politik, dengan Gaza berada di bawah kendali Hamas dan Tepi Barat dikuasai oleh Otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah (Hannase, 2018).

Perjuangan Hamas sering kali dikaitkan dengan kekerasan dan aksi-aksi militan yang berfokus pada serangan terhadap Israel, termasuk peluncuran roket dan serangan bunuh diri. Taktik ini menyebabkan Hamas digolongkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel. Penyerangan ini menyebabkan banyak korban jiwa, baik di pihak Israel maupun warga Palestina yang terjebak dalam konflik tersebut. Namun, di sisi lain, Hamas juga mendapat dukungan dari sejumlah negara di dunia Arab dan Iran, yang melihat Hamas sebagai perlawanan terhadap dominasi Israel dan Barat di Timur Tengah (*"The Polarization of the Hamas Movement in Palestine and Its Influence on Indonesian Defense Issues: A Geopolitical and Military Overview,"* 2021).

Meskipun banyak kritik terhadap metode kekerasan yang digunakan, Hamas tetap menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Palestina, dengan basis dukungan yang solid di

Gaza. Sejak menguasai Gaza pada tahun 2007, Hamas telah menghadapi serangkaian serangan militer dari Israel, termasuk beberapa pertempuran besar seperti Operasi *Cast Lead* (2008-2009), Operasi *Pillar of Defense* (2012), dan Operasi *Protective Edge* (2014). Konflik-konflik ini telah menambah penderitaan rakyat Gaza yang sudah mengalami blokade dan kesulitan ekonomi yang parah.

Namun, meskipun menghadapi tekanan internasional dan dalam negeri, Hamas terus mempertahankan eksistensinya dengan memainkan peran penting dalam politik Palestina. Organisasi ini mengklaim bahwa mereka tidak akan pernah mengakui keberadaan Israel dan menuntut pembentukan negara Palestina yang utuh, dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Hamas juga menekankan pentingnya hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina yang diusir pada tahun 1948, sebuah isu yang tetap menjadi inti dari konflik Israel-Palestina.

1. Ideologi Hamas

Didirikan pada tahun 1987, Hamas berawal sebagai sayap politik dari Ikhwanul Muslimin di Palestina dan telah berkembang menjadi salah satu aktor dominan dalam politik dan konflik Palestina-Israel. Ideologi Hamas sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islamisme, perlawanan terhadap Israel, dan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Dalam analisis ini, akan dibahas berbagai aspek yang membentuk ideologi Hamas, termasuk tujuan mereka, pendekatan terhadap konflik Palestina-Israel, serta pengaruh

ideologi Islam dalam membentuk arah politik kelompok ini (Teiner, 2021).

Salah satu pilar utama ideologi Hamas adalah penolakan terhadap keberadaan Israel di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah Palestina. Sejak awal berdirinya, Hamas menganggap Israel sebagai penjajah dan menegaskan bahwa Palestina adalah tanah Islam yang tidak dapat dibagi atau diberikan kepada negara asing. Dalam Piagam Hamas yang diterbitkan pada tahun 1988, kelompok ini menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di atasnya. Piagam ini secara eksplisit menyatakan bahwa perang terhadap Israel adalah kewajiban agama, dan bahwa pembebasan Palestina hanya dapat tercapai melalui perjuangan bersenjata (Rubinstein-Shemer & Flamer, 2024).

Selain itu, Hamas juga memandang konflik ini sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar melawan kekuatan imperialisme dan Barat, yang dianggap sebagai aktor utama dalam mendukung keberadaan Israel. Dalam hal ini, ideologi Hamas mengandung unsur anti-imperialisme dan kritik terhadap peran negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, dalam mendukung kebijakan luar negeri Israel. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan banyak kelompok Islam radikal di dunia yang melihat ketidakadilan internasional sebagai faktor utama yang mempengaruhi ketidakmampuan Palestina untuk mencapai kemerdekaan (Khumairoh & Fadhil, 2019).

Di sisi lain, Hamas juga mengusung ideologi Islam sebagai dasar bagi politik dan kebijakan mereka. Dalam pemahaman Hamas, Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem politik yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari hukum, ekonomi, hingga sosial. Oleh karena itu, Hamas berusaha untuk menerapkan syariat Islam sebagai dasar pemerintahan di Palestina, dengan tujuan membangun negara Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Mereka percaya bahwa penerapan syariat akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat Islam, serta melindungi masyarakat dari nilai-nilai sekuler yang dianggap merusak (Wagemakers, 2010).

Dalam praktiknya, ideologi Hamas juga mencerminkan sifat konservatif dalam hal sosial dan budaya. Kelompok ini menekankan pentingnya moralitas dan keluarga dalam kehidupan masyarakat Palestina, dan sering kali mengkritik gaya hidup Barat yang mereka anggap merusak nilai-nilai Islam. Mereka mendukung pembatasan hak-hak perempuan dalam beberapa aspek, serta mendukung penerapan hukum Islam yang lebih ketat di wilayah yang mereka kuasai, seperti Gaza. Hal ini menjadikan Hamas sebagai kelompok yang konservatif dalam hal sosial, meskipun di sisi lain mereka mengklaim sebagai pembela hak-hak umat Islam dalam konteks perjuangan melawan Israel.

Penting untuk dicatat bahwa ideologi Hamas juga berkembang seiring waktu. Seiring dengan pergeseran politik dan dinamika regional, Hamas telah mencoba memperlihatkan

wajah yang lebih moderat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tetap berpegang pada tujuan utama mereka, yaitu pembebasan Palestina. Pada tahun 2017, Hamas merilis dokumen kebijakan baru yang menggantikan beberapa bagian dari Piagam mereka, dengan penekanan pada prinsip-prinsip politik yang lebih pragmatis, termasuk pengakuan terhadap perbatasan 1967 sebagai dasar negara Palestina dan penolakan terhadap ideologi kekerasan terhadap sesama Muslim. Namun, meskipun ada upaya untuk menampilkan diri sebagai lebih moderat, Hamas tetap dipandang oleh banyak pihak sebagai kelompok yang berkomitmen pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan mereka (Khumairoh & Fadhil, 2019).

Ideologi Hamas mencerminkan kompleksitas yang mendalam dalam perjuangan Palestina. Kombinasi antara perlawanan terhadap Israel, penerapan syariat Islam, serta strategi politik yang sering kali melibatkan kekerasan, menjadikan Hamas sebagai kelompok yang kontroversial. Meski demikian, ideologi mereka tetap memiliki daya tarik bagi sebagian besar masyarakat Palestina yang merasa terpinggirkan dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan yang berlangsung selama puluhan tahun. Sebagai bagian dari dinamika konflik Palestina-Israel, ideologi Hamas terus berkembang dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi arah politik dan masa depan Palestina.

2. Kedudukan Hamas di Palestina

Hamas, yang telah menjadi salah satu kelompok paling dominan di Palestina, memainkan peran penting dalam dinamika politik, sosial, dan militer negara tersebut. Didirikan pada tahun 1987, Hamas awalnya adalah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang beroperasi di Palestina, namun sejak itu telah berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dalam politik Palestina. Kedudukan Hamas di Palestina sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari perjuangan melawan pendudukan Israel hingga kebijakan internal yang diterapkan di Gaza, wilayah yang kini dikuasai mereka (Khumairoh & Fadhil, 2019).

Sejak kemenangan mereka dalam pemilu legislatif Palestina pada 2006, Hamas telah memegang kekuasaan atas Gaza, sementara Otoritas Palestina di bawah pimpinan Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat. Keberhasilan Hamas dalam mengalahkan Fatah dan merebut kontrol Gaza pada tahun 2007 telah mengarah pada pembelahan politik yang signifikan di Palestina, dengan dua entitas terpisah yang masing-masing dipimpin oleh kelompok yang berbeda. Pembelahan ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan politik nasional yang lebih luas, mengingat ketegangan yang terus-menerus antara Hamas dan Fatah.

Menurut Dr. Khaled Hroub, seorang ahli dalam studi Timur Tengah, "Hamas tidak hanya sebuah kelompok militan, tetapi juga sebuah gerakan politik yang memperoleh legitimasi melalui hasil pemilu yang sah. Mereka mewakili sebagian besar

populasi Palestina yang merasa bahwa solusi damai melalui negosiasi dengan Israel, seperti yang diupayakan oleh Fatah, telah gagal untuk memberikan hasil yang signifikan." Pandangan ini menunjukkan bahwa Hamas memperoleh dukungan bukan hanya karena tindakan militernya, tetapi juga karena peranannya sebagai alternatif bagi banyak orang Palestina yang merasa frustrasi dengan ketidakmampuan Otoritas Palestina dalam mencapai perdamaian atau kemerdekaan (Rinaldy, 2023).

Namun, meskipun Hamas memiliki legitimasi politik melalui pemilu, mereka juga dihadapkan pada tantangan besar, baik dari dalam maupun luar Palestina. Di dalam negeri, kekuasaan Hamas sering dikritik karena menerapkan kebijakan yang lebih otoriter, termasuk pembatasan hak-hak individu dan kebebasan sipil, terutama terhadap kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Di luar negeri, Hamas secara luas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang membuat hubungan internasional Palestina semakin rumit.

Dr. Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas, menyatakan bahwa "Hamas adalah representasi dari perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel dan negara-negara Barat yang mendukungnya." Hal ini menunjukkan bahwa ideologi Hamas yang berfokus pada perlawanan bersenjata dan ketidakmampuan untuk berkompromi dengan Israel menjadikannya sebagai aktor yang sangat dipengaruhi oleh dinamika konflik bersenjata dan perlawanan terhadap

pendudukan. Kedudukan Hamas di Palestina juga dipengaruhi oleh dukungan yang diterimanya dari negara-negara seperti Iran dan kelompok-kelompok lain yang sejalan dengan ideologi perlawanan terhadap Israel. Bantuan ini memberikan Hamas sumber daya yang signifikan untuk terus beroperasi, meskipun negara-negara Barat dan negara-negara Arab tertentu berusaha mengisolasi mereka secara politik dan ekonomi (Zakaria et al., 2015).

Oleh karena itu, kedudukan Hamas di Palestina adalah kompleks dan berlapis. Sebagai kekuatan dominan di Gaza, mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial Palestina. Namun, mereka juga menghadapi tantangan internal dan eksternal yang besar, baik dari segi legitimasi politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Pendapat ahli seperti Hroub dan Barhoum menunjukkan bahwa Hamas tidak hanya berfungsi sebagai kelompok militan, tetapi juga sebagai aktor politik yang berusaha membentuk masa depan Palestina dalam konteks perlawanan terhadap Israel dan kebijakan internasional yang lebih besar.

3. Peran Hamas dalam Dinamika Konflik Palestina dan Upaya Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Hamas lahir pada periode Intifada pertama, sebagai reaksi terhadap penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina di bawah penjajahan Israel. Organisasi ini didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, yang pada saat itu menjadi pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin di Palestina. Sejak awal, Hamas mengusung

ideologi yang kuat terkait dengan pembebasan Palestina melalui perlawanan bersenjata, dan menolak setiap bentuk negosiasi atau kompromi dengan Israel yang dianggap sebagai penjajah. Pendirian Hamas bertujuan untuk menggantikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang lebih mengedepankan diplomasi dan perundingan (Mhadhbi, 2023).

Hamas secara cepat tumbuh menjadi salah satu organisasi politik dan militan paling berpengaruh di Palestina, terutama setelah berhasil memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006. Kemenangan ini menandai titik balik yang signifikan dalam dinamika politik Palestina, karena Hamas berhasil menggantikan Fatah yang sebelumnya dominan dalam PLO. Namun, kemenangan ini juga menyebabkan terjadinya konflik internal antara Hamas dan Fatah, yang berujung pada perpecahan wilayah Palestina menjadi dua entitas politik yang terpisah, Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan Tepi Barat yang dikuasai oleh Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah (Ho Hengkyo, 2019).

Hamas memainkan peran ganda dalam konflik Palestina, sebagai kekuatan politik dan sebagai kelompok militan. Dari sisi politik, Hamas memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem dan kembali ke perbatasan 1967. Hamas menolak semua bentuk perundingan dengan Israel yang tidak menyertakan pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Dengan demikian, peran Hamas sering kali diwarnai oleh ketegangan

dengan negara-negara Barat dan Israel, yang melihatnya sebagai organisasi teroris karena taktik perlawanan yang digunakan, termasuk serangan roket dan serangan bunuh diri (Hengky, 2019).

Namun, dari sisi militan, Hamas telah menjadi tulang punggung perlawanan bersenjata terhadap Israel. Mereka berperang dengan menggunakan berbagai taktik, termasuk serangan roket, penyelundupan senjata, serta pertempuran di darat dengan pasukan Israel. Walaupun taktik ini sering mengundang kritik internasional, terutama dari negara-negara yang mendukung Israel, Hamas tetap mempertahankan pandangannya bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan Palestina (Mardenis, 2012).

Menurut Profesor Noam Chomsky, seorang intelektual dan ahli politik, Hamas berperan dalam mempertahankan hak-hak Palestina yang selama ini diabaikan oleh komunitas internasional. Chomsky mengungkapkan bahwa "Hamas bukanlah organisasi teroris dalam arti yang diterima secara internasional, melainkan organisasi yang berjuang untuk hak-hak dasar rakyat Palestina yang terus diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di bawah pendudukan Israel." Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa, meskipun taktik yang digunakan oleh Hamas kontroversial, tujuan akhirnya adalah untuk membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan dan memastikan hak mereka untuk hidup dalam kemerdekaan dan martabat (Wahab, 2021).

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, Hamas terus mengedepankan pentingnya pemersatu bangsa Palestina. Organisasi ini menekankan bahwa kemerdekaan Palestina hanya dapat tercapai jika seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, kembali menjadi milik rakyat Palestina. Oleh karena itu, Hamas menolak segala bentuk perjanjian damai yang memberikan pengakuan terhadap Israel atau menyerahkan sebagian wilayah Palestina kepada negara penjajah tersebut (Darman et al., 2022).

Salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam analisis perjuangan Palestina, seperti Edward Said, berpendapat bahwa perjuangan Hamas adalah refleksi dari ketidakmampuan masyarakat internasional dalam mencapai solusi yang adil bagi Palestina. Dalam bukunya *The Question of Palestine*, Said menulis, "Palestina bukan hanya masalah teritorial, tetapi juga masalah hak asasi manusia yang terabaikan oleh dunia internasional." Ia menekankan bahwa tanpa adanya penyelesaian yang sah dan adil, organisasi seperti Hamas akan terus menjadi bagian dari dinamika perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, tantangan utama bagi Hamas adalah bagaimana menjembatani perbedaan ideologis dan politik di antara faksi-faksi Palestina. Ketika Fatah lebih terbuka terhadap proses perdamaian dengan Israel, Hamas menganggap proses tersebut sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Oleh karena itu, perpecahan antara Hamas dan Fatah sering kali menghambat usaha untuk menciptakan sebuah front

persatuan yang kuat dalam perjuangan melawan Israel (Ho, 2019).

Sebagai organisasi yang lahir dari perlawanan terhadap pendudukan Israel, Hamas tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militan, tetapi juga sebagai representasi politik yang berjuang untuk pembebasan Palestina. Meski menghadapi banyak tantangan, baik internal maupun eksternal, Hamas tetap menjadi aktor kunci dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Pandangan internasional yang terbagi-bagi mengenai Hamas mencerminkan kompleksitas perjuangan Palestina itu sendiri, yang melibatkan aspek politik, ideologis, dan kemanusiaan. Dalam analisisnya, banyak ahli, termasuk Noam Chomsky dan Edward Said, sepakat bahwa perjuangan Hamas, meskipun kontroversial, adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

Sejarah perjuangan kemerdekaan Palestina dimulai pada masa Perang Dunia I, ketika wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Setelah perang, Palestina menjadi mandat Inggris berdasarkan keputusan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Selama periode ini, ketegangan antara penduduk Arab Palestina dan imigran Yahudi yang didorong oleh gerakan Zionis meningkat. Konflik ini memuncak dengan pembentukan negara Israel pada tahun 1948, yang menyebabkan perang Arab-Israel pertama dan pengusiran ratusan ribu orang Palestina dari tanah mereka,

peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau "bencana" bagi rakyat Palestina.

Setelah pengakuan internasional terhadap Israel, Palestina terus berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya, yang kini terbagi menjadi dua wilayah utama: Tepi Barat yang diduduki oleh Israel dan Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Meskipun ada beberapa upaya perdamaian, seperti Perjanjian Oslo pada tahun 1993, yang berusaha menyelesaikan konflik dan memberikan sebagian kemerdekaan kepada Palestina, hasilnya sering kali tidak memadai dan konflik terus berlanjut. Sebagian besar perjuangan kemerdekaan Palestina, meskipun ada pendekatan diplomatik, tidak dapat dipisahkan dari upaya militan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Hamas. Hamas, yang didirikan pada tahun 1987 selama Intifada pertama, adalah kelompok yang menentang setiap bentuk negosiasi dengan Israel dan berfokus pada perlawanan bersenjata. Organisasi ini, yang berkembang di Gaza, mengusung ideologi Islamisme dan nasionalisme Palestina, dengan tujuan utama mendirikan negara Palestina yang merdeka dan mengusir pendudukan Israel.

Dalam pandangan Hamas, perlawanan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina, dan mereka tidak mengakui eksistensi Israel. Taktik yang digunakan oleh Hamas, seperti serangan roket dan operasi militer di Gaza, sering kali mengundang kecaman internasional, tetapi bagi banyak warga Palestina, Hamas

dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Israel yang tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Namun, upaya Hamas dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina juga menemui tantangan internal. Salah satu tantangan terbesar adalah perpecahan internal yang terjadi antara Hamas dan faksi Fatah. Perbedaan ideologi antara kedua kelompok ini mengarah pada perpecahan politik dan kekuasaan, dengan Hamas menguasai Gaza dan Fatah menguasai Tepi Barat. Ketidakmampuan untuk menyatukan kedua faksi ini sering kali menjadi penghalang besar dalam perjuangan kemerdekaan Palestina yang lebih luas.

Sejak Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007, wilayah ini telah mengalami blokade yang ketat oleh Israel dan Mesir, yang memperburuk kondisi kemanusiaan. Blokade ini melarang masuknya banyak barang, termasuk bahan bakar, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Bahkan, PBB menyebut Gaza sebagai "penjara terbesar di dunia" karena pembatasan yang ketat terhadap kebebasan bergerak bagi warga Gaza. Selain itu, serangan militer Israel yang terjadi secara berkala di Gaza menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah, membuat wilayah ini semakin terisolasi dan miskin. Dalam situasi seperti ini, perjuangan kemerdekaan Palestina menjadi lebih rumit, karena rakyat Palestina tidak hanya berjuang melawan pendudukan Israel tetapi juga berhadapan dengan isolasi internasional dan konflik internal yang berkelanjutan.

Tabel 1. Peran Hamas Dalam Upaya Kemerdekaan Palestina

Aspek	Peran Hamas
Perjuangan Militer	Hamas memimpin berbagai serangan terhadap Israel sebagai bagian dari perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Palestina.
Pemerintahan Gaza	Sejak 2007, Hamas telah menguasai Jalur Gaza dan membentuk pemerintahan yang independen di wilayah tersebut.
Kegiatan Sosial	Hamas menyediakan berbagai layanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.
Mobilisasi Politik	Hamas berperan aktif dalam mobilisasi rakyat Palestina untuk melawan pendudukan Israel dan memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina.
Penyebaran Ideologi	Hamas menyebarkan ideologi yang berlandaskan pada perlawanan terhadap Israel dan mendirikan negara Palestina yang merdeka.
Penentangan Terhadap Perjanjian Oslo	Hamas menentang Perjanjian Oslo yang dianggapnya sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi Israel, dan memilih untuk terus berjuang melalui jalan perlawanan.
Diplomasi dan Aliansi	Hamas berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab dan kelompok-kelompok internasional yang mendukung perjuangan Palestina.

B. Posisi Negara-Negara Arab dan Timur Tengah dalam Menghadapi Peran Hamas dalam Konflik Palestina

Konflik Palestina-Israel yang sudah berlangsung selama beberapa dekade telah menarik perhatian dunia internasional, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah dan negara-negara Arab. Hamas, sebagai salah satu kelompok politik dan militer utama Palestina, memainkan peran yang sangat signifikan dalam konflik ini. Sebagai organisasi yang berjuang untuk pembebasan Palestina, Hamas tidak hanya menghadapi Israel, tetapi juga berhadapan dengan negara-negara Arab yang memiliki peran penting dalam dinamika geopolitik kawasan. Posisi negara-negara Arab dan Timur Tengah terhadap peran Hamas dalam konflik Palestina sangat beragam, tergantung pada kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi masing-masing negara (Syahab, 2017).

Negara-negara Arab memiliki kepentingan yang besar terhadap Palestina karena faktor solidaritas agama dan sejarah perjuangan bersama melawan pendudukan Israel. Namun, sikap mereka terhadap Hamas tidak selalu seragam. Beberapa negara Arab, seperti Iran, mendukung penuh Hamas, sementara negara lain, seperti Mesir dan Arab Saudi, terkadang memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan kelompok ini. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi posisi negara-negara Arab dan Timur Tengah terhadap Hamas, serta dampaknya terhadap jalannya konflik Palestina (Rahman, 2020).

Konflik Palestina-Israel terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi, menyebabkan ketegangan di tingkat internasional, terutama di kawasan Timur Tengah. Salah satu pemain utama dalam konflik ini adalah Hamas, sebuah organisasi yang berfokus pada pembebasan Palestina dan melawan pendudukan Israel. Posisi negara-negara Arab dan negara-negara Timur Tengah terhadap Hamas dalam konteks ini beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ideologi, serta kepentingan strategis masing-masing negara. Analisis terhadap posisi negara-negara ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam mencari solusi yang komprehensif untuk konflik Palestina (Jazuli et al., 2023).

Menurut Dr. Ahmed Youssef, seorang analis politik asal Mesir, posisi negara-negara Arab terhadap Hamas dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, kepentingan politik domestik, dan kedua, dinamika geopolitik yang lebih luas. "Mesir, Saudi, dan negara-negara Teluk memiliki kekhawatiran terkait ideologi dan kebijakan Hamas yang lebih radikal, sementara Iran melihat Hamas sebagai sekutu dalam perjuangan melawan Israel dan dominasi Barat," ujar Dr. Youssef. Dia juga menekankan bahwa meskipun solidaritas terhadap Palestina tetap menjadi prinsip dasar, banyak negara Arab yang lebih memilih pendekatan pragmatis yang melibatkan negosiasi dengan Israel untuk mencapai perdamaian.

Meskipun ada kesamaan dalam mendukung Palestina, sikap negara-negara Arab terhadap Hamas sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ideologi, dan hubungan internasional masing-masing. Keberagaman ini menciptakan tantangan besar dalam upaya untuk menciptakan perdamaian yang langgeng di Palestina, karena tidak semua negara Arab memiliki pandangan yang sama tentang cara terbaik untuk mendukung perjuangan Palestina. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan konsensus di antara negara-negara Arab agar dapat mendukung Hamas secara lebih efektif tanpa menambah ketegangan di kawasan yang sudah rapuh (Rahmani, 2023).

Posisi negara-negara Arab dan Timur Tengah terhadap peran Hamas dalam konflik Palestina sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ideologi, dan kepentingan strategis. Mesir dan Arab Saudi cenderung mengambil pendekatan moderat, berusaha mendukung rekonsiliasi Palestina sambil menjaga stabilitas kawasan, sementara Iran memberikan dukungan penuh terhadap Hamas sebagai sekutu dalam perjuangan melawan Israel. Negara-negara Teluk, di sisi lain, lebih mengutamakan hubungan dengan Barat dan Israel, yang membuat mereka cenderung menjauh dari Hamas. Dengan begitu, meskipun ada kesamaan dalam mendukung Palestina, sikap negara-negara ini menunjukkan bahwa konflik Palestina lebih kompleks daripada sekadar dukungan terhadap satu kelompok atau solusi tertentu (Simanjong et al., 2023).

1. Posisi Mesir terhadap Hamas

Mesir memiliki peran yang sangat penting dalam konflik Palestina, baik secara geografis maupun politis. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir sering kali menjadi mediator dalam upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, serta dalam perundingan dengan Israel. Namun, hubungan Mesir dengan Hamas tidak selalu harmonis. Mesir, di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, sering kali memperlakukan Hamas dengan hati-hati, terutama karena hubungan Hamas dengan Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas Mesir. Setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi pada 2013, hubungan Mesir dengan Hamas semakin memburuk karena kedekatan Hamas dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Namun, Mesir tetap memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan Gaza dan berperan sebagai penjaga keamanan kawasan, terutama di wilayah Sinai. Dalam hal ini, Mesir cenderung mengambil pendekatan yang pragmatis, yaitu mendukung rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah agar Palestina memiliki pemerintahan yang lebih bersatu. Mesir juga sering memfasilitasi gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan ke Gaza, meskipun tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Hamas yang lebih radikal.

2. Posisi Arab Saudi terhadap Hamas

Arab Saudi, sebagai negara dengan pengaruh besar di dunia Arab, juga memiliki posisi yang kompleks terhadap

Hamas. Secara historis, Arab Saudi mendukung perjuangan Palestina, tetapi tidak selalu mendukung Hamas sebagai organisasi yang mewakili seluruh rakyat Palestina. Saudi lebih memilih untuk mendukung Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh Fatah dan Presiden Mahmoud Abbas, karena dianggap lebih moderat dan lebih bersedia untuk bernegosiasi dengan Israel. Arab Saudi juga lebih mendukung solusi dua negara yang diakui secara internasional, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.

Sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih Gaza, hubungan Saudi dengan Hamas semakin merenggang. Saudi mengkhawatirkan bahwa kekuatan Hamas akan mengganggu stabilitas kawasan, mengingat peran kelompok ini dalam mendukung kelompok-kelompok Islam radikal lainnya. Namun, meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Saudi mulai membuka saluran komunikasi dengan Hamas, meskipun dengan tujuan untuk mendorong rekonsiliasi di Palestina dan menjaga kestabilan regional. Secara keseluruhan, Arab Saudi berusaha untuk menyeimbangkan antara mendukung Palestina dan menjaga hubungan dengan negara-negara Barat serta Israel.

3. Posisi Iran terhadap Hamas

Iran adalah salah satu negara yang paling mendukung Hamas di kawasan Timur Tengah. Dukungan Iran terhadap Hamas berlandaskan pada ideologi yang sejalan, terutama dalam hal penentangan terhadap Israel dan kebijakan Barat.

Iran melihat Hamas sebagai sekutu penting dalam upaya untuk memperjuangkan pembebasan Palestina dan memperkuat pengaruh Iran di dunia Arab. Dukungan Iran kepada Hamas bukan hanya dalam bentuk bantuan finansial, tetapi juga dalam bentuk dukungan militer, seperti pelatihan dan pengiriman senjata. Bagi Iran, hubungan dengan Hamas adalah bagian dari strategi besar untuk mengimbangi kekuatan Israel di kawasan, serta untuk memperluas pengaruhnya di dunia Arab. Selain itu, Iran juga melihat dukungan terhadap Hamas sebagai cara untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi blok negara-negara Teluk yang lebih pro-Barat. Meski demikian, hubungan ini juga membawa tantangan, karena banyak negara Arab, terutama negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA, melihat Iran sebagai ancaman dan tidak menyukai kedekatannya dengan Hamas.

4. Posisi Negara-Negara Teluk

Negara-negara Teluk, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, memiliki pandangan yang berbeda terhadap Hamas dibandingkan dengan negara-negara seperti Iran atau Mesir. Meskipun mereka mendukung Palestina secara prinsipil, negara-negara Teluk lebih mengutamakan stabilitas kawasan dan hubungan baik dengan negara-negara Barat, termasuk Israel. Oleh karena itu, mereka cenderung mendukung solusi yang lebih moderat dan berupaya menghindari ketegangan dengan negara-negara besar. Pada 2020, setelah penandatanganan Kesepakatan Abraham yang menormalisasi

hubungan antara UEA, Bahrain, dan Israel, posisi negara-negara Teluk terhadap Hamas semakin jauh. Negara-negara ini melihat Hamas sebagai penghalang bagi perdamaian dan kestabilan kawasan, terutama karena kelompok ini menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Negara-negara Teluk, dalam hal ini, lebih memilih untuk mendorong solusi damai yang melibatkan negosiasi langsung antara Palestina dan Israel.

Tabel 2. Posisi Negara Arab dan Timur Tengah Terhadap Hamas

Negara	Posisi Terhadap Hamas	Alasan
Mesir	Terkadang mendukung, namun hati-hati terhadap Hamas.	Mesir khawatir terhadap hubungan Hamas dengan Ikhwanul Muslimin yang dianggap ancaman bagi stabilitas Mesir. Mesir berfokus pada rekonsiliasi Palestina dan menjaga stabilitas regional.
Arab Saudi	Lebih mendukung Otoritas Palestina (PA) daripada Hamas.	Saudi lebih mengutamakan kestabilan kawasan dan mendukung solusi dua negara yang diakui secara internasional. Hamas dianggap mengganggu proses perdamaian dengan Israel.
Iran	Mendukung penuh Hamas.	Iran melihat Hamas sebagai sekutu dalam perjuangan

		melawan Israel dan kebijakan Barat, memberikan dukungan finansial dan militer untuk memperkuat posisi Hamas.
Uni Emirat Arab (UEA)	Lebih memilih mendukung solusi moderat, menghindari keterlibatan dengan Hamas.	UEA cenderung lebih mendukung hubungan dengan Barat dan Israel, terutama setelah normalisasi hubungan dengan Israel. Hamas dianggap sebagai penghalang bagi stabilitas kawasan.
Bahrain	Sama seperti UEA, mendukung solusi moderat dan menghindari ketegangan dengan Hamas.	Bahrain menandatangani Kesepakatan Abraham dengan Israel, memilih solusi perdamaian yang melibatkan negosiasi langsung antara Palestina dan Israel, bukan Hamas.
Qatar	Memberikan dukungan politik kepada Hamas, meskipun dengan pendekatan yang lebih moderat.	Qatar memberikan dukungan kemanusiaan dan politik, tetapi mencoba menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara Barat dan Israel.

BAB IV

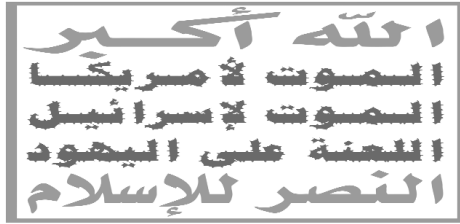
Kelompok Houthi di Yaman: Sejarah, Ideologi, dan Dinamika Konflik

Iin Mutmainnah



Kelompok Houthi yang juga dikenal sebagai Ansarullah (Penolong Agama Allah) merupakan kekuatan utama dalam konflik Yaman yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Mereka bermula sebagai gerakan agama dan politik di Yaman Utara pada awal 1990-an berakar dari aliran Syiah Zaidiyah di Yaman (Patnistik, 2024). Houthi dibawah pimpinan pendirinya yaitu Hussein Bareddin al-Houthi mengkritik keras pemerintahan presiden Ali Abdullah Saleh serta kebijakan asing Amerika Serikan dan Israel serta menentang penyebaran Wahabbisme yang didukung Arab Saudi.

Setelah invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, Houthi mengadopsi slogan anti-Amerika dan anti-Israel yang keras, sebagaimana slogannya seperti:



Adapun arti dari slogan tersebut yaitu “Allah Maha Besar, kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, laknat bagi yahudi, dan pertolongan (kemenangan) bagi Islam (BBC, 2024). Pada tahun 2004 konflik terbuka pertama meletus ketika pemerintah Saleh berusaha membungkam gerakan ini yang menyebabkan Hussein al-Houthi tewas dan kemudian menjadi “syahid” bagi pendukungnya. Sejak saat itu, di bawah kepemimpinan saudaranya Abdul Malik al-Houthi, kelompok Houthi terus berkembang dan memainkan peran sentral dalam politik serta militer Yaman.

Awalnya, Houthi merupakan gerakan sosial dan keagamaan yang menentang marginalisasi politik dan ekonomi yang dialami komunitas Zaidi di Yaman, namun seiring waktu, kelompok ini berkembang menjadi kekuatan militer yang signifikan dan berperan sentral dalam dinamika konflik Yaman modern.

Konflik yang melibatkan Houthi tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik yang luas, mengingat posisi strategis Yaman yang terletak di persimpangan jalur pelayaran internasional, khususnya Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk

Aden. Konflik ini juga menjadi arena persaingan pengaruh regional antara kekuatan besar seperti Arab Saudi dan Iran, yang mendukung pihak-pihak berbeda dalam perang saudara tersebut. Dalam konteks sejarah dunia Islam modern, konflik Yaman dan peran Houthi mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas keagamaan, politik lokal, dan intervensi kekuatan global yang saling bertautan.

Secara kronologis, beberapa peristiwa penting yang membentuk dinamika kelompok Houthi meliputi: pemberontakan pertama pada 2004, serangkaian konflik bersenjata hingga 2010, penguasaan Sanaa pada 2014, intervensi koalisi Arab Saudi pada 2015, serta eskalasi serangan di Laut Merah dan wilayah sekitarnya pada 2023-2025. Selama periode ini, Houthi tidak hanya memperkuat posisi militer, tetapi juga mengembangkan struktur pemerintahan alternatif di wilayah yang mereka kuasai, termasuk pengelolaan administrasi dan layanan publik.

Transformasi Houthi dari gerakan lokal menjadi kekuatan militer yang signifikan menunjukkan kompleksitas konflik Yaman yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik regional dan internasional. Peran ideologi Syiah Zaidi dan dukungan Iran menjadi kunci dalam memahami motivasi dan strategi kelompok ini, yang terus menjadi faktor utama dalam ketidakstabilan Yaman dan kawasan sekitarnya hingga saat ini.

Untuk lebih mengenal kelompok ini, akan dibahas secara mendalam sejarah munculnya Houthi, eskalasi konflik hingga

situasi saat ini, ideologi kelompok, basis dukungan sosial, dinamika politik domestik dan internasional, serta strategi militer dan taktik yang mereka gunakan.

A. Sejarah Awal Kemunculan

Sejarah pembentukan kelompok ini berakar pada ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh komunitas Zaidi sejak lama, terutama di provinsi Saada. Zaidi merupakan cabang Syiah yang memiliki tradisi keagamaan dan politik yang kuat di Yaman selama berabad-abad, namun sejak penyatuan Yaman pada 1990, komunitas ini mengalami marginalisasi oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh kelompok Sunni. Ketegangan ini memicu lahirnya gerakan perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Houthi, dinamai dari keluarga Houthi yang menjadi tokoh sentral dalam gerakan tersebut.

Kelompok Houthi pada mulanya adalah gerakan teologis moderat bernama Al-Shabab Al-Mu'min (Pemuda Mu'min) yang didirikan pada awal 1990-an di Provinsi Saada, Yaman Utara. Ketika itu Hussein Badreddin al-Houthi, seorang ulama dan pemimpin karismatik, mulai mengorganisasi komunitas Zaidi untuk menentang apa yang mereka anggap sebagai diskriminasi dan intervensi asing, khususnya pengaruh Amerika Serikat dan Arab Saudi di Yaman.

Mereka lahir dari tradisi Zaidiyah yang memiliki sejarah panjang di Yaman Utara, termasuk pendirian kerajaan Zaidiyah pada awal abad ke-20. Hussein Badreddin al-Houthi

berasal dari keluarga religius berpengaruh yang memanfaatkan masjid dan sekolah agama di Saada untuk menyebarkan ajarannya yang menekankan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap korup dan intervensi asing. Gerakan ini kemudian tumbuh terutama di kalangan pemuda Zaydi yang kurang puas dengan pemerintahan pusat yang berorientasi Sunni dan berpihak kepada Arab Saudi.

Pada tahun 2004, pemerintahan Ali Abdullah Saleh meluncurkan operasi militer untuk menekan Houthi yang memuncak dengan terbunuhnya Hussein al-Houthi dalam baku tembak pada September 2004. Kejadian ini justru memperkuat gerakan Houthi. Hussein menjadi figur “syahid” dan kepemimpinan berpindah kepada saudaranya Abdul Malik al-Houthi. Setelah kematiannya, kelompok ini mengintensifkan perlawanan bersenjata melawan pemerintah pusat di wilayah Saada dan sekitarnya.

Pada fase awal sekitar tahun 2004 hingga 2010, berlangsung beberapa putaran konflik dengan pemerintah Yaman bekerja sama dengan koalisi Arab Saudi melakukan serangkaian operasi militer di wilayah utara. Misalnya pada tahun 2009-2010, militer Yaman meluncurkan penyerangan besar yang mengguncang Saada dan menimbulkan ribuan orang mengungsi akibat penyerangan tersebut. Namun Houthi berhasil bertahan dan pasukannya semakin terorganisir. Seiring waktu, Houthi mengubah nama kelompoknya menjadi Ansarullah (Penolong Allah) yang mengadopsi simbolisme baru dan memperluas perekrutan.

Sebagian besar pendukung mereka berasal dari suku-suku Zaidi di pegunungan utara Yaman yang merasa terpinggirkan secara ekonomi dan politik oleh rezim sentralis di Sana'a. (Hammond, 2012) Agenda awal Houthi yang menentang imperialisme dan korupsi pemerintah membuatnya populer diantara masyarakat miskin utara Yaman sehingga basis dukungan mereka tumbuh dalam satu dekade pertama abad ke-21.

B. Perkembangan Konflik dan Eskalasi Hingga Situasi Terkini

Konflik Houthi dengan pemerintah Yaman meluas ke arena nasional pada tahun 2011. Saat Yama dilanda demonstrasi Arab Spring menuntut reformasi, Houthi ikut dalam protes menentang pemerintahan Saleh. (Riedel, 2017) Meski Saleh akhirnya mundur dan digantikan Abd Rabbu Mansour Hadi lewat dialog nasional, penyelesaian politik yang diupayakan gagal memuaskan semua pihak. Proposal federal enam wilayah terbukti tidak memuaskan kelompok Houthi karena pembagian wilayah dinilai merugikan mereka. Pada tahun 2014 Houthi menjalin aliansi pragmatis dengan mantan Presiden Saleh yang merupakan lawan politiknya di masa lalu untuk merebut kekuasaan. Dengan dukungan pasukan setia Saleh, pada Agustus 2014 Houthi berhasil menguasai ibukota Sana'a yang memaksa Presiden Hadi melarikan diri ke Aden. Penguasaan Sana'a ini memicu intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi pada Maret 2015 (Operasi Badai

Pemulihan) yang menargetkan posisi-posisi Houthi dengan pemboman udara dan blokade laut.

Perang yang pecah sejak 2015 ini menyebabkan bencana kemanusiaan terburuk di dunia, dengan puluhan ribu korban jiwa dan jutaan pengungsi. Setelah tahun-tahun awal perang yang intensif, konflik sempat mengalami kebekuan relatif. Pada 2018 tercapai gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah namun tidak bertahan lama. Pada April 2022 PBB memediasi gencatan senjata dua bulan antara kubu Saudi dan Houthi, yang sempat diperpanjang hingga Oktober 2022. (Alghobari, 2022) Gencatan ini memungkinkan beberapa kapal bahan bakar memasuki Hodeidah dan penerbangan komersial terbatas dari Sana'a, namun negosiasi damai yang lebih luas gagal disepakati sebelum gencatan tersebut berakhir.

Kelompok Houthi menggunakan strategi militer dan politik yang kompleks untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Secara militer, mereka mengandalkan taktik gerilya, penggunaan senjata konvensional dan tidak konvensional, serta serangan rudal balistik dan drone yang semakin canggih, yang sebagian besar didukung oleh transfer teknologi dan pelatihan dari Iran. Serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan pasukan pemerintah dan koalisi, tetapi juga infrastruktur sipil dan jalur pelayaran internasional, seperti serangan di Laut Merah yang mengancam keamanan maritim global. Secara politik, Houthi membangun struktur pemerintahan alternatif di wilayah yang mereka kuasai, mengelola administrasi dan layanan publik,

serta melakukan diplomasi terbatas dengan aktor regional dan internasional, termasuk pembicaraan dengan Uni Eropa dan mediasi oleh negara-negara seperti Oman dan Norwegia.

Dampak konflik ini terhadap stabilitas regional sangat signifikan. Yaman yang secara geografis strategis berada di pintu gerbang Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia, menjadi pusat perhatian global. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan tanker minyak di Laut Merah telah mengganggu perdagangan internasional, memaksa perusahaan pelayaran untuk mengambil jalur alternatif yang lebih panjang dan mahal, serta meningkatkan risiko keamanan maritim. Hal ini memicu pembentukan koalisi maritim internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu untuk melindungi jalur pelayaran tersebut dan menegakkan kebebasan navigasi sesuai hukum maritim internasional.

Secara statistik, konflik Yaman telah menimbulkan kerugian manusia dan material yang sangat besar. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 10.000 orang, mayoritas warga sipil, telah tewas sejak intervensi koalisi Arab Saudi pada 2015, dan sekitar tiga juta orang mengungsi akibat perang saudara ini. Infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih banyak yang rusak atau hancur, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah sangat kritis. Selain itu, blokade dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh berbagai pihak,

termasuk Houthi, semakin memperburuk kondisi warga sipil yang terjebak dalam konflik.

Konflik ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang luas, terutama terhadap sektor pelayaran dan perdagangan di Laut Merah. Serangan Houthi yang terus-menerus terhadap kapal-kapal komersial meningkatkan biaya asuransi dan operasional pelayaran, serta mengganggu pasokan energi dan barang-barang penting ke berbagai negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada Yaman, tetapi juga pada ekonomi global yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut. Indonesia, sebagai anggota Dewan *International Maritime Organization* (IMO), memiliki peran strategis dalam mendukung upaya internasional untuk menjaga keamanan maritim di kawasan ini, termasuk melalui dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian serangan Houthi.

Selain itu, keterlibatan aktor eksternal seperti Iran dalam mendukung Houthi dengan pelatihan militer, suplai senjata canggih seperti rudal balistik dan drone, serta dukungan logistik, memperumit upaya penyelesaian konflik. Dukungan ini memungkinkan Houthi untuk mempertahankan kemampuan tempur yang signifikan dan melakukan serangan lintas batas yang menimbulkan ketegangan lebih lanjut di kawasan. Iran memandang dukungan kepada Houthi sebagai bagian dari strategi geopolitik untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan menantang dominasi Arab Saudi serta sekutunya.

Secara keseluruhan, dinamika konflik Yaman dan peran Houthi mencerminkan interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, dimana identitas sektarian, kepentingan politik, dan persaingan regional saling bertautan. Konflik ini tidak hanya menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat Yaman, tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta tatanan hukum internasional, khususnya dalam konteks hukum humaniter dan hukum maritim.

Memasuki 2023, saat eskalasi konflik bergeser ke perairan internasional sebagai reaksi atas perang Israel Hamas (Oktober 2023), Houthi melancarkan serangkaian serangan drone, misil balistik, dan kapal cepat bersenjata terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. (Africa Center for Strategic Studies, 2025) Mereka menyatakan serangan ini ditujukan pada kapal yang mereka anggap “membantu Israel” serta untuk memprotes pendudukan Gaza. Serangan-serangan tersebut membuat lintasan pelayaran global terganggu, memaksa rerouting kapal dagang dan naiknya biaya pengiriman. Respons Barat muncul dalam bentuk patroli maritim gabungan dan serangan udara oleh AS-Inggris terhadap sasaran militer Houthi pada Januari 2024, yang menarget fasilitas misil dan drone Houthi di wilayah Yaman . Meskipun demikian, pada 2025 Houthi tetap menguasai sebagian besar Yaman barat dan utara termasuk ibukota Sana’a, sementara pemerintahan yang diakui internasional berpusat di Aden dan diyakini lemah. Kondisi

kemanusiaan terus buruk: diperkirakan 19,5 juta penduduk (lebih dari 50% populasi) masih memerlukan bantuan kemanusiaan pada awal 2025. (Aljazeera, 2025)

C. Analisis Ideologi

Secara ideologi, Houthi berciri khas sebagai kelompok Syiah Zaidiyah yang memadukan elemen keagamaan, nasionalisme Yaman, dan populisme anti-korupsi. Mereka mengidentifikasi diri dalam tradisi Zaidiyah yang merupakan bagian aliran Syiah lokal yang menekankan penentangan terhadap penguasa yang dianggap zalim.

Hussein al-Houthi sendiri menjadikan prinsip ajaran Syiah Zaidi, yang menekankan keadilan sosial, penolakan terhadap dominasi asing, dan perlindungan identitas keagamaan mereka. Selain itu, hubungan strategis dengan Iran menjadi faktor penting dalam perkembangan kelompok ini. Iran memberikan dukungan politik, pelatihan militer, dan suplai senjata yang memperkuat kemampuan tempur Houthi, menjadikan mereka sebagai proxy regional dalam persaingan kekuatan di Timur Tengah. Dukungan ini memungkinkan Houthi mengoperasikan senjata canggih seperti rudal balistik dan drone, yang telah digunakan dalam berbagai serangan di dalam dan luar Yaman.

Dari aspek agama, mereka menolak konsep kepemimpinan berlapis (ayatullah) ala Syiah yaitu percaya pada dua belas imam yang ditunjuk oleh Allah dan tidak menerapkan *taqiyah* (penyembunyian identitas) seperti di

Iran, sehingga ideologi mereka memiliki perbedaan penting dengan Syiah mayoritas global.

Houthi juga mengadopsi elemen anti-imperialisme dan pro-resistensi. Sejak awal, mereka menentang kebijakan AS dan Israel di kawasan. Setelah konflik Irak 2003, Houthi menggelorakan slogan “Kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, kutuk bagi Yahudi” , yang mengakar pada citra mereka sebagai “poros perlawanan” bersama Hizbullah dan Hamas melawan pengaruh Barat. (BBC, 2003) Namun para analis menyarankan agar Houthi tidak dianggap semata-mata sebagai proxy Iran. Meski didukung Iran, kelompok ini memiliki agenda nasional tersendiri – menghentikan korupsi dalam pemerintahan Yaman dan memperoleh kekuasaan politik – dan juga didorong oleh kebanggaan nasional dan budaya lokal. (Calson, 2024) Ideologi Houthi juga berkembang waktu ke waktu: di bawah Abdul-Malik al-Houthi, retorika mereka cenderung semakin menyiratkan hasrat berkuasa secara terbuka, selain tetap mempertahankan simbol keagamaan dan kultural Zaydi.

D. Basis Pendukung Sosial

Kelompok Houthi memperoleh dukungan kuat terutama dari komunitas Zaidiyah di pegunungan utara Yaman. Populasi Zaidiyah umumnya bermukim di provinsi Saada, Amran, dan Sanaa bagian utara. Sebagai minoritas Syiah terbesar di Yaman, mereka memiliki sejarah perlawanan terhadap rezim sentral (misalnya pemberontakan terhadap dinasti Ottoman

dan Arab Saudi di masa lampau). Reuters mencatat bahwa Kota Tua Sanaa—dengan mayoritas Zaydi—merupakan “basis pendukung alami” Houthi . Di wilayah ini, slogan dan simbol Houthi (seperti grafiti “poros perlawanan”) mudah diterima karena sejalan dengan perasaan anti-AS dan anti-Israel yang sudah ada.

Selain basis tradisionalnya, Houthi juga berhasil merekrut anggota dari kalangan sosial lain. Misalnya, dalam beberapa kesempatan mereka merekrut militan Sunni (termasuk mantan pejuang Salafi) yang bersekutu dengan mereka dalam menentang pemerintah pusat atau dalam konflik sektarian dengan Al Qaeda/Yahudi lain di Yaman . Mereka menggunakan jaringan sosial dan lembaga keagamaan setempat untuk menyebarkan propaganda—seperti saluran televisi Al-Masirah dan radio komunitas—yang menekankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, serta penolakan terhadap marginalisasi masyarakat utara . Basis dukungan lain meliputi suku-suku di pegunungan, sebagian militer yang masih loyal kepada Saleh (setelah perseteruan mereka berubah haluan ke Houthi pada 2014), dan populasi sipil miskin yang terabaikan oleh pemerintah pusat. Dengan melakukan pelayanan sosial (misalnya mendistribusikan bantuan) dan mengisi kekosongan kelembagaan, Houthi mampu mempertahankan simpati sebagian rakyat walaupun dituduh melakukan penindasan terhadap oposisi internal dan minoritas Sunni di wilayah yang mereka kuasai.

E. Dinamika Politik dan Peran Aktor Domestik-Internasional

Secara domestik, konflik Yaman melibatkan banyak aktor. Pasca pengambilalihan Sana'a, kubu Houthi berperang melawan pemerintahan resmi Presiden Hadi (kemudian Presidensial Council di Aden) yang diakui PBB. Sebelumnya, Hadi dilantik menggantikan Saleh di bawah kesepakatan transisi 2011, namun ketidakmampuan pemerintahannya mengakhiri kekerasan dan keluhan suku telah melemahkan legitimasi. Aliansi Houthi dengan mantan Presiden Saleh (pasca 2014) merupakan dinamika kunci: meskipun Saleh awalnya melawan Houthi, ia berbalik mendukung pemberontakan mereka demi melengserkan Hadi. Taktik "pola putar pasukan" ini mewakili konstelasi politik Yemen yang fluid. Sayangnya, setelah aliansi itu berhasil menguasai Sana'a, Saleh kemudian terbunuh oleh Houthi sendiri pada 2017, menandakan kerapuhannya.

Faksi politik domestik lain juga berperan penting. Separatis selatan yang tergabung dalam *Southern Transitional Council* (STC) mendukung pemisahan wilayah selatan Yaman dan sesekali bentrok dengan pemerintah pusat serta Koalisi Arab; konflik dua front ini mempersulit negosiasi damai. Kelompok-kelompok Islamis seperti Islah (afiliasi Ikhwanul Muslimin) menjadi oposisi internal terhadap Houthi, walau pembagian kekuasaan dan intervensi militer Saudi kadang-kadang mengakibatkan kerja sama tak langsung antara Islah dan pemerintah pusat. Kelompok teror Al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP) dan ISIS juga memanfaatkan

kekacauan untuk memperluas wilayah, hingga konfrontasi mereka dengan Houthi memperumit situasi keamanan.

Pada tingkat internasional, pengaruh signifikan datang dari Iran dan Arab Saudi. Pemerintah Saudi Arabia memandang Houthi sebagai proxy Iran yang memperluas “poros Syiah” di kawasan. (Bayoumy, 2014) Saudi memimpin koalisi militer dari 2015 hingga memblokade dan mengebom wilayah Houthi. Amerika Serikat (dengan Inggris dan beberapa sekutu Barat) mendukung Saudi secara logistik dan intelijen pada masa awal perang, meskipun tekanan publik akhirnya memaksa AS melepaskan sebagian dukungan senjata pada 2021 karena krisis kemanusiaan. Sebaliknya, Iran secara terbuka menyambut kemenangan Houthi pada 2014 dan dilaporkan menyuplai senjata, pelatihan, dan dana ke Houthi. Meski jumlah bantuan Iran tidak diungkap pasti, beberapa pejabat Yaman menyatakan bahwa senjata Iran telah diselundupkan ke Yaman melalui rute laut selama lebih dari setahun menjelang pendudukan Sana’a, dan pasukan Houthi bahkan dikirim ke Iran dan Lebanon untuk pelatihan militer. (Calson, 2024) Pada saat yang sama, analis mencatat bahwa Houthi menegaskan cita-cita Yaman-nasionalis mereka sendiri; dukungan Iran lebih bersifat simbiosis pragmatis daripada dominasi ideologis.

Selain itu, aktor global lain turut berperan. PBB melalui utusannya (misalnya Hans Grundberg) mendorong gencatan senjata dan perundingan damai. Uni Emirat Arab, awalnya partner Saudi dalam koalisi, akhirnya menarik sebagian

pasukannya dan mendukung milisi sekutu yang berkonflik dengan Houthi di beberapa front selatan. Kelompok sipil internasional (NGO) dan media global seperti BBC, Al Jazeera, dan Reuters terus melaporkan kondisi lapangan, mempengaruhi persepsi publik internasional. Saat krisis regional muncul (misal konflik Israel-Palestina), Houthi memanfaatkannya untuk membentuk aliansi politik dengan Iran dan Hezbollah, serta mendapat perhatian global. Secara keseluruhan, dinamika politik melibatkan perpaduan kepentingan lokal (perebutan kekuasaan dalam negeri) dan geopolitik (pertarungan pengaruh Saudi-Iran, serta tekanan diplomasi global).

F. Strategi Militer dan Taktik Tempur

Militer Houthi menerapkan berbagai strategi guerilla dan konvensional dalam perjuangan mereka. Secara geografis, mereka memanfaatkan medannya yang pegunungan utara untuk serangan mendadak dan pertahanan bertingkat. Pada tahap awal, tentara Houthi menggunakan senapan serbu, mortir, dan roket jarak pendek melawan pasukan pemerintah yang lebih besar. Lambat laun, mereka mengembangkan kemampuan rudal balistik dan drone. Dukungan Iran tampak dalam bentuk transfer teknologi UAV (pesawat tanpa awak) berkemampuan serang. Misalnya, Houthi memodifikasi drone Qasef-1 (jangkauan ~200 km) dan Waid-1 (rangkap ~900 km) berpeluru untuk menyerang target jauh. Model Waid-2 yang lebih baru bahkan diduga mampu menjangkau sebagian besar

kawasan Timur Tengah, termasuk Israel . Secara demonstratif, misil balistik buatan Houthi telah ditembakkan menuju Israel dan kapal-kapal di Laut Merah. Salah satu serangan misil balistik Houthi berhasil menewaskan tiga awak kapal kargo True Confidence di Laut Merah pada Maret 2024 . Hampir seluruh perlengkapan anti kapal Houthi merupakan rekayasa ulang dari desain Iran, menunjukkan keterbatasan produksi dalam negeri.

Selain teknologi canggih, Houthi juga mengandalkan taktik milisi tradisional. Mereka menggunakan senapan mesin berat, senjata anti-pesawat, ranjau darat, dan mortir dalam pertempuran darat. Anggota Houthi terkenal menggunakan bom rakitan serta kapal cepat bersenjata kecil untuk menarget kapal musuh dan patroli laut. Pertempuran kota juga sering terjadi ketika Houthi merebut atau mempertahankan permukiman. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga menerjunkan *child soldiers* (dilaporkan oleh PBB dan LSM) untuk operasi darat, dan membentuk unit elit pasukan khusus. Sistem komando Houthi relatif terdesentralisasi; militan loyal di berbagai provinsi dapat bertindak otonom sesuai arahan pimpinan pusat di Sana'a.

Salah satu taktik penting Houthi adalah penggunaan propaganda militer. Setiap keberhasilan, seperti pertahanan di marib atau serangan rudal, segera diunggah melalui saluran resmi Al-Masirah sebagai pencitraan. Mereka juga kerap melakukan parade militer untuk menunjukkan kekuatan rudal dan drone mereka kepada publik maupun lawan. Taktik

pengepungan dan blokade lokal juga dipakai: misalnya, Houthi menguasai wilayah Sanaa dan pelabuhan Laut Merah (Hodeidah), mengendalikan masuknya barang ke wilayah yang mereka kuasai dan menekan pemerintah pusat secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, mereka membatasi aliran makanan atau memanfaatkan titik-titik krusial (seperti bendungan sedia) untuk bernegosiasi. Penggunaan taktik mobile, seperti serbuan kilat dan penarikan cepat (*hit-and-run*), makin meningkat berkat kendaraan lapis baja ringan dan sistem komunikasi lapangan.

Terakhir, Houthi terbuka dalam menyerang target non-militer sebagai tekanan politik, misalnya pemboman pembangkit listrik, penghancuran jaringan suplai logistik musuh, atau penahanan sandera untuk menukar tahanan. Dalam fase kontemporer, mereka juga memperluas jangkauan operasi ke luar Yaman, misalnya dengan menyerang kilang minyak dan fasilitas pengisian bahan bakar di Saudi, serta ikut serta dalam kampanye pro-Iran di zona konflik lain. Semua ini menunjukkan bahwa strategi militer Houthi bersifat asimetris: memanfaatkan bantuan eksternal (Iran) dan dukungan lokal, menyesuaikan taktik antara perang konvensional dan gerilya, serta memanfaatkan ancaman regional untuk mencapai tujuan domestik.

G. Analisis Pelanggaran Hukum Internasional oleh Kelompok Houthi

Kelompok Houthi dalam konflik Yaman telah menjadi subjek perhatian serius dalam konteks pelanggaran hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/IHL*) yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata. Houthi, sebagai aktor non-negara yang terlibat dalam perang saudara, telah melakukan berbagai tindakan yang dinilai melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perang, termasuk serangan terhadap penduduk sipil, penggunaan senjata terlarang, serta blokade kemanusiaan yang memperparah krisis di Yaman.

Salah satu pelanggaran yang paling mencolok adalah serangan langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Dalam banyak insiden, kelompok Houthi dituduh melakukan serangan rudal dan drone yang menargetkan kawasan pemukiman, pasar, dan fasilitas publik, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar. Misalnya, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Houthi di berbagai wilayah Yaman dan bahkan di luar negeri, seperti serangan ke wilayah Arab Saudi dan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, telah menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa di kalangan warga sipil. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip diskriminasi dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, yang mengharuskan para pihak dalam konflik untuk membedakan antara sasaran militer dan

sipil serta menghindari kerugian yang berlebihan terhadap warga sipil.

Selain itu, Houthi juga dituduh menggunakan senjata yang dilarang oleh hukum perang. Laporan dari berbagai lembaga internasional dan pengamat militer menunjukkan bahwa kelompok ini menggunakan rudal balistik dan drone yang dipasang dan dikembangkan dengan dukungan Iran, termasuk jenis-jenis senjata yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan besar dan sulit dikendalikan. Penggunaan senjata semacam ini, terutama jika diarahkan ke sasaran sipil atau tanpa memperhatikan dampak kemanusiaan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan bahkan kejahatan perang. Misalnya, serangan terhadap fasilitas penahanan di Kota Dhamar pada 2019 yang menewaskan lebih dari 100 tahanan merupakan contoh nyata pelanggaran berat yang melibatkan Houthi dan koalisi lawan dalam konflik ini. (Prakoso dkk, 2021)

Blokade dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh Houthi juga menjadi isu penting dalam analisis pelanggaran hukum internasional. Blokade ini menghambat masuknya pasokan makanan, obat-obatan, dan bantuan medis ke wilayah yang dikuasai Houthi, sehingga memperburuk kondisi kelaparan dan penyakit di kalangan penduduk sipil. Menurut hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, pihak-pihak dalam konflik wajib memastikan akses bantuan kemanusiaan yang tidak terhalang kepada warga sipil yang

membutuhkan. Pembatasan yang dilakukan oleh Houthi ini tidak hanya melanggar kewajiban tersebut, tetapi juga memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah sangat parah di Yaman.

Selain pelanggaran langsung terhadap warga sipil dan bantuan kemanusiaan, Houthi juga terlibat dalam praktik perekrutan anak-anak sebagai kombatan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional hak asasi manusia dan hukum humaniter. Penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata dilarang secara tegas oleh berbagai instrumen internasional, termasuk Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa serta Konvensi Hak Anak. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi generasi muda di Yaman.

Dalam konteks hukum pidana internasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Houthi dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang mencakup pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, seperti serangan yang disengaja terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan perlakuan kejam terhadap tahanan. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindakan sistematis atau meluas yang menyerang penduduk sipil, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran paksa. Beberapa laporan dan analisis menyebutkan bahwa konflik di Yaman telah mencapai tingkat keparahan yang memungkinkan

intervensi pengadilan pidana internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk mengadili para pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan Statuta Roma dan Piagam PBB.

Respons internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Houthi juga mencerminkan keseriusan isu ini. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang menuntut penghentian serangan dan pelanggaran terhadap warga sipil, serta menyerukan agar semua pihak memberikan akses penuh kepada bantuan kemanusiaan. Namun, implementasi resolusi ini sering kali terhambat oleh kondisi di lapangan dan kepentingan geopolitik para aktor yang terlibat. Selain itu, beberapa negara dan organisasi internasional telah memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan kelompok Houthi sebagai upaya menekan pelanggaran dan mendorong penyelesaian damai.

Secara keseluruhan, tindakan kelompok Houthi dalam konflik Yaman menunjukkan pola pelanggaran hukum internasional yang serius dan berulang, yang tidak hanya memperburuk penderitaan rakyat Yaman tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata modern. Pelanggaran ini mencakup serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, pembatasan bantuan kemanusiaan, serta perekrutan anak-anak sebagai kombatan. Penanganan pelanggaran ini memerlukan upaya terpadu dari komunitas

internasional, termasuk mekanisme hukum dan diplomasi, untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di tengah konflik yang terus berlangsung.

BAB V

Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi Sehingga Menjalin Kerja sama di Madinah

Sri Karmila Dol



Hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan suku Yahudi di Madinah dianggap sebagai salah satu bagian penting dari sejarah Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menemukan masyarakat yang dibangun oleh berbagai kelompok yang mencakup orang-orang Yahudi yang telah menetap di sana jauh sebelumnya. Keberagaman tersebut menimbulkan tantangan dalam membangun hubungan yang harmonis yang didekati Muhammad SAW melalui konsep-konsep kesetaraan, perdamaian, dan toleransi. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat hubungan antar agama, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial di Madinah (Abdullah, 2009).

Pada awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai

kelompok, termasuk komunitas Yahudi, yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang cukup besar di Madinah. Nabi SAW menyusun Piagam Madinah yang memuat hak dan tanggung jawab semua kelompok yang tinggal di Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Piagam tersebut menekankan pentingnya saling menghormati, kerja sama untuk menjaga keamanan, dan hidup berdampingan secara damai. Meskipun demikian, hubungan ini terkadang tegang, terkadang karena ketegangan politik dan agama yang mendasarinya (Anas & Adinugraha, 2017).

Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pada awalnya masyarakat Yahudi di Madinah bereaksi positif terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW karena mereka melihat adanya kesamaan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam dibandingkan dengan agama mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan muncul, terutama menyangkut dimensi politik dan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk mengonsolidasikan kekuasaan politik di Madinah yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan kaum Yahudi. Sebagian kelompok Yahudi merasa terancam oleh pengaruh sang Nabi dan hal ini akhirnya memicu konflik (Anwar, 2016).

Meskipun masih ada ketegangan dalam hubungan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersikap diplomatis dan tidak secara langsung menghadapi orang-orang Yahudi. Dalam beberapa kasus, beliau menunjukkan kebijaksanaan dan tidak membalas bahkan ketika beberapa kelompok supremasi Yahudi melanggar perjanjian. Hal ini menggarisbawahi salah

satu nilai dasar yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menyeimbangkan keadilan, berusaha menjaga hubungan baik selama tidak ada pihak yang melanggar perjanjian atau menimbulkan ancaman terhadap ketertiban masyarakat Madinah (A'yun, Zulfikri & Hakim, 2022).

A. Kondisi Sosial Politik Madinah Sebelum Kedatangan Nabi Muhammad SAW

Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, Madinah merupakan kawasan beragam suku dan agama. Selain terdapat suku Arab seperti Aus dan Khazraj, Madinah juga muncul oleh komunitas Yahudi yang sudah cukup lama berada di daerah tersebut. Secara sosial, oleh Madinah, keberadaan Yahudi tidak hanya sebagai suatu kelompok agama tetapi memiliki peran dan penganut selalu dalam upaya ekonomi dan politik. Mereka memfasilitasi perdagangan dan memberikan kekayaan yang cukup di masyarakat Madinah (Fatmah, 2018). Namun, meskipun adanya semua keberagaman ini, masyarakat Madinah dihadapkan pada ketidakstabilan politik yang cukup berat.

Pertikaian suku Aus dan Khazraj sudah ada sejak dulu, dan mereka kerap terlibat dalam perang saudara. Pertikaian ini menyebabkan perpecahan di antara suku-suku Arab dan berdampak terhadap sosial Madinah secara menyeluruh. Kondisi yang tidak stabil tersebut menciptakan ancaman yang tidak diinginkan serta kebutuhan yang sangat mendesak terhadap seorang pemimpin yang mampu menyatukan

berbagai suku dan golongan yang ada dalam masyarakat Madinah. Berdasarkan Haris (2016), masyarakat Madinah sangat memerlukan seorang pemimpin yang dapat menyelesaikan konflik secara internal.

Selain konflik antarsuku, ketegangan antara suku Arab dan komunitas Yahudi juga menjadi tantangan besar bagi Madinah. Kaum Yahudi memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang cukup besar yang sering kali berbenturan dengan kepentingan suku Arab, terutama dalam hal perdagangan dan kekuasaan. Namun, terlepas dari ketegangan tersebut, komunitas Yahudi pada awalnya menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang akan memberikan solusi bagi permasalahan mereka. Mereka berharap bahwa Nabi Muhammad SAW akan mampu menciptakan perdamaian di Madinah dan menyelesaikan perpecahan yang terjadi (Hasibuan, 2024).

Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah tidak hanya membawa harapan baru bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat Yahudi yang tengah mencari pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sistem kepemimpinan di Madinah terbelah kacau dan lemah karena terjadi pertikaian di antara golongan-golongan yang hanya ingin melayani kepentingan mereka sendiri daripada berupaya mencapai solusi yang inklusif. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemersatu yang luar biasa dari semua golongan yang bersaing atas dasar keadilan dan kebijaksanaan yang tak

tertandingi yang ditunjukkannya dalam piagam Madinah yang ia buat (Kristianto & Al Farisi, 2024).

Sebelum datangnya nabi Muhammad SAW, Madinah adalah sebuah sistem masyarakat yang pluralistik dan memiliki ketegangan di dalamnya, baik di antara suku-suku Arab maupun dengan komunitas Yahudi yang hidup di sana. Kalimat ini mencakup sebuah hutang yang harus dibayar, seseorang sosok pemimpin diinginkan untuk menghadirkan bukan hanya cekatan dalam menghadang setiap problem pertempuran itu, dia sekaligus bisa membangun tatanan sosial-politik yang mendasarkan pada keadilan dan perdamaian. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang didapat melalui penelusuran dan harapan dapat mewujudkan cita-cita tersebut dengan memfasilitasi persatuan seluruh salah satu masyarakat Madinah untuk dihimpun di dalam Islam, yang menjadi syarat utama untuk mengedepankan prinsip kesetaraan dan persaudaraan (Bahri, 2018).

B. Hubungan Awal Nabi Muhammad SAW dengan Kaum Yahudi

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw. mulai berupaya untuk membina hubungan yang baik serta saling menghargai dengan semua komunitas yang ada, termasuk dengan Kaum Yahudi. Pada masa itu, Madinah adalah kota campuran yang berisi berbagai suku dan agama sehingga penting bagi Nabi untuk menjaga perdamaian dan keadilan di antara mereka. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap

toleran terhadap kaum Yahudi, walaupun mereka berbeda keyakinan. Sebagai pemimpin yang bijak, beliau berusaha menjaga persatuan umat sebagaimana tercermin di dalam perjanjian-perjanjian damai yang beliau buat. Pembuatan perjanjian semacam itu beliau lakukan dalam aspek memasukkan Madinah ke dalam Piagam Madinah yang salah satu isinya menjamin semua komunitas, baik Muslim dan Non Muslim, untuk hidup dengan damai dan saling menghormati. Pada piagam ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap golongan di dalamnya hendaknya saling membantu dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan serta kestabilan Kota Madinah (Said, Alimuddin & Ansharullah, 2019).

Al-Qur'an memperhatikan dengan jelas tidak hanya masalah keadilan kepada umat Islam, bahkan kepada kaum Yahudi sekaligus. Contohnya berikan kepada kita ayat-ayat yang berkaitan dengan iman, Dia berfirman dalam QS Al-Baqarah 62: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik itu Yahudi, Nasrani, atau Sekte Lain, merek semua mendapatkan balasan dari Tuhan dan tidak merasa takut atau sedih". Dipastikan ayat tersebut mengandung penjelasan banyak hal. Al-Qur'an di sebelah ini memberikan peluang kepada setiap orang untuk ber Islam arti kata toleransi di berbagai aspek. Di samping itu menekankan kerukunan, perbuatan baik tanpa harus melihat perbedaan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh baik dalam berkawan kepada umat Yahudi, menyikapi

hal ini tetap memperhatikan kesejahteraan mereka di masyarakat Madinah yang multi dalam hal etnis.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Terjemahnya

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati” (QS. Al-Baqarah: 62).

Ayat pada Surah Al-Baqarah 62 merangkum bahwa penghormatan serta ganjaran di berikan kepada setiap individu sesuai amal yang mereka lakukan. ini, menghargai setiap orang yang mempercayai Allah, hari akhir, dan melakukan aktivitas yang saleh tanpa melihat kepercayaan atau sosial yang di anutnya. Meskipun ayat ini mencakup empat kelompok agama termasuk Yahudi, ia memperlihatkan prinsip dasar bahwa puasa dan amalan yang baik ialah syarat utama untuk meraih pahala serta perlindungan Allah. Dalam hal ini terbuka peluang untuk melakukan dialog antar umat

beragama dengan landasan saling menghormati serta mengakui adanya perbedaan di dalam meyakini satu Tuhan, yang pada akhirnya berdampak positif untuk terciptanya kerukunan, kedamaian antar umat manusia. Di sisi lain, ini juga menekankan bahwa kebaikan dan bukan perbedaan agama lah yang menjadi faktor utama dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dalam hubungan sosial.

Konflik antara umat Islam dan Yahudi tidak bisa dilepaskan dari penafsiran si ayat ini yang menekankan toleransi dan hidup berdampingan secara damai dengan ada. Dalam interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi di Madinah, ia menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan adalah sikap yang bisa dinyatakan oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang agama. Penghormatan terhadap babak prinsip pokok iman dan amal adalah suatu hal yang di luar teks-teks, namun dalam kehidupan praktik sehari-hari di mana umat Islam, Yahudi dan umat penganut agama lain bisa saling bertemu dalam interaksi sosial yang penuh rasa tanggung jawab dan juga etika. Maka, ayat tersebut semakin menegaskan vitalnya hubungan kolaborasi serta sinergi dalam keragaman kepercayaan untuk tujuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat.

C. Piagam Madinah Sebagai Landasan Kerja sama

Sebagai langkah awal terkait hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk dan Islam, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah untuk menjaga perdamaian serta

ketertiban di Madinah. Di dalam dokumen ini antara muslim dan Yahudi diatur hak dan kewajiban, namun lebih jauh juga mengikat berbagai suku dan aliran agama lainnya untuk saling bekerja sama dalam rangka membangun masyarakat yang selaras. Modifikasi selanjutnya yang ditangani di bawah salah satu aspek utama Piagam Madinah mencakup pengaturan pertahanan kolektif yakni muslim dan kaum Yahudi di Wanawis untuk bersama membela kawasan Madinah dari serangan yang tidak diinginkan. Termasuk di dalamnya, menegaskan keutamaan penyelesaian konflik dengan tidak bias ke sebelah pihak tertentu yang dinyatakan asketisme. Ini merupakan salah satu bagian inti piagam ini. Sedikit banyak dapat ditandai melalui hadits untuk mengilustrasikan di atas rembuk persetujuan untuk menampilkan pluralis yang berlandaskan senantiasa berkeadilan. Dalam semangat Piagam Madinah, prinsip perdamaian ditegaskan oleh firman Allah: (Rukmini, 2017).

وَأِنْ جَنَّحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Anfal: 61).

Seperti setiap ayat lain dalam Al-Qur'an, Surah Al-Anfal: 61 berisi fitur unik yang menandai dan menekankan perilaku Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dalam menanggapi tawaran perdamaian, baik itu dari teman atau musuh yang telah berkonflik sebelum kesepakatan itu. Perintah "condongkanlah ke arahnya" menunjukkan bahwa ketika orang lain baik dari pihak yang berlawanan atau pihak yang berbeda ingin mencari perdamaian, umat Islam sangat disarankan untuk menerima proposal seperti itu. Ini menunjukkan sikap damai fundamental Islam dalam hal konflik di mana setiap upaya dilakukan untuk menggunakan cara damai untuk menyelesaikan perselisihan alih-alih permusuhan yang tidak perlu yang dapat menciptakan hambatan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Tawakal, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, merupakan aspek lain yang ditekankan dalam ayat tersebut setelah melakukan langkah yang baik dan benar.

Meskipun tawaran perdamaian mungkin datang dari pihak yang bertikai, pengingat bagi umat Islam adalah untuk selalu tawakal kepada Allah (berserah diri sepenuhnya) karena hanya Dialah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ini adalah contoh di mana tawakal bukanlah penyerahan diri secara pasif, melainkan mencerminkan penyerahan diri yang penuh kepercayaan kepada kebijaksanaan ilahi dalam setiap tindakan yang diambil, bahkan dalam beberapa urusan yang sangat penting yang melibatkan hubungan antar kelompok atau antar negara.

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya perdamaian dengan semua hal yang bersifat keagamaan tetap berpegang teguh kepada Allah dalam setiap langkah yang diambil dalam hidup, sekaligus juga menyoroti ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap langkah yang diambil.

D. Bentuk-Bentuk Kerja sama antara Nabi Muhammad SAW dan Kaum Yahudi

Kerja sama antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di Madinah meliputi berbagai bidang yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu membina hubungan yang saling menguntungkan, yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerja sama yang paling penting adalah dalam bidang pertahanan. Kedua komunitas sepakat untuk mempertahankan Madinah dari ancaman eksternal seperti serangan oleh suku-suku yang bermusuhan dan musuh yang berusaha mengganggu stabilitas kota Madinah. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW mencakup perjanjian bahwa kaum muslimin dan warga Yahudi akan bersatu untuk mempertahankan kota mereka dari ancaman eksternal, pelanggaran perdamaian, dan kehidupan bersama (Hasibuan, 2024).

Di samping itu, dari sudut pandang sosial, kolaborasi ini tampak dalam tata kehidupan masyarakat yang menjaga dengan baik pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi. HoM juga memberlakukan pelanggaran serta

perbuatan zalim antar kaum Muslimin dan juga Yahudi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dengan serius tentang pentingnya perdamaian dan ketenangan tanpa ada kekerasan dan perampokan harta. Hal ini menunjukkan sikap Nabi Muhammad SAW yang melihat dengan seimbang dan mempersoalkan ke semua golongan yang hidup di dalam wilayah kekuasaannya (Humairah & Hasaruddin, 2023).

Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, Nabi Muhammad SAW juga menginstruksikan agar kedua komunitas tersebut melakukan aktivitas perdagangan secara fair, tanpa mencurangi satu sama lain. Kaum Yahudi yang sebelumnya aktif di bidang perdagangan di Madinah, diberikan kebebasan untuk berlanjut dalam aktivitas ekonomi mereka, tetapi dengan adanya peraturan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Inisiatif ini menjamin tidak ada kecurangan dalam perdagangan seperti yang terlampir dalam suatu Piagam Madinah, yang mengatur bahwa kegiatan ekonomi perlu dilakukan dengan semangat keterbukaan dan keadilan serta tidak merugikan satu pihak pun. Kebijakan ini mendorong terciptanya iklim perdagangan yang kondusif dan saling menguntungkan (Kristianto & Al Farisi, 2024).

Penting untuk dicatat, bahwa, penanganan konflik, sosial, ekonomi, maupun hukum, mengacu kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, selalu mengutamakan pendekatan damai. Berdasarkan Piagam Madinah, setiap perdamaian yang berusaha dicapai harus dilakukan secara adil, tanpa memihak kepada satu pihak. Ini melahirkan sistem hukum yang inklusif

dan multikultural baik bagi umat Islam maupun kepada bangsa Yahudi. Nabi Muhammad SAW berupaya agar semua golongan yang mendiami Madinah, termasuk Yahudi, diberikan hak yang seimbang dalam akses hukum tanpa adanya diskriminasi (Rukmini, 2017).

Berkat kerja sama di berbagai bidang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil membangun Masyarakat Madinah yang bersifat inklusif dan harmonis meskipun multidimensi suku dan agama. Piagam Madinah bagi umat Islam dan kaum Yahudi merupakan kontrak sosial yang sangat krusial karena memberikan batasan kewenangan sekaligus hak untuk hidup secara toleran, saling hormat serta kolaborasi di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan adanya sikap kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan sistem keadilan yang bersifat integratif dan damai di masyarakat pluralis seperti Madinah (Said, Alimuddin & Ansharullah, 2019).

E. Faktor Pendukung Terjalannya Kerja sama

Kolaborasi antara Nabi Muhammad SAW dan Yahudi Medinah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui sejumlah faktor yang secara interaktif bekerja untuk menciptakan kesepakatan kolektif. Salah satu alasan terpenting untuk memfasilitasi kerja sama ini adalah kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan di Madinah. Bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Medinah adalah wilayah yang terpecah oleh perang suku antara suku Aus dan Khazraj. Ini menciptakan

ketegangan yang besar, dan ketika Nabi Muhammad SAW datang, dia menawarkan solusi dalam bentuk perdamaian dan kerja sama yang dapat menguntungkan semua pihak (Bahri, 2018).

Komunitas Yahudi yang telah lama menetap di dalam dan sekitarnya Madinah juga menyadari pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di kota tersebut karena mereka adalah bagian integral dari masyarakat Madinah. Tanah mereka sangat subur, dan ada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, mereka juga memerlukan tingkat perlindungan untuk mengamankan sumber daya dan kehidupan mereka. Dari perspektif ini, kolaborasi dengan Nabi Muhammad SAW dan komunitas Muslim menjadi penting untuk menghapus dan mengurangi potensi risiko dan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan mereka (Fatmah, 2018). Pemahaman untuk secara kolektif mempertahankan Madinah, seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Madinah, menjadi dasar dari hubungan ini.

Selain itu, kerja sama khususnya yang muncul antara orang-orang Madinah dengan orang-orang Mekah, dipengaruhi dialek perbuatan perdamaian dan ketertiban yang dipadu dengan keragaman suku dan agama di Madinah. Di samping masyarakat yang tersebut juga ada dan memerlukan suku-suku Arab yang lain yang membangun dengan sah, seperti Aus dan Khazraj, ada juga komunitas Yahudi yang anggotanya sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan keberagaman demikian, sangat diperlukan

adalah satu set sistem yang sanggup mengelola perbedaan, menangkal, dan meminimalkan potensi konflik. Inilah Nabi Muhammad SAW dengan kebijakan menghimbau untuk secara inklusif mengajak semua tokoh untuk bersosialisasi dalam satu aturan, sesuai prinsip yang adil dan setara dalam memberikan pandangan kepada rakyat (Haris, 2016).

Keberagaman ini menekankan pentingnya dalam memperkuat kolaborasi antara Muslim dan Yahudi. Meskipun terdapat perbedaan dalam agama dan budaya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan toleransi dan inklusivitas yang luar biasa yang mendapatkan kepercayaan dari kedua pihak. Piagam Madinah sebagai hasil dari kesepakatan antara Muhammad SAW dan para pemimpin Yahudi berfungsi sebagai komitmen untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan masalah melalui strategi damai dan adil. Hal ini memfasilitasi kerja sama timbal balik yang menguntungkan baik bagi Muslim maupun Yahudi (Hasibuan, 2024).

Faktor selanjutnya yang memfasilitasi upaya kolaboratif adalah pengakuan dan penghormatan yang diberikan kepada hak masing-masing pihak. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengakui eksistensi kaum Yahudi sebagai warga masyarakat Madinah, tetapi mengizinkan mereka untuk bebas menjalankan agamanya beserta tradisi yang dianut. Ini sangat krusial, melihat kepada fakta bahwa komunitas Yahudi memiliki iman yang berbeda dengan umat Islam. Namun di samping perbedaan ini, Nabi Muhammad SAW ternyata mau menciptakan kehidupan yang memungkinkan kedua

kelompok tersebut untuk saling menghargai (Humairah & Hasaruddin, 2023).

Kolaborasi ini juga didorong oleh faktor kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan. Orang-orang Yahudi di Madinah memainkan peran penting dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya sementara umat Muslim baru saja mulai membangun ekonomi yang stabil setelah hijrah mereka ke Madinah. Melalui perjanjian untuk bertransaksi secara adil dan menghormati batas kepemilikan, kedua belah pihak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka tanpa rasa takut akan eksploitasi. Piagam Madinah menjadi titik rujukan penting dalam mempertahankan praktik bisnis yang adil dan terbuka yang bertujuan untuk mendorong hubungan sosial dan ekonomi antara umat Muslim dan Yahudi (Kristianto & Al Farisi, 2024).

F. Perkembangan Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi Setelah Terjalin Kerja sama

Sebelum terjadi ketegangan atas hubungan umat Muslim dengan kelompok-kelompok Yahudi, alangkah baiknya merujuk pada sejarah di mana sekelompok Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW pernah bersekolah di sebuah sekolah Yahudi dan berkolaborasi dalam berbagai aspek hidup dengan umat Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa, setidaknya pada awalnya, ada hubungan yang lebih bersifat positif dan lebih terbuka antara kedua kelompok tersebut. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin dari kalangan umat

Islam diizinkan sebagian besar, interaksi semacam itu, yang wajar dalam upaya memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih bersifat inklusif. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW memperbolehkan adanya intoleransi perbedaan yang berkaitan dengan kepercayaan, dan dengan tindakan sosial yang dilakukan (Humairah & Hasaruddin, 2023).

“Barang siapa menyakiti orang dzimmi (non-Muslim yang hidup dalam perlindungan Islam), maka aku akan menjadi lawannya di Hari Kiamat” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengandung makna yang kuat mengenai penjaan hak-hak non-Muslim yang hidup di negara Islam. Ungkapan ‘dzimmi’ merujuk pada subjek non Muslim di bawah Islam yang diberikan jaminan untuk kehidupan, harta, dan agama mereka selama mereka tetap setia pada syarat perjanjian damai. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa siapa pun yang menyakiti atau menyebabkan kerugian kepada dzimmi akan dihukum berat di akhirat, dan pada waktu itu, dia akan menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat. Ini menjadi bukti bagaimana jaminan perlindungan terhadap hak-hak minoritas sangat diperhatikan, sama seperti ada jaminan pemenuhan keadilan dan supremasi hukum serta ketertiban dalam perjanjian yang dibuat dengan masyarakat semacam itu.

Meskipun pada awalnya hal ini menunjukkan dinamika yang berbeda sebagaimana telah diungkapkan dalam berbagai

literatur. Sebagian besar interaksi Nabi Muhammad SAW dengan komunitas Yahudi merupakan upaya menuju perdamaian dan pembangunan perdamaian, meskipun pada akhirnya beberapa kelompok Yahudi memutuskan untuk memutuskan hubungan dan melanggar ketentuan perjanjian. Hal ini berimplikasi pada politik Islam secara keseluruhan sekaligus menyoroti perlunya memperhatikan konteks sosial dan politik dalam hubungan antar agama (A'yun & Budiman, 2024).

BAB VI

Pembebasan Yahudi Pada Masa Umar Bin Khattab

Muh. Isra Syarif



Kaum Yahudi telah hadir di Jazirah Arab sejak masa pra-Islam, terutama di kota Madinah (Yatsrib) serta oasis Khaybar, yang menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi komunitas Yahudi sebelum tahun 622 Masehi. (Hisham, n.d) Keberadaan mereka meliputi peran sebagai pedagang, petani, bahkan penasihat dalam piagam sosial lokal, menunjukkan sudah terjalinnya hubungan kompleks antara suku-suku Arab dan komunitas Yahudi.

Pada masa kenabian Muhammad SAW, kaum Yahudi di Madinah terikat dalam Piagam Madinah (*Ṣaḥīfah al-Madīnah*) yang mengatur koeksistensi Muslim, Anṣār, Muhājir, dan tiga suku Yahudi: Banī Qaynuqā', Banī Naḍīr, serta Banī Qurayẓah. Meskipun perjanjian ini awalnya memupuk kerja sama, pelanggaran berulang seperti insiden Banī Qaynuqā' dan Banī

Qurayẓah berujung pada pengepungan dan eksil beberapa suku Yahudi dari Madinah. (Hamidullah, 2011)

Hadis “لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دَيْنَانِ” sering dikaitkan dengan kebijakan pasca khalifah, namun konteksnya lebih pada penegakan keamanan politik daripada intoleransi agama murni⁴. Para ulama klasik seperti al-Nawawī dalam Minhāj al-Ṭālibīn (Al-Nawawī, 2005) dan Ibn Qayyim al-Jawzīyah dalam I'lāmu'l-Muwaqqi'īn (Al-Jawzīyah, n.d) menafsirkan hadis ini sebagai pelaksanaan wasiat Nabi saw. dalam kondisi khusus jizya dan perlindungan ahl al-dhimmah. Di sisi lain, dalam wacana kontemporer muncul klaim bahwa Umar “mengusir” seluruh kaum Yahudi demi homogenitas agama. (Ali, 2000)

Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb melanjutkan sunnah kenabian dalam kebijakan perlindungan non-Muslim dan memimpin ekspansi Levant (Suriah, Palestina) serta Mesir pada 15–20 H/636–641 M (Al-Baladhuri, 2000). Dalam penaklukan Yerusalem dan Mesir, beliau menyusun 'ahd amān bagi penduduk Kristen dan Yahudi, memastikan kebebasan beribadah selama membayar jizya, serta melarang perusakan rumah ibadah (Hadi, 2021).

Prinsip ahl al-dhimmah di bawah pemerintahan 'Umar menetapkan bahwa non-Muslim (“dhimmī”) mendapat perlindungan nyawa, harta, dan kebebasan beragama dengan imbalan pembayaran jizya, sedangkan Muslim wajib menjaga keamanan mereka (Yasin, 2024). Kebijakan ini juga melarang pembangunan sinagoga atau gereja baru di wilayah yang

ditaklukkan, namun mengizinkan perbaikan rumah ibadah lama sesuai syarat perjanjian.

Meski niat regulatif tersebut jelas, dalam wacana kontemporer muncul tuduhan bahwa 'Umar "mengusir" kaum Yahudi demi homogenitas agama. Klaim ini sering tidak membedakan antara eksil politik akibat pelanggaran perjanjian dan kebijakan jizya yang bersifat protektif, sehingga terjadi distorsi makna dalam dialog antar agama saat ini (Fauzi, 2016). Dalam kajian Islam klasik maupun orientalis modern, perdebatan mengenai status kaum Yahudi di era 'Umar memicu telaah maqāṣid al-sharī'ah, di mana perlindungan minoritas dipandang sebagai cerminan keadilan ilahiyah (Asqalani, 2010). Namun, teks-teks primer seperti Piagam Madinah, Pact of 'Umar, dan riwayat shahih memerlukan kajian kontekstual untuk menghindari distorsi makna.

A. Bentuk Pembebasan yang Dilakukan Umar bin Khattab terhadap Kaum Yahudi

Istilah "pembebasan" dalam konteks pemerintahan Umar bin al-Khaṭṭāb ra. tidak identik dengan pengusiran atau penindasan dalam arti modern. Dalam sejarah Islam, kata "taṭhīr" (تطهير) atau "taḥrīr" (تحرير) sering kali digunakan untuk menyatakan pembersihan wilayah dari pengaruh musuh atau untuk memastikan kesucian tanah yang dianggap strategis dalam peradaban Islam, seperti Jazirah Arab. "Pembebasan" di sini lebih tepat dipahami sebagai penegakan tatanan wilayah berdasarkan wasiat kenabian, yang bertujuan

melindungi pusat dakwah Islam dari potensi ancaman ideologis atau militer. (Al-Jawziyah, 1997)

Nabi Muhammad saw. sebelum wafatnya mewasiatkan tiga hal penting, salah satunya adalah:

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

“Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab.”

(HR. al-Bukhārī, no. 3053)

Hadis ini dipahami para sahabat sebagai arahan strategis dan syar’i untuk menjadikan wilayah Hijaz sebagai kawasan eksklusif Islam, mengingat perannya sebagai pusat kekhalifahan, dakwah, dan haji. Dalam beberapa riwayat disebutkan pula bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

"Tidak akan ada dua agama yang berdampingan di Jazirah Arab." (HR. Mālik dalam al-Muwattaʿa, no. 1860)

Walaupun riwayat ini tidak terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ia hasan menurut sejumlah ulama, dan dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan Umar dalam mengatur populasi non-Muslim di wilayah inti Islam. (Maulana, 2020)

Khaybar dan Fadak merupakan dua wilayah penting yang dahulu dikuasai oleh komunitas Yahudi, dan telah ditaklukkan oleh Nabi saw. Namun, Nabi saw. membiarkan mereka tinggal sementara di sana berdasarkan perjanjian kerja sama: mereka mengelola tanah dan menyerahkan separuh hasilnya kepada kaum Muslimin. Ketika Umar menjadi khalifah, ia memutuskan

untuk mengakhiri kontrak ini dan memindahkan mereka secara permanen, dalam rangka melaksanakan wasiat Nabi saw. Ibn Sa'd meriwayatkan bahwa Umar mengusir Yahudi dari Khaybar dan Fadak, serta mengganti rugi sisa harta dan hasil panen mereka (Sa'd, 1960).

Tindakan Umar tidak dilakukan dengan kekerasan atau penyaltaan. Ia memerintahkan agar nilai harta, kebun, dan hasil panen yang ditinggalkan oleh kaum Yahudi dihitung, lalu dibayarkan kepada mereka. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menyebut ini sebagai bentuk keadilan Islam dalam pelaksanaan amanah kenabian:

فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ قِيَمَةَ مَا لَهُمْ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ

"Umar membayar kepada mereka nilai harta mereka dan memindahkan mereka ke Syam."

Langkah ini menunjukkan bahwa Umar tidak memerintahkan "pengusiran massal tanpa kompensasi", tetapi pengalihan administratif berbasis hukum. Setelah pemindahan, tanah Khaybar dan Fadak masuk ke dalam pengelolaan negara Islam, digunakan untuk fay' dan diberikan kepada para mujahid dan fakir miskin. Pengelolaan ini mengacu pada prinsip-prinsip yang juga dijelaskan dalam Aḥkām Ahl al-Dhimmah karya Ibn al-Qayyim dan dalam Kitāb al-Kharāj karya Abū Yūsuf (Yusuf, 1979).

Lebih dari itu, langkah Umar menunjukkan pendekatan kenegaraan yang matang: menjaga stabilitas politik internal, melaksanakan amanah Rasulullah saw., dan tetap menjunjung

keadilan syariat terhadap non-Muslim yang tunduk pada aturan Islam.

Pasca wafatnya Rasulullah saw. pada tahun 11 H / 632 M, Jazirah Arab memasuki masa krusial. Muncul gelombang kemurtadan (riddah), klaim kenabian palsu, dan pembangkangan terhadap kewajiban zakat di berbagai wilayah. Situasi ini mengancam integritas negara Islam yang baru tumbuh. Wilayah Hijaz (Makkah, Madinah, dan sekitarnya) menjadi satu-satunya wilayah yang benar-benar stabil dan menjadi pusat spiritual, politik, dan administratif kekhalifahan. (Tabari, 1967)

Abū Bakr al-Ṣiddīq ra. segera mengambil tindakan militer untuk memadamkan pemberontakan ini. Setelah keadaan kembali stabil, Khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb ra. memprioritaskan penguatan internal Hijaz. Beliau melihat perlunya menjadikan Jazirah Arab sebagai wilayah steril dari pengaruh ideologis luar, khususnya yang berpotensi mengancam keutuhan aqidah dan stabilitas politik Islam (Kathir, 1993).

Pada masa Umar, kekhalifahan mengalami ekspansi besar-besaran ke wilayah Syam, Persia, dan Mesir. Tantangan eksternal meningkat, dan kekuasaan Islam membentang dari Mesopotamia hingga Afrika Utara. Dalam situasi seperti ini, Umar memandang bahwa Hijaz harus dijaga sebagai pusat komando yang murni, tanpa ada potensi konflik dari dalam. Oleh sebab itu, setiap komunitas non-Muslim di pusat kekuasaan dipertimbangkan kembali keberadaannya.

Keputusan Umar untuk memindahkan Yahudi dari Khaybar dan Fadak bukan dilatarbelakangi kebencian etnis atau agama, melainkan karena wilayah tersebut berada di jantung wilayah Hijaz dekat dengan Madinah³. Tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan nasionalisasi pusat Islam, agar tidak ada kekuatan ideologis asing yang mengakar di sana.

Sejarah mencatat bahwa pada masa Umar, banyak komunitas Yahudi dan Nasrani yang memiliki koneksi dengan wilayah kekuasaan Bizantium dan Persia, musuh utama kekhalifahan saat itu⁴. Beberapa ahli sejarah seperti Ibn Kathir dan al-Ṭabarī menyebut bahwa terdapat potensi spionase atau sabotase ideologis dari pihak luar yang memanfaatkan komunitas minoritas untuk kepentingan politiknya.

Umar sebagai negarawan yang visioner memahami pentingnya mencegah fitnah (kekacauan) sebelum terjadi. Ia tidak menindas, tetapi mengatur ulang struktur demografi wilayah inti Islam, dengan tetap memberikan hak-hak sipil dan perlindungan syariat kepada kaum Yahudi yang dipindahkan ke luar Hijaz.

B. Fungsi Umar sebagai Pelaksana Wasiat Kenabian dalam Tataran Kenegaraan

Umar tidak bertindak berdasarkan pandangan pribadi, melainkan melanjutkan wasiat Nabi saw. yang telah diriwayatkan secara sahih:

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

"Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab."
(HR. al-Bukhārī, no. 3053)

Wasiat ini dipahami sebagai arahan strategis, bukan sekadar instruksi individu. Umar menunaikannya dalam bentuk kebijakan negara dengan pendekatan yang mempertimbangkan realitas politik, hukum Islam, dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Urgensi ini menjadikan filsafat hukum Islam bukan hanya studi pelengkap, tetapi menjadi fondasi yang memperkuat legitimasi moral dan rasionalitas hukum Islam dalam masyarakat modern yang plural dan dinamis.

Dalam ilmu usul fikih dan siyasah syar‘iyyah, salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga agama (ḥifẓ al-dīn). Dalam konteks negara, ini disebut ḥimāyat al-dīn (perlindungan terhadap keberlangsungan agama Islam secara publik dan struktural). Oleh sebab itu, dalam fikih, dar al-Islam (wilayah Islam) boleh diatur sedemikian rupa untuk menjamin dominasi hukum Islam dan menjaga kesucian aqidah (Al-Ghazali, 1993).

Ulama seperti al-Māwardī, al-Ghazālī, dan Ibn Taymiyyah menyebutkan bahwa pencegahan terhadap potensi fitnah dan penyimpangan termasuk bagian dari tugas penguasa. Maka tindakan Umar sesuai dengan prinsip ini, yakni: mengamankan jantung Islam dari ancaman dalam negeri, sembari tetap menjunjung keadilan terhadap non-Muslim.

C. Pengaruh Tindakan Umar terhadap Hubungan Muslim–Yahudi di Masa Selanjutnya

Setelah Umar bin al-Khaṭṭāb ra. memindahkan komunitas Yahudi dari Khaybar dan Fadak, banyak dari mereka bermukim di wilayah kekuasaan Islam yang baru ditaklukkan, seperti Syam (Damaskus), Irak (Kūfah dan Baṣrah), dan Mesir (al-Fuṣṭāṭ). Di wilayah-wilayah ini, mereka hidup sebagai ahl al-dhimmah di bawah perlindungan negara Islam, dengan kewajiban membayar jizyah dan mematuhi hukum Islam dalam aspek publik.

Tindakan Umar tidak berujung pada pengusiran total Yahudi dari dunia Islam, melainkan hanya dari Jazirah Arab sebagai wilayah inti keislaman. Di luar Hijaz, kaum Yahudi tetap diberi hak tinggal, berdagang, bahkan memiliki tempat ibadah². Dalam dokumen-dokumen awal Islam (seperti ‘ahd ‘Umar), disebutkan adanya jaminan keamanan dan kebebasan beragama bagi non-Muslim yang tunduk pada aturan negara Islam.

D. Perlakuan terhadap Ahl al-Dhimmah dalam Pemerintahan Islam Pasca-Umar

Setelah Umar wafat, kebijakan perlindungan terhadap ahl al-dhimmah dilanjutkan oleh para khalifah berikutnya. ‘Uṣmān bin ‘Affān dan ‘Alī bin Abī Ṭālib tidak membatalkan kebijakan tersebut, bahkan dalam banyak kasus melindungi hak-hak kaum Yahudi dan Nasrani di bawah wilayah kekuasaan

Islam. Mereka tetap diperbolehkan tinggal, berdagang, dan menjalankan ibadah mereka secara internal.

Dalam pandangan fikih, umat Islam diwajibkan untuk bersikap adil kepada ahl al-dhimmah. Dalam al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, al-Māwardī menyebut bahwa perlindungan terhadap non-Muslim merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa dalam menegakkan keadilan Islam. Maka, langkah Umar menjadi kerangka kebijakan umum, bukan insiden diskriminatif semata.

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kaum Yahudi memiliki status legal yang jelas sebagai ahl al-dhimmah. Beberapa bahkan menduduki posisi administratif, seperti dokter istana, penerjemah, dan ahli ekonomi, terutama pada masa al-Ma'mūn dan Hārūn al-Rashīd. Tidak ditemukan kebijakan yang bersifat pengusiran massal terhadap Yahudi secara menyeluruh, kecuali dalam kasus-kasus politik atau pemberontakan (Sorudel, 1970).

Ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bersifat kontekstual, tidak menjadi dasar untuk tindakan represif berkelanjutan. Wilayah-wilayah Islam berkembang menjadi masyarakat multikultural dengan struktur hukum yang mengatur hubungan Muslim dan non-Muslim secara adil, meskipun tetap mempertahankan keunggulan hukum Islam sebagai sistem negara.

Dalam teologi Islam klasik, Yahudi (dan Nasrani) dikategorikan sebagai Ahl al-Kitāb yang diberi posisi istimewa dibanding penyembah berhala. Walau ada kritik terhadap

penyimpangan akidah mereka, namun tidak diserukan pemusnahan atau kebencian mutlak, melainkan pengaturan hubungan dalam koridor hukum dan akhlak Islam. Ulama seperti al-Ghazālī dan Ibn Ḥazm bahkan menekankan perlunya membedakan antara kritik terhadap keyakinan dan perlakuan terhadap individu dari Ahl al-Kitāb. Dalam Tafsir al-Qurṭubī, disebutkan bahwa keadilan tetap wajib ditegakkan terhadap mereka, meski ada perbedaan akidah.

E. Penilaian Ulama dan Sejarawan tentang Keadilan Kebijakan Umar

Para ulama besar seperti Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan al-Nawawī menilai kebijakan Umar sebagai bentuk pelaksanaan syariat berdasarkan maqāṣid, bukan kebijakan politik brutal. Ibn al-Qayyim dalam Ahkām Ahl al-Dhimma menyatakan:

وكان إخراجهم بأمر رسول الله، ويتقدير الحقوق لهم، لا بإخراج ظلم وعدوان

"Pengusiran mereka dilakukan atas dasar perintah Rasulullah, dan dengan pemberian hak-hak mereka, bukan karena kezaliman atau kekerasan."

Sejarawan modern juga menilai Umar sebagai tokoh yang konsisten menjalankan prinsip keadilan, dan tindakannya terhadap Yahudi mencerminkan keseimbangan antara kepentingan agama dan prinsip kemanusiaan.

BAB VII

Sejarah Masuknya Islam di Dunia Barat

Muhammad Rusydi Kadir



Secara Geografis dunia barat merupakan Negara-negara yang berada diwilayah benua Eropa, pada umumnya diasosiasikan juga terhadap negara yang memiliki mayoritas penduduk berkulit putih. Oleh karena itu, selain Eropa, Australia, turki dan Selandia baru dianggap sebagai bagian dari barat dan Sebagian Amerika kecuali Amerika latin tidak dianggap menjadi bagian dari barat karena alasan budaya dan kondisi warna kulit.

para ahli sejarah telah mencatat banyak hal tentang perkembangan peradaban Islam khususnya pertengahan abad ke-8 M hingga permulaan abad ke-13 M. Sejarah peradaban Islam telah dicatat dalam sejarah, bahwa pada masa tersebut Islam pernah mengalami masa kejayaan. Kejayaan Islam ini diperlihatkan dengan berbagai kemajuan-kemajuan dalam

banyak bidang seperti bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, teknologi dan masih banyak yang lainnya. Kemajuan-kemajuan itu terjadi baik dari Daulah Islam di Timur (Daulah Abbasiah) yang berpusat di Baghdad maupun Islam di Barat (Daulah Umayyah) yang berpusat di Cordoba.

Di masa khilafah Bani Umayyah yang berumur kurang lebih 90 tahun telah mencapai keberhasilan ekspansi ke berbagai daerah, baik di Timur maupun di Barat dengan wilayah kekuasaan Islam yang benar-benar sangat luas. Pada zaman khalifah al-Walid Ibn al-Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia adalah nama tua untuk wilayah Spanyol dan Portugal. Sejak awal abad 5 Masehi (tahun 406 M), wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakan Vandalusia. Namun, sejak tahun 711 M, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Prancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam, diperintah oleh pembesar-pembesar Arab dan Barbar. Sejak itulah, wilayah ini dikenal dengan Andalusia.

Spanyol merupakan tempat paling utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antarnegara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains.

Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Besarnya pengaruh Islam terhadap perkembangan Dunia barat perlu pengkajian kembali berdasarkan Sejarah awal masuknya Islam ke Dunia barat.

Beno J, A.P Silen, and M Yanti, “Sejarah Peradaban Islam Di Andalusia” (2021). Artikel ini menjelaskan awal masuknya Islam ke Andalusia dijelaskan berdasarkan rentan waktu masuknya Islam di Andalusia dan periode kekuasaan Islam di Andalusia hingga menemukan kehancuran Islam di Andalusia. Penelitian ini hanya berfokus pada masuknya Islam di Andalusia.

Marni Basir, Hasaruddin berjudul “Pengaruh Peradaban Islam Di Dunia Barat”(2023). Sebuah artikel yang membahas mengenai sedikit dari sejarah masuknya Islam di Dunia Barat tetapi menitikberatkan pada dampak kehidupan dunia barat setelah runtuhnya Islam. Ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi peninggalan setelah Islam pernah menduduki dunia barat menjadi fokus penelitian ini.

Artikel atau penelitian di atas membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol sedangkan penelitian ini menjawab masuknya Islam dari beberapa jalur ke Dunia Barat. Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap fokus pembahasan pada awal masuknya bukan pada dampak yang ditimbulkan setelah masuknya Islam ke Dunia Barat.

A. Awal Masuknya Islam Ke Dunia Barat

Islam pertama kali masuk ke Dunia Barat melalui Spanyol pada tahun 711 M menggunakan jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia/Asbania, kemudian disebut Andalusia, ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah.

Penaklukan atas wilayah Afrika Utara dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 H (masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan) sampai tahun 83 H (masa al-Walid), atas dasar penaklukan ini Islam dapat melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. (Silen, 2022)

Kesadaran Eropa akan adanya peradaban Islam sebenarnya telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. sejak masa-masa awal dakwah Islam. Pada tahun ke 6 Hijrah, Nabi mengirimkan utusan-utusannya kepada raja dan ratu dari negara tetangga. Utusan-utusan itu dikirim ke Kaisar Byzantium (Heraclius). Raja Cyprus atau Makaokas, raja Abbyssinia (Najashi) dan ke raja Persia (Kisra). (Hassan, 2009)

Kontak antara dunia Eropa dan Islam semakin menemui puncak ketika masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini mengutus Khalid bin Walid dan Amr bin Ash untuk melancarkan peperangan ke berbagai wilayah sekitar

jazirah Arab dengan motivasi meluaskan wilayah kaum muslimin. Bahkan peperangan ini termasuk di antara perang yang menyamai prestasi Napoleon, Hanibal dan Alexander dalam sejarah. (Hitti, 2010)

B. Masuknya Islam ke Spanyol (Eropa Selatan)

Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 M. melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia/Asbania, negeri ini subur dan dikuasai oleh bangsa Vandal. Istilah Vandalusia yang diterjemahkan menjadi tanah para vandal inilah kemudian disebut Andalusia.

Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik, sedangkan Musa sebagai pengirim pasukan, sementara Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata, yaitu sebanyak 12.000 pasukan dan berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 92 H. atau 711 M.

Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Thariq bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena jumlah pasukan dan keberhasilannya. Sebagian pasukan yang dibawa olehnya terdiri atas orang-orang dari suku Barbar. Salah satu peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih

dikenal oleh banyak orang adalah keberadaan Gibraltar (Jabal Tahariq), sebuah bukit tempat pertama kali Thariq menyiapkan pasukannya. Dari sinilah dia mulai menguasai wilayah Spanyol lainnya.

Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin 'Abd al-Aziz tahun 99 H/717 M., dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 M ini, telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. (Yatim, 2003)

C. Masuknya Islam ke Sisilia (Eropa Barat)

Pada masa ekspedisi Islam zaman Umar bin Khattab (634-644 M), Sisilia masih berada di tangan Byzantium. Mereka menjadikan pulau ini sebagai markas tentara untuk menghadapi orang Islam. Pada masa Umar bin Khattab, sebenarnya kaum muslimin sudah berniat untuk menaklukkan pulau Sisilia. Akan tetapi Umar bin Khattab menolaknya, karena pulau ini sangat jauh dari pusat pemerintahan Islam, medan ke sana sangat sulit ditempuh dan daerah-daerah yang baru dikuasai harus dibenahi. (Thohir, 2004)

Sisilia adalah sebuah pulau di laut tengah, letaknya berada di sebelah Selatan semenanjung Italia, dipisahkan oleh selat Messina. Pulau ini bentuknya menyerupai segitiga dengan luas 25.708 km persegi. Sebelah utara terdapat teluk Palermo dan

sebelah timur terdapat teluk Catania. Pulau ini di sebelah barat dan selatannya adalah kawasan laut Mediterranean, sebelah utara berbatasan dengan laut Tyrrhenian dan sebelah timurnya berbatasan dengan laut Ionian. (Hammond, 1969)

Pulau Sisilia bergunung-gunung dan sangat indah, iklimnya yang baik, tanahnya subur, dan penuh dengan kekayaan alamnya. Pulau ini di bagi menjadi tiga bagian: Val di Mazara di sebelah barat, Val di Noto di sebelah tenggara dan Val Demone di bagian timur laut. Islam hanya menjadi agama resmi di Val di Mazara sedangkan di bagian yang lainnya mayoritas beragama Kristen. (Sunanto, 2007)

Usaha penaklukan Sisilia dimulai sejak Khalifah pertama Bani Umayyah (Mu'awiyah bin Abu Sufyan) pada tahun 662 M atas perintah khalifah dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh pasukan Mu'awiyah bin Khudaij, yang gagal tapi berhasil merampas harta kekayaan perang pasukan Bizantium, Meskipun pada zaman al-Walid Ibn Abdul Maslik telah menguasai Andalusia, penyerangan ke Sisilia terus dilakukan tetapi tetap gagal, dan hanya mendapatkan harta rampasan perang.

Melihat serangan umat terhadap Sisilia terus menerus dilakukan maka Constantine V sebagai kaisar Byzantium menetapkan ketentaraannya di pulau ini. selama 50 tahun tentara Islam tidak lagi melakukan upaya-upaya ekspansinya. Malah sebaliknya, tentara Byzantium terus menerus melakukan ancaman terhadap wilayah-wilayah Islam di Afrika

Utara ini. Untuk menangkis serangan ini, gubernur Afrika Utara terpaksa membuat pangkalan militer di Tropoli (Libia).

Penaklukan Sisilia sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya konflik penguasa Romawi. Kaisar Romawi memerintahkan gubernur Sisilia Constantin untuk menangkap Euphemius, seorang komandan tentara Byzantium di Sisilia. Perintah penangkapan tersebut terdengar oleh pasukan Euphemius, pertempuran tidak terelakkan. Ketika terdesak, Euphemius meminta bantuan kepada Ziyadatullah dan menawarkan kekuasaan atas Sisilia. Tawaran itu diterima oleh Ziyadatullah.

Pada tahun 827 M (212 H), Ziyadatullah memerintahkan orang kepercayaan Assad Bin Al-Furad untuk melaksanakan penyerbuan. Ekspedisi yang berlangsung selama dua tahun dan memakan banyak korban. Pada tahun 831 M. Palermo pun dapat dikuasai sehingga pasukan Aqlabi terus dapat Mengokohkan kedudukan di Sisilia, terutama bagian barat Val di Mazzara, tetapi ibu kotanya sendiri, Castrogiofanni (dulunya syracuse) baru dapat diduduki pada tahun 859 M (245 H). Kegembiraan pasukan Aqlab ini juga ditandai dengan pengiriman rampasan perang kepada khalifah Bagdad Al Mutawakkil (w. 861 M/247 H). Pada tahun 902 M (289 H). Pulau Sisilia secara penuh dikuasai tiga perempat abad setelah ekspansi pertama mereka.

Munculnya bangsa Norman yang dipimpin oleh Roger pada tahun 1060 M., hingga tahun 1091 M., telah berhasil menaklukkan seluruh kekuatan Islam dan Bizantium di Sisilia

dan mengadopsi peradaban Islam dalam kekuasaan mereka, baik dalam bidang sastra, seni, industri dan bidang-bidang yang lain.

Dengan demikian, kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia secara perlahan menjadi jalur masuk ke Eropa Barat, meskipun Eropa Barat telat menjalin hubungan dengan Imperium Bizantium, akan tetapi penduduknya lebih banyak mengambil alih kebudayaan orang-orang Arab ketimbang orang-orang Bizantium. (Watt, 2007)

D. Kehadiran Islam di Dunia Barat

Kehadiran Islam di Spanyol dan Sisilia tidak saja membawa masuk pasukan untuk menguasai wilayah, kehadiran Islam menciptakan kemajuan diantaranya:

1. Spanyol

Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab (Utara dan Selatan), Al-Muwalladun (orang-orang Spanyol yang masuk Islam), Barbar (umat Islam yang berasal dari Afrika Utara), Al-Shaqalibah (penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran), Yahudi, Kristen Mjareb yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan sumbangan intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya

Andalusia yang melahirkan kebangkitan Ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Di samping dari faktor kemajemukan masyarakatnya, negeri yang subur juga mendorong negeri Spanyol dalam mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir.

Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri Timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjual-belikan Spanyol memasuki fase perdagangan yang cerah lantaran hancurnya penguasaan armada Bizantium terhadap wilayah barat laut Tengah.

2. Sisilia

Selama berkuasa di Sisilia Islam mencapai beberapa kemajuan antara lain, kemajuan dalam bidang sains, sebuah universitas telah didirikan di Palermo. Yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sisilia berperan sebagai tempat penting dalam menghubungkan Eropa dengan dunia Islam. Di samping Andalusia (Spanyol) Sisilia juga berfungsi untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan spiritual Islam kepada dunia Barat.

Sisilia sendiri tidak menghasilkan pemikir dan lembaga spektakuler, akan tetapi keberadaan literatur dan tradisi keilmuan yang di bawa dari dunia Islam lainnya, telah memungkinkan para ulama dan cendekiawan Sisilia

menyalurkan hal-hal baru kepada kolega mereka dari daratan Eropa. Penerjemahan karya-karya penting baik filsafat, kedokteran, sufisme, matematika, optik atau astronomi ke dalam bahasa-bahasa Eropa banyak dilakukan lewat Sicilia.

BAB VIII

Zionis

Abdul Hafid



Salah satu negara yang selalu menjadi topik perbincangan di kawasan timur Tengah saat ini adalah Israel. Terlepas dari konflik politik yang menyertainya, Israel ini menjadi berbeda dengan negara-negara di sekitarnya seperti Palestina, Mesir, Lebanon, Suriah. Latar belakang agama yang dianut Sebagian besar rakyatnya sebagai Yahudi tentu sangat berbeda dengan agama mayoritas di timur Tengah yaitu Islam. Demikian pula bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Israel di kenal sebagai salah satu negara yang memiliki teknologi yang sangat maju, mandiri dan sangat berpengaruh baik secara regional maupun global.

Secara geografis negara ini termasuk negara yang kecil, dengan jumlah penduduk yang juga terbilang sedikit tetapi kedigdayaannya mengungguli negara-negara Arab. Kemampuan Israel mempertahankan eksistensinya di tengah negara-negara yang selalu diliputi konflik tidak bisa dilepaskan

pada akar historisnya. Secara historis, berdirinya Israel sebagai satu negara yang berdaulat adalah merupakan keberhasilan dari gerakan nasional-religius yang dinamakan Zionis. Gerakan ini merupakan suatu aktivitas keagamaan dan politik dari bangsa Yahudi yang menginginkan kembalinya Yudaisme ketanah yang dijanjikan yakni tanah suci “Palestina” (al Ard al Muqaddasah). (al-Maysiri, 1982)

Orang-orang yang berpaham Zionis beranggapan bahwa mereka adalah bangsa terpilih yang telah Tuhan anugerahkan tanah yang suci kepada mereka harus eksis menjadi satu kekuatan yang akan mendominasi kehidupan umat manusia. Kelompok ini muncul ditengah-tengah meningkatnya tensi anti-semitisme (anti Yahudi) di Masyarakat Eropa. Hidup tersegregasi dan penuh intimidasi hak sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya mereka terkungkung. Para elit Yahudi diaspora di negara-negara Eropa bangkit dan melakukan gerakan yang di landasi oleh doktrin theology Yudaisme sebagai umat pilihan Tuhan bukan sebaliknya menjadi orang rendahan atau bangsa lemah yang hidup di telunjuk bangsa-bangsa lain.

A. Sejarah Berdirinya Zionis

Zionis secara etimologis berasal dari kata *zion* (Inggris) atau *sion* (latin) dan Bahasa Ibraninya *Tsyon* artinya bukit. Bukit yang dimaksud adalah gunung Sion yang terletak di selatan Yerusalem dan disucikan oleh orang-orang Yahudi. (Muslih, 2021) Orang Yahudi percaya bahwa dibukit itulah

bertempat bait suci yang dibangun oleh Sulaiman. Secara istilah Zionis adalah orang Yahudi yang ingin tinggal di Palestina, termasuk para pendukung mereka yang secara moral juga ingin menetap di Palestina. (Shulbi, 1978) Istilah Zionisme bagi orang Yahudi menunjuk kepada tanah Israel, yang berakar dalam kesadaran orang-orang Yahudi sejak zaman Bibel.

Dari kesadaran ini sehingga terbentuk gerakan yang bertujuan mengembalikan kerajaan Bani Israel dan membangun Haikal Sulaiman di atas reruntuhan masjid al-Aqsha kemudian dari sini akan menguasai dunia dan kekuasaannya ada di Yerusalem tepatnya ditangan raja orang Yahudi yakni seorang Mesias yang diharapkan kedatangannya berasal dari keturunan Daud.

Pada tahun 606 SM kerajaan Babilonia menyerang kerajaan Yahuda dan menduduki kota Yerusalem. Tentara Nebukadnezar melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat, kaum pendeta, Wanita, dan anak-anak. Saat Kerajaan Yahuda hancur dan berakhir maka saat itulah orang Yahudi mulai terpisah dari kesatuan etnis, dibuang keluar dari wilayahnya, saat-saat itu disebut diaspora. (Dimot, 1993) Di tempat pembuangan seperti di Eropa, orang Yahudi hidup dalam penindasan dan diskriminasi, mereka hidup dikampung-kampung khusus dihuni orang Yahudi yang disebut “ghetto”. Hampir 2000 tahun mereka di diaspora berusaha survive untuk satu identitas. Orang Yahudi hidup tersegregasi, menjadi masyarakat rendahan. Di tengah Masyarakat Eropa yang aktif

mengampanyekan gerakan rasisme yang disebut antisemitisme, orang-orang Yahudi seakan tidak ada pilihan untuk dapat bertahan hidup di Eropa.

Salah satu peristiwa yang kelam dalam sejarah kehidupan orang Yahudi di Eropa adalah pada peristiwa holocaust yaitu peristiwa pembantaian orang Yahudi oleh Nazi Jerman pada perang dunia II yang mengorbankan jutaan orang Yahudi. Keberadaan paham Zionis yang mengonstruksi suatu identitas masyarakat Yahudi sebagai suatu bangsa memang sudah lama terwacana sebelum munculnya Zionis yang digagas oleh elite-elite Yahudi pembaharu. Namun keberadaan paham Zionisme ini adalah untuk semakin menguatkan sentimen keyahudian yang sudah tertanam dalam setiap jiwa orang Yahudi. Sehingga ketika ada orang Yahudi yang menikah dengan orang Eropa maka sebagai bentuk komitmen kebangsaannya adalah dia harus memilih identitas sebagai seorang Yahudi daripada identitas kebangsaan Eropanya.

Gerakan kebangsaan Yahudi Zionisme sebetulnya sudah mulai digelorakan tahun 1884 sebagai hasil konferensi Kattowits yang dipimpin oleh Leo Pinsker (1812-1891). Pada tahun 1883 Baron Edmon de Rathchild dari Paris mulai aktif berjuang untuk memulangkan Yahudi ke Palestina. Tetapi jauh sebelum itu gerakan-gerakan seperti Zionis ini sudah pernah di bentuk seperti gerakan Makkabiy, gerakan Bar Kokhba, gerakan Moses Kretti dan gerakan David Robin yang inti dari tujuan kelompok pergerakan Yahudi ini adalah berdirinya satu teritori Yahudi di Palestina.

Akan tetapi pada masa Theodore Herzl (1860-1909) sebagai tokoh pembaharu Yahudi terjadi perubahan yang sangat fundamental di kalangan umat Yahudi. Tahun 1897 Herzl mengadakan kongres Zionis I di Basel (Swiss) dihadiri 200 peserta dari 24 negara. Beberapa Keputusan penting dari kongres Zionis pertama ini yaitu dibentuk organisasi Zionis yang strukturnya menyerupai struktur negara berdaulat ada unsur Parlemen, Komite Eksekutif, Mahkamah Kongres sebagai yudikatif. Kemudian kongres juga Menyusun program basel atau perlindungan kepada setiap Yahudi yang akan pindah ke Palestina.

Lewat kongres ini Herzl memperkenalkan bukunya yang mengubah cara pandang orang Yahudi. Herzl mencoba mengubah paradigma berpikir orang Yahudi dengan menghentikan gerakan kebangsaan yang bercorak filsafat dan keagamaan dan menyatukan dalam satu gerakan yang bercorak politik. Idenya ditulis dalam bukunya “Yudenstaat” atau negara Yahudi.

Buku Yudenstaat ini menjelaskan beberapa Langkah-langkah strategi Yahudi agar dapat eksis menjadi sebuah bangsa yang besar dan berdaulat. Beberapa poin penting dalam pandangan Theodor Herzl yaitu tentang kemungkinan orang-orang Yahudi untuk membentuk suatu negara, tanggapan atas isu-isu anti semitisme yang terus membayangi orang Yahudi, tempat untuk mendirikan negara, konstitusi negara, rencana migrasi dsb.

Buku ini adalah salah satu literatur penting menuju terbentuknya negara Yahudi. Selain menulis karyanya Langkah-langkah diplomasi juga dilakukan oleh Herzl seperti menemui Sultan Hamid II sebagai penguasa Turki Usmani yang menguasai Palestina saat itu untuk menyampaikan solusi tentang negara Yahudi tetapi usaha ini gagal karena Turki Usmani menolak untuk memberi tanah Palestina. (Friedman, 2004) Selanjutnya Herzl juga berdiplomasi dengan Wilhem II dari Jerman, juga Komisi Kerajaan Britania Raya untuk imigrasi asing.

Gagasan-gagasan Herzl tetap sama yaitu untuk dapat mewujudkan negara Yahudi maka solusinya adalah Kembali ke tanah Palestina yang disebut dengan kegiatan Aliyah. Aliyah makna dasarnya adalah “naik” maksudnya adalah naik kembali ke Yerusalem, yang secara geografis memang berada pada dataran yang tinggi. Ide tentang mendirikan negara Yahudi ini ditentang oleh sebagian Yahudi yang berhaluan konservatif. Kelompok Yahudi konservatif beranggapan bahwa Yahudi ini harus dikembalikan pada nilai-nilai luhurnya yaitu anugerah ilahi bukan sebuah malapetaka. Kelompok Yahudi yang disebut sebagai pembaharu menyatakan bahwa gerakan nasionalisme Yahudi akan berpotensi menimbulkan pemberhalaan dimana bangsa menggantikan tempat Yahwe (Tuhan).

Kelompok anti-zionisme bahkan menyatakan bahwa peristiwa holocaust adalah merupakan penebusan dosa kolektif kaum zionis yang mencita-citakan tanah yang

dijanjikan. Namun kelompok Yahudi pembaharu tidak berhenti dengan ronrongan dari dalam. Pada abad ke-19 perjuangan emansipasi orang Yahudi di Eropa dan Amerika sudah mulai tercapai, mereka sudah boleh bergaul dan berpartisipasi membangun negara. Mereka sudah dapat akses keruangan publik seperti Pendidikan, Kesehatan, sosial dsb.

Harapan menuju negara yang di cita-citakan tersebut mulai terwujud ketika tanggal 2 November 1917 pemerintah Inggris mengumumkan statement politiknya tentang Palestina yang disebut “*Balfour Declaration*” isinya antara lain bahwa Inggris menganugerahkan sebuah perumahan Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina dan akan melakukan segala kemungkinan demi tegaknya kebijaksanaan ini dengan ketentuan tidak akan dilakukan hal-hal yang merugikan hak-hak sipil dan agama masyarakat yang bukan Yahudi. Dengan dikeluarkannya deklarasi Balfour ini maka imigrasi orang-orang Yahudi yang diaspora di Eropa kembali ke Palestina semakin meningkat.

Zionis berhasil mewujudkan cita-cita besar yaitu Kembali ketanah yang dijanjikan “Yerusalem” ditandai dengan berdirinya Negara Israel Modern pada tanggal 14 Mei 1948 yang mendapat legitimasi secara *de facto* dari negara-negara besar seperti Amerika, Inggris dan Rusia meskipun di jazirah Arab tidak ada satupun negara Arab yang mengakui berdirinya negara baru yang bernama Israel.

B. Tujuan dan Pola Gerakan Zionis

Zionis adalah konstruksi yang menyatukan antara dua sisi kehidupan orang Yahudi yaitu agama dan politik. Telah tertanam dalam setiap pikiran dan jiwa orang Yahudi selama berabad-abad bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan dan pemilik sah dari tanah yang dijanjikan yang orang Israel menyebut tanah Israel (Eretz Israel) Orang Eropa menyebut *the promised land* dan orang Arab menyebut *al ard al Muqaddasah*. Dalam penetapan dan pencarian tanah yang dijanjikan ini orang Yahudi melalui proses yang rumit ada yang berpikir di Amerika Selatan, Afrika sampai akhirnya bangsa Yahudi dan Zionisme menyepakati Palestina sebagai "*Promised Land*" (Azra, 2002).

Secara dogmatis gerakan Zionis memformulasi doktrin-doktrin dalam kitab-kitab yang di percayai oleh Yahudi maupun Kristen sebagai inspirator utama. Pada Kejadian 15:18 misalnya di situ Tuhan berfirman.

Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman: "Kepada keturunanmu Kuberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat."

Keterlibatan orang-orang Kristen dalam terbentuknya Zionis ini tidak bisa dipungkiri. Mereka sangat menginginkan agar orang Yahudi dapat kembali ke Yerusalem sebagai bukti kebenaran Bibel. Selain itu jejak-jejak perang salib masih menjadi aspirasi di kalangan orang-orang Kristen Ortodoks dan Yahudi untuk menguasai Yerusalem lewat konspirasi yang

mereka sebut perang salib damai (*Peaceful Crusade*). (Hermawati, 2005) Adalah Napoleon Bonaparte kaisar dari Prancis merupakan salah seorang yang masih menjadikan isu Yerusalem sebagai isu-isu propaganda untuk menghasut orang-orang Yahudi agar kembali ke tanah Palestina.

Ada tiga alasan secara teologis kenapa Yerusalem ini menjadi titik konflik antar agama. Pertama orang Yahudi beranggapan bahwa merebut Yerusalem adalah satu proses akhir dari penantian yang panjang. Kemudian Islam beranggapan bahwa konflik di tanah suci itu sebagai pertanda munculnya Dajal yang artinya pertanda akan berakhirnya masa kejayaan Yahudi karena akan diperangi umat Islam bersama Imam Mahdi dan umat Kristiani beranggapan bahwa kembalinya Yahudi ke Yerusalem adalah pertanda penting *the second coming* atau kedatangan kedua kali dari Yesus Kristus yang memerintah selama satu millenium ke depan. (Nuridin, 2009) Alasan berikutnya adalah ketiga agama besar dunia ini (Islam, Yahudi dan Kristen) masing-masing mengklaim bahwa Yerusalem adalah tanah suci bagi mereka sehingga rasa kepemilikan atas daerah ini menjadi pemantik konflik-konflik yang bersifat regional.

Ketika di analisa lebih jauh dari doktrin-doktrin teologi yang memerintahkan orang Yahudi kembali ke tanah yang dijanjikan maka ketika di kaji dari aspek geografis maka yang dimaksud tanah yang dijanjikan bukan hanya Yerusalem. Sebab firman Tuhan berbicara sungai Mesir sampai Eufрат (mengalir dari Turki melewati Irak dan Suriah) maka tafsir

geografisnya adalah mencakup bagian dari Mesir timur (Sinai), Israel-Palestina, Yordania, Arab Saudi bagian barat laut, Suriah bagian selatan, Irak bagian barat artinya bahwa tanah yang dijanjikan itu ketika dilihat dalam konteks geografis hari ini bukan saja Palestina tetapi ada banyak negara yang harus Zionis taklukkan untuk bisa mewujudkan janji kitab suci tersebut.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Zionis agar dapat menguasai tanah Palestina, maka strategi-strategi menuju ke cita-cita besar tersebut di susun dengan matang antara lain membeli tanah-tanah di Palestina untuk sebagian dimanfaatkan sebagian petani-petani Yahudi, melakukan program migrasi besar-besaran dimulai oleh kelompok pecinta Zion yang dipimpin oleh Leo Pinsker (1821-1891), melakukan diplomasi terhadap Turki Usmani dengan menawarkan bantuan modal dengan jalan mengakui eksistensi Yahudi, mengembargo secara ekonomi orang Palestina dengan jalan menutup jalan suplai kebutuhan sehari-hari. Karena embargo ekonomi sehingga penduduk Palestina banyak yang miskin dan untuk hidup mereka menjual tanah ke Yahudi. Melakukan tindakan-tindakan terorisme kepada warga Palestina melalui pengusiran dan pembantaian orang Palestina misalnya dalam peristiwa Nakba tahun 1948 dan ini dicetuskan oleh David Ben Gorion yang menyatakan selama Yahudi bukan mayoritas di Yerusalem maka sulit mendirikan negara serta memperkuat kepemimpinan Yahudi di Palestina dalam bidang ekonomi dan Politik.

C. Pengaruh Zionis dalam Konteks Global

Perjuangan zionis tidak berhenti sampai pada keberhasilan mendirikan negara Israel di tanah Palestina, akan tetapi gerakan ini menjadi gerakan berkelanjutan untuk misi yang berbeda yaitu menjadi penguasa dunia. Zionisme global memiliki akar sejarah, intelektual, dan politik yang muaranya adalah bagaimana agar dunia ini di pimpin oleh orang Yahudi.

Setidaknya ada dua doktrin primer yang dikembangkan oleh Israel Yahudi terkait dengan gerakan zionisme dan gerakan keagamaan mereka dalam sejarah modern, serta upaya kolonisasi di Palestina yaitu: Israel sebagai “bangsa pilihan Tuhan” dan “tanah yang dijanjikan Tuhan” atau janji Tuhan atas tanah yang dijanjikan. Dua doktrin ini berasal dari kitab suci mereka yaitu Taurat dan Talmud. Dua doktrin inilah yang dijadikan ideologi Yahudi modern baik secara teologis, historis, politis maupun secara ekonomi. (Amri, 2013) Ada dua rencana besar *grand strategy* Zionis Israel yaitu Israel harus menjadi negara paling kuat diregional. Yang kedua memecah negara-negara Islam terutama di timur tengah dan Asia selatan.

Runtuhnya Khilafah Islam di Turki serta perubahan sistim pemerintahan monarki absolut kemonarki konstitusi yang dikenal dengan Revolusi Turki Muda adalah hasil kerja yang terukur, presisi dan senyap dari gerakan Zionis ini. (Rofi, 2015) Zionis sebagai satu gerakan yang terkoordinasi menata pola kerjanya secara ketat dengan bergerak secara presisi, licik, dan

senyap sehingga pengaruh gerakannya sampai saat ini begitu terlihat.

Keberhasilan bangsa Israel dalam mendirikan negara pada kawasan yang sudah “bertuan” tidak lepas dari kekuatan gerakan pemikiran dan ideologi yang mem *back up* nya, yaitu Zionisme. Lalu Zionisme inilah yang diklaim menyulut api konflik berkepanjangan dan mengobarkan permusuhan turun-temurun di bumi Palestina dan sampai sekarang ini masih sering bergejolak. Rivalitas yang abadi dari Zionis yang menjelma menjadi Israel saat ini adalah negara yang memiliki ideologi yang berbeda bahkan bertentangan dengan ideologi Zionis.

Maka Islam sebagai satu ajaran agama yang mengandung ideologi bagi Israel adalah ancaman yang nyata bagi eksistensinya. Salah satu rintangan besar yang dihadapi oleh gerakan ini adalah agama-agama wahyu, yakni Islam dan Kristen. (Nurdi, 2006) Sehingga segala upaya untuk melemahkan gerakan ideologi yang kontra Zionis bagi Israel harus dimusnahkan. Pemikiran-pemikiran Zionis ini telah di rumuskan dalam satu dokumen yang disebut *Protocol of Zion*. *Protokol of Zion* ini adalah rumusan dari buku-buku Yahudi dan Talmud (Talmud:Taurat yang telah didistorsi dan diselewengkan makna aslinya). Pada tahun 1901 seorang pendeta gereja Ortodox dari Rusia berhasil menerjemahkan. Kemudian terjemahan ini berupa dokumen rahasia ditemukan oleh seorang Freemasonry yang berkhianat. Freemasonry atau lebih dikenal dengan sebutan Freemason adalah gerakan

Yahudi internasional, sekaligus merupakan gerakan rahasia paling besar dan paling berpengaruh di seluruh dunia. Ada 9 poin rencana zionis yang poin-poin pentingnya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Cara terbaik untuk menguasai dunia ialah dengan merampas kekuasaan dan ancaman, bukan dengan perundingan akademik atau diplomasi.
2. Kekuatan kita harus lebih kuat dari kekuatan-kekuatan lain di segala sektor.
3. Penguasaan terhadap media sebagai sarana propaganda isu-isu yang dipakai untuk membenturkan kepentingan-kepentingan pihak yang akan menghalangi tujuan Zionis. Lewat media, gerakan Zionis akan senyap tidak dapat dideteksi oleh lawan.
4. Melakukan proses pemiskinan sebab menundukkan manusia dengan kemiskinan akan lebih efektif dilakukan daripada menundukkan manusia dengan undang-undang.
5. Zionis akan terus berupaya memecah belah umat-umat yang merintangi perjuangannya dengan jalan menumbuhkan fanatisme di antara mereka.
6. Zionis harus menguasai ekonomi dan merusak industri kelompok lain dengan menanamkan paham ekonomi yang sesuai dengan cita-cita Zionis.
7. Apabila zionis telah memiliki kekuatan dan telah menjadi penentu kebijakan dunia maka tidak ada agama-agama lain yang akan dibiarkan berkembang.

8. Zionis akan melakukan konspirasi agar para pemuka agama di luar Yahudi tidak mendapat kepercayaan lagi dari umatnya dan telah terbukti di ajaran Kristen terus mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu.
9. Eksisnya Zionisme sebagai ideologi menjadikan Israel sebagai negara yang sangat mempengaruhi tatanan dunia baik regional maupun global. Dunia Islam khususnya secara teritori akan semakin menyempit khususnya tanah Palestina dengan ekspansi terus menerus dilakukan Israel yang di dukung oleh negara-negara yang pro Zionis. Selain itu kekuatan negara-negara Islam juga akan semakin dilemahkan lewat program pecah belah dan pelemahan-pelemahan di segala bidang.

BAB IX

Hubungan Islam dan Kristen Abad Modern

Nurhidayat



Agama dan sejarah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena agama merupakan produk masa lalu yang telah melewati perjalanan panjang bahkan melintasi abad demi abad. Dalam perjalanan sejarah itu agama bersentuhan dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat terdapat budaya, politik, ekonomi kesukuan bahkan agama. Agama ketika berhubungan dengan sub sistem dimasyarakat termasuk agama yang berbeda maka akan melahirkan hubungan apakah pertentangan, atau saling kerja sama.

Sejarah dalam studi Islam termasuk dalam studi keagamaan karena terkait dengan ilmu hadis. Berarti ilmu belum menjadi ilmu yang mandiri karena karena kemampuan orang arab untuk menghafal, namun ketika wilayah arab telah menjangkau wilayah-wilayah non-Arab ketajaman mereka mulai melemah dan muncullah kebutuhan untuk mencatat. Pada abad ke-2 dan ke-3 tentang hadis nabi, riwayat hidup

beliau, dan lain, inilah merupakan embrio munculnya studi sejarah dalam Islam setelah itu berkembang sejarah sejarah selanjutnya.

Sejak awal kehadiran agama Islam di Jazirah Arab tidak terlepas dari agama Kristen dan Yahudi. Wilayah arab yang merupakan pusat perkembangan Islam berbatasan langsung dengan daerah Syria yang dikuasai oleh kerajaan Romawi dan kerajaan Persia yang merupakan daerah pusat kebudayaan, termasuk kebudayaan Kristen. Nabi Muhammad saw. pernah berdagang ke daerah Syria sebelum dilantik menjadi Rasul.

Perkembangan peradaban dan perluasan wilayah menyebabkan adanya persentuhan antara Islam dan Kristen melalui berbagai media, seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan dan peperangan. Di berbagai wilayah taklukan Agama Islam menjamin keamanan dan kebebasan umat kristen untuk menjalankan ibadahnya.

A. Hubungan Islam dan Kristen pada Masa Awal Munculnya Islam

Hubungan Agama Islam dan Agama Kristen yang terus bertahan sampai saat ini, karena agama Islam bersifat post-Kristen. Yakni kehadiran Agama Islam sesudah agama Kristen dan banyaknya ritual ibadah yang sesuai di antara keduanya serta memiliki hubungan historis yang di bawah oleh keturunan Nabi Ibrahim as. Berbeda dengan agama Hindu, Buddah dan lainnya yang memiliki perbedaan dengan pemahaman keagamaan sehari-hari Agama Kristen. Ada 4

perjumpaan utama membentuk hubungan dan pandangan positif umat Kristen terhadap umat muslim awal.

Pertama adalah seorang rahib Kristen, yang bernama Bahira, melihat “tanda kenabian” pada Muhammad kecil yang berusia 12 tahun yang tengah menempuh perjalanan dagang bersama pamannya (Abu Talib) ke surya (Syam). Tertarik dengan pembawaan anak muda tersebut, Bahira mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu talib tentang Muhammad dan sifat-sifatnya, kemudian berbicara langsung dengannya. Sejumlah pertanyaan dari Bahira menunjukkan hubungan menarik antara tradisi Kristen dan misi masa depan Muhammad muda. Ibn Hisyam mendeskripsikan Bahira sebagai orang yang memiliki “Pengetahuan tentang orang Kristen” selanjutnya historiografi Islam menunjukkan hal tersebut sebagai nubuat atas Muhammad di masa depan sebagai rasul berdasarkan sumber- sumber Kristen.

Kedua adalah kejadian terkenal ketika Muhammad saat itu berusia 40 tahun dan menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, dia bingung dengan kejadian tersebut setelah menerima wahyu pertama itu, dia bergegas menemui istrinya (Khadijah) dan memintanya untuk menyelimutinya, karena merasa takut terhadap pengalaman yang telah dialami dan kelak mengubah sejarah dunia itu. Dia kemudian diyakinkan oleh seorang penganut Kristen yang “bijak dan berilmu” yang bernama Waraqah bin Naufal, yang merupakan sepupu Khadijah. Alasan mengapa Waraqah diminta pendapatnya, karena dia pemeluk Kristen yang taat, membaca kitab-kitab

suci dan belajar dari orang-orang yang meyakini Alkitab dan Taurat. Setelah mendengarkan penuturan Muhammad, Waraqah membenarkan bahwa dia telah didatangi “Malaikat Jibril” yang juga turun kepada Nabi Musa putra Imran. jadi awal mula kenabian Muhammad di sahkan oleh “Kitab-kitab, Malaikat dan nabi terdahulu dalam tradisi Kristen.” Hal tersebut menunjukkan masa awal Agama Islam dengan diturunkannya Al-Qur’an.

Kejadian ketiga agak berbeda, tetapi menguatkan perjumpaan sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad mulai menyampaikan Agama Islam secara terang-terangan, dia mengirimkan sekelompok kecil umatnya ke kerajaan Abyssiniah (Ethiopia) untuk menghindari tindakan kejam kaum Qurays yang terjadi di Mekah. Hal ini merupakan fakta yang menunjukkan bahwa umat muslim awal mempercayai adanya kesamaan dengan umat Kristen. Raja Kristen, saat itu bergelar Negus, dikenal dalam bahasa arab sebagai Najasi. Dia menyambut baik delegasi muslim tersebut dan menolak mengembalikan mereka kepada kaum kafir Mekah. Hal ini sebagai pertanda ketiga tentang simpati dan persahabatan umat Kristen terhadap umat muslim.

Kejadian keempat di Mina, tempat komunitas muslim baru berhijrah. Dalam sebuah kejadian yang mungkin dapat dianggap sebagai dialog pertama Islam-Kristen, Nabi Muhammad memberikan izin kepada sekelompok umat Kristen dari Najran menyelenggarakan ibadah mereka di mesjid. Setelah mereka beribadah, nabi mengajak delegasi

tersebut untuk memeluk Islam. Mereka menolak namun setuju untuk hidup secara damai, berdampingan dengan umat muslim. Hal ini lebih dari sekedar kejadian yang menunjukkan toleransi beragama, melainkan memberikan gambaran tentang ikatan khusus antara umat muslim awal dan umat Kristen. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah/ 2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menurut Ibnu Katsir, merupakan tanggapan atas kejadian Bani Salim b. Auf salah seorang sahabat rasul dari Madina memaksa putranya yang beragama Kristen untuk memeluk Islam. Aplikasi menarik dari ayat ini dapat ditemukan dalam kisah Umar bin al-Khattab khalifah kedua Islam (586-590M) yang meminta seorang perempuan tua Kristen untuk memeluk Islam. Perempuan tersebut menjawab "aku seorang perempuan tua dan kematian sudah dekat bagiku" mendengarkan jawaban ini" Umar membaca Qs. Al-Baqarah

ayat 256 tadi dan meninggalkannya. Akhirnya juga perlu menyebutkan kaisar Bisantium Heraklius, yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. dan konon pernah berinteraksi dengan khalifah pertama (Abu Bakar). Dia tetap dihormati sebagai penguasa yang bijak dan adil karena kebijakan politiknya serta pengabdianya terhadap agamanya.

Dengan demikian, umat muslim memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Kekaisaran Bizantium daripada terhadap kerajaan Persia dengan alasan, Kekaisaran Bizantium adalah umat Kristen. namun hal ini juga dibenarkan secara teologis sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah/ 5: 82 yang berbunyi:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي قُلْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَسِيسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.

Ayat tersebut memuji umat Kristen sebagai kaum yang lebih dekat dengan Islam secara emosional dibandingkan umat agama yang lain. Meskipun tradisi umat muslim memandang trinitas Kristen sebagai pelanggaran terhadap keesaan Tuhan (Tauhid), sebagai bagian dari konsep monoteisme Islam yang kuat, tetapi pengabdian umat Kristen terhadap tuhan diakui secara luas.

B. Hubungan Islam dan Kristen abad Modern

Perang Salib menciptakan transformasi mendalam bagi masyarakat Barat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal yang paling pokok adalah kemajuan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan di dunia Barat. Saat ini, ilmu pengetahuan telah menjadi aset krusial bagi negara-negara Barat dalam menggalang perkembangan peradaban dan kekuatan militer mereka.

Pada masa tersebut, ilmu pengetahuan menjadi komoditas utama yang memajukan peradaban dan kemampuan militer bangsa Barat. Dengan kekuatan militer yang dimiliki, negara-negara Barat mampu melakukan penetrasi yang signifikan ke wilayah-wilayah strategis yang dikuasai oleh umat Islam. Salah satu contohnya adalah kedatangan Napoleon Bonaparte di Mesir, membawa bersama kelompok ekspedisi yang terdiri dari anggota-anggota dengan keahlian beragam.

Hegemoni Islam menurun dikarenakan tindakan umat Islam sendiri yang suka memisahkan diri dari kelompok

(jamaah) dan hidup menyendiri. Sementara itu, penyerangan tentara Mongol ke Bagdad menjerumuskan peradaban Islam yang sudah maju ke dalam peradaban yang gelap dan terbelakang. Dampak jangka panjang dari invasi Mongol ke Bagdad menghancurkan jembatan emas kajian keilmuan umat Muslim. Inilah alasan utama kemunduran umat Islam di Abad Pertengahan. Sementara itu, Tentara Salib menemukan jati dirinya dalam kajian ilmiah dan tumbuh serta berkembang menjadi suku penguasa. Komunikasi antara Kristen dengan Islam dalam ilmu Sejarah digambarkan dalam 3 fase:

Fase Awal; Islam memberikan sumbangsih yang signifikan kepada Barat, khususnya dalam ranah kebudayaan. Setelah Nabi Muhammad SAW muncul, Islam berkembang menjadi suatu gaya hidup baru, menyebar dengan cepat melalui para sahabat Nabi dan kekuasaan dinasti Islam berikutnya. Antara abad ke-7 hingga ke-15, dinasti-dinasti ini memberikan pencerahan kepada bangsa Eropa yang saat itu tengah mengalami Abad Kegelapan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah menjadi contoh dinasti yang sangat terbuka terhadap peradaban lain. Penyebaran kebudayaan Islam di Barat dimulai dengan sumbangan manuskrip Arab kepada universitas terkemuka di dunia modern, seperti Universitas Oxford dan Universitas Paris, yang diberikan oleh Raja Frederick.

Fase Kedua; Pada tahap ini, pertukaran budaya antara Barat dan Islam memiliki dampak yang terbatas pada dunia Islam, karena Barat lebih cenderung melakukan interaksi dengan Timur melalui penjajahan dan pencarian hasil alam,

seperti rempah - rempah, kemudian diangkut kembali ke negaranya. Kedatangan Napoleon ke Mesir pada periode ini hanya menghasilkan manfaat melalui laporan harian yang ia tulis, yang menyajikan banyak pengetahuan bagi kalangan terpelajar yang tertarik dalam studi Mesir.

Fase Ketiga; Yaitu periode Modernisasi yang dicirikan oleh gelombang revolusi humanisme yang terjadi di Eropa. Pada tahap ini, komunitas Islam terbagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, kelompok yang cenderung mengadopsi seluruh peradaban Barat tanpa melibatkan proses adaptasi dengan nilai-nilai budaya Islam. Kedua, kelompok umat Islam yang berupaya menyaring dan mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan Barat dengan menjadikannya sebagai elemen utama dalam sintesis peradaban, sehingga membentuk suatu peradaban baru yang mencakup kedua aspek tersebut.

Piagam Nostra Aetate, dokumen dari Dewan Vatikan yang menggambarkan tekad umat Katolik untuk mendorong dialog terbuka antara komunitas agama, menjadi sangat relevan ketika mengkaji hubungan kontemporer antara Islam dan Kristen. Intinya, Nostra Aetate menyatakan dua hal utama. Pertama, perlunya membangun kehidupan berdampingan berdasarkan ketulusan dan pemahaman bersama. Kedua, kewajiban bersama terkait realitas kehidupan antar umat beragama, mencakup aspek keadilan sosial, Etika, ketenangan, dan kemerdekaan. Dokumen ini sepertinya berusaha secara jelas untuk menghapuskan rasa dendam dan permusuhan antar agama, dengan tujuan membentuk

paradigma baru dalam hubungan antar agama. Pendekatannya adalah dengan memberikan prioritas pada dialog antar agama.

Nostra Aetate merupakan puncak dari upaya rekonsiliasi antar agama, dan hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Banyak upaya Gereja untuk menciptakan dialog telah diprakarsai oleh Gereja, dan di antara fakta-fakta yang membenarkan usaha tersebut yaitu: Manuel Palaiologos (1350-1425) banyak, ia menulis tentang Islam, menjelaskan korelasinya dengan budaya Islam dan Kristen di Barat. Pada masa Petrus Venerabilis (1092-1156) memerintahkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin, mendorong dialog antar agama. Ramon Benerabilis (1092-1156) mengadopsi metode beragam untuk memulai dialog dengan umat Islam. Ruhl (1233-1315) dan Nicholas Cusanus (1401-1464) juga berusaha berdialog dengan umat Islam, termasuk komentar Nicholas Cusanus terhadap Al-Quran dalam bahasa Latin untuk mencari kemungkinan hubungan baik antara kedua agama tersebut.

Pada abad ke-20 khususnya merupakan era peningkatan dialog antar agama, Dua penulis terkemuka pada masa itu, Kenneth Cragg (1913) dan Louis Massignon (1883- 1962), mempelajari bahasa Arab, terkesan dengan tertibnya kehidupan umat Islam di kota Kairo, dan terinspirasi oleh para sufi terkenal al-Hallaj (922). Massignon juga terlibat dalam penelitian sastra bersama Charles Foucauld, seorang pertapa dari wilayah Islam di Afrika Utara. Keduanya kemudian membentuk Komunitas berdoa bersama yang dikenal dalam

bahasa Arab sebagai al-Badaliyah, memberikan tempat bagi umat Islam untuk melakukan doa dan puasa. Salah satu tokoh terkemuka dalam komunitas ini adalah Giovanni Battista Montini, yang kemudian menjadi Paus Paulus VI.

Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan laut termasuk Malaka dan Indonesia. Kedatangan Portugis di Malaka memberikan dampak besar terhadap sejarah umat Islam di wilayah tersebut, karena mereka menggunakan kekuatan militer untuk memaksa konversi ke agama Kristen. Tiga tujuan utama kedatangan Portugis di Malaka dapat diidentifikasi sebagai Kejayaan, Emas, dan Injil.

Pengalaman yang sama juga dialami oleh masyarakat Ternate di Indonesia, di mana upaya untuk menguasai Ternate dihadapi dengan perlawanan yang kuat dari komunitas Muslim setempat di Kesultanan Ternate. Sultan Hairun (1550-1570) menjadi Sultan pertama yang secara aktif melawan penjajahan Portugis, dan perlawanan ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan Sultan Baabullah (1570-1583).

Setelah diusir dari Ternate, Portugis beralih ke Ambon. Namun, di Ambon, tidak diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, dan akhirnya diusir dari wilayah tersebut. Sebelum diusir, Portugis berhasil menyebarkan agama Kristen di Ambon melalui pembentukan persekutuan umat Katolik di daerah tersebut (Kees De Jong, 2012). Penyebaran Kristen di kawasan timur nusantara yang dilakukan Portugis sangat kontraproduktif terhadap semangat dialog antar agama yang dipupuk para pendahulu

mereka yang beragama Katolik, yang berupaya menciptakan suasana nyaman di kalangan umat beragama. Portugis memiliki motif menjajah dan merebut serta menguasai sumber daya alam (hasil Bumi), serta upaya penyebaran agama menjadi alasan utama kedatangan mereka.

Sikap netral Belanda dalam urusan agama berkontras dengan pandangannya terhadap umat Islam, di mana mereka menganggap orang-orang Muslim tidak dapat dipercaya. Pandangan ini menjadi motivasi bagi salah satu pemimpin Belanda, JP. Coen, untuk mengeluarkan memorandum pada tanggal 1 Januari 1614. Dalam memorandum tersebut, ia menyatakan bahwa orang-orang Muslim dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan. Standarisasi ganda juga diterapkan dalam sektor pekerjaan, dengan memberikan prioritas kepada Pekerja dari VOC yang menganut agama Kristen Protestan lebih banyak daripada pekerja Belanda di Maluku.

Pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan, dan seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kondisi ini berlangsung terus hingga tahun 1811. Kebijakan pemerintah Inggris menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kebijakan Belanda, terutama terkait dengan memberikan izin kepada kelompok Baptis Missionary Society dan London Missionary Society untuk menyebarkan agama di Jawa. Meskipun kedua kelompok misionaris tersebut diberikan izin, upaya mereka dalam penyebaran agama tidak memberikan dampak yang signifikan.

Pada tahun 1853, hak-hak umat Katolik dalam sistem hukum Belanda dipulihkan, membawa perubahan mendasar di Belanda. Agama Katolik mampu menyebar kembali ke negara-negara kolonial. Para misionaris dan Zending akhirnya memperebutkan kekuasaan dengan menyebarkan agama mereka dan menimbulkan kekacauan baru di wilayah jajahan. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mengambil posisi membatasi kedua belah pihak dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah dalam penyebaran misinya. Keberadaan kedua misi secara bersamaan dibatasi untuk menghindari konflik. Demikian pula, misionaris dan misionaris tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim.

Warga Negara di wilayah tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: Orang Eropa, Orang Tionghoa dan Arab, dan Pribumi. Orang Eropa tunduk pada hukum Belanda, sementara Orang Tionghoa dan Arab diharuskan meminta izin perjalanan dan juga tunduk pada hukum Belanda saat melakukan perjalanan ke luar kota. Pribumi mengikuti aturan agama mereka sendiri. Pembagian ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam kebijakan hukum Belanda, seperti yang terjadi pada kasus seorang pegawai Belanda yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga pribumi Jawa. Meskipun hukum Belanda mengakui prinsip persamaan hak di hadapan hukum, proses peradilan yang terjadi tidak adil. Kejadian ini mencerminkan kemungkinan bagi pegawai Belanda untuk terbebas dari konsekuensi hukum pidana,

menggambarkan ketidaksetaraan dalam implementasi hukum.

Antara tahun 1900 dan 1942, arah kebijakan politik di Hindia Belanda berubah ke arah politik “etis”. Arah kebijakan politik ini mulai terfokus pada nasib masyarakat adat. Tokoh yang berpengaruh dalam kebijakan ini adalah Snook Hurgronje, yang memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda mengenai masalah agama dan hubungannya dengan masyarakat adat yang mayoritas beragama Islam. Arah politik ini tidak terduga karena memunculkan banyak gerakan akademis untuk mengorganisir masyarakat adat. Organisasi yang terstruktur di dalam masyarakat yang tertutup berhasil diusir dari Indonesia melalui upaya gerakan terpelajar dan perjuangan lainnya, setelah penerapan sekat hukum yang ketat oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bahwa akhirnya kekuasaan Belanda dapat diusir, membuka jalan bagi pemerintahan Jepang untuk datang ke Indonesia.

C. Hubungan Islam dan Kristen di Masa Imperialisme

Pada abad ini memungkinkan untuk memunculkan kembali kesepahaman sebagaimana yang telah tercipta pada masa awal munculnya Agama Islam. Karena setiap umat beragama telah memiliki kesadaran dalam menerima perbedaan. Hal tersebut dapat terwujud melalui relasi antara Agama Islam dan Agama Kristen dengan tetap menghargai klaim ortodoksi dan autentitas tradisi masing-masing dan

melahirkan cakrawala pemikiran yang terbuka untuk dapat hidup saling berdampingan dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam suatu komunitas. Suatu agama baik yang dikelompokkan sebagai agama wahyu (Samawi) atau tidak (Ardhi) berdasarkan tipologisasi tidak lepas dari pengaruh sosial, situasi dan asal usulnya yang kompleks.

Pandangan tersebut dapat melahirkan visi universal dan ekumenisme spiritual untuk membangun kebersamaan dalam keragaman dan saling menghargai antara satu sama lain. Jadi tidak lagi berkiblat pada warisan konflik di masa lalu yang menyebabkan perpecahan di antara kedua agama samawi tersebut.

Pemikiran tentang pluraisitas makhluk dapat menjadi landasan dalam membangun kembali hubungan harmonis di antara Agama Islam dan Kristen. Pandangan tersebut meniscayakan adanya pengakuan terhadap keragaman untuk mewujudkan keseragaman. Eropa mengalami kemajuan yang disebut Renaisans disebabkan adanya penentengan terhadap kekuasaan gereja dan doktrin gereja dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang termasuk menyerap ilmu pengetahuan yang berkembang di Yunani dan Islam.

Renaisans menyebabkan Eropa maju dan minat pada penjelajahan samudra dimulai oleh Spanyol dan Portugis dan diikuti oleh Belanda dan Perancis. Eropa menemukan daratan-daratan yang telah ditempati oleh penduduk dan umumnya beragama Islam. Maka terjadilah penjajahan.

Penjajah Eropa terhadap Islam memiliki dua model yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno yaitu semangat Eropa untuk mencari kekayaan atau sumber daya alam, semangat penyebaran agama Kristen dan semangat permusuhan terhadap orang Islam. Imperialisme modern yaitu dimulai ketika telah terjadi persaingan sesama bangsa Eropa dan perebutan pengaruh di daerah-daerah jajahan dan memasarkan hasil industri. Ketika Eropa mengalami puncak imperialisme, bersamaan kerajaan Islam mengalami kemunduran yaitu Turki Usman dan wilayah-wilayah tertentu yang dulunya di kuasai di bagi-bagi oleh Negara imperialisme walaupun ada yang tetap merdeka Negara-negara imperialisme berusaha menanamkan pengaruhnya sampai sekarang.

BAB X

Bashar al-Assad

Zulayka Muchtar



Bashar al-Assad merupakan salah satu tokoh politik paling kontroversial di dunia Islam kontemporer. Ia menjabat sebagai Presiden Suriah sejak tahun 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang sebelumnya memimpin negara tersebut dengan tangan besi sejak 1971. Keluarga Assad berasal dari kelompok minoritas Alawi, sebuah cabang Syiah yang hanya mencakup sebagian kecil populasi Suriah, namun memiliki pengaruh besar dalam struktur militer dan pemerintahan. Kekuasaan yang terpusat pada satu keluarga dan satu kelompok sektarian ini telah menjadi sumber ketegangan yang mendalam dalam sejarah sosial-politik Suriah, terutama karena mayoritas penduduk Suriah adalah Muslim Sunni.

Pada awal masa kepemimpinannya, Bashar al-Assad dianggap sebagai tokoh muda yang membawa harapan perubahan. Latar belakang pendidikannya sebagai dokter mata yang pernah belajar di London menumbuhkan persepsi

bahwa ia akan lebih moderat dan reformis dibandingkan ayahnya. Namun harapan itu memudar seiring waktu, terutama ketika Bashar menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan pola pemerintahan represif yang dijalankan ayahnya. Pemerintahannya ditandai oleh pembungkaman oposisi, kontrol ketat atas media, serta dominasi militer dalam kehidupan sipil. Puncak ketegangan dalam pemerintahan Bashar terjadi pada tahun 2011, ketika gelombang protes yang terinspirasi oleh Arab Spring melanda Suriah. Awalnya, demonstrasi rakyat menuntut reformasi politik, kebebasan sipil, dan pengakhiran korupsi. Namun respons brutal dari aparat keamanan terhadap para demonstran memicu pecahnya konflik bersenjata, yang dengan cepat berkembang menjadi perang saudara. Situasi ini membuka ruang bagi munculnya berbagai kelompok bersenjata, baik dari dalam negeri maupun dari luar, termasuk kelompok jihad transnasional seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra.

Perang saudara Suriah menjadi salah satu konflik paling kompleks dalam sejarah dunia Islam modern. Perpecahan sektarian antara Sunni dan Syiah menjadi semakin tajam, terutama karena dukungan terbuka yang diberikan oleh Iran dan kelompok Hizbullah terhadap rezim Bashar al-Assad. Di sisi lain, negara-negara Teluk yang mayoritas Sunni mendukung kelompok oposisi, meskipun dukungan ini juga beragam dan sering kali tidak terkoordinasi. Campur tangan kekuatan besar seperti Rusia dan Amerika Serikat juga memperumit konflik ini, menjadikannya bukan hanya perang sipil, tetapi juga

panggung perebutan pengaruh global. Bashar al-Assad dalam hal ini menjadi simbol kekuasaan yang tetap bertahan di tengah tekanan internasional dan pemberontakan rakyat. Ia berhasil mempertahankan kekuasaannya berkat dukungan militer dari Rusia dan Iran, serta keberhasilan strategis dalam merebut kembali wilayah-wilayah utama dari tangan pemberontak. Namun, keberlangsungan kekuasaannya dibayar mahal oleh rakyat Suriah. Jutaan orang mengungsi ke luar negeri, ratusan ribu jiwa tewas, dan banyak kota hancur total. Dalam konteks sejarah dunia Islam, tragedi Suriah mencerminkan betapa rapuhnya tatanan negara-negara Muslim ketika tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang adil, inklusif, dan menghormati keberagaman masyarakat.

Kepemimpinan Bashar al-Assad juga memberikan pelajaran penting dalam kajian sejarah politik Islam kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa dipertahankan melalui kekuatan militer dan dukungan eksternal, bukan melalui legitimasi rakyat. Konflik Suriah juga menggambarkan kegagalan kolektif dunia Islam dalam menyelesaikan krisis internal, serta kecenderungan negara-negara Muslim untuk terjebak dalam persaingan sektarian dan aliansi strategis dengan kekuatan besar dunia.

Dengan demikian, memahami figur Bashar al-Assad tidak hanya penting untuk membaca dinamika Suriah, tetapi juga sebagai cerminan persoalan struktural yang masih dihadapi oleh banyak negara Muslim hari ini: relasi antara negara dan agama, konflik identitas, otoritarianisme, serta tantangan

dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial. Dalam kerangka sejarah dunia Islam, Bashar al-Assad menempati posisi penting sebagai tokoh yang mempengaruhi jalannya sejarah kawasan Timur Tengah, sekaligus menjadi simbol dari kompleksitas dan krisis yang masih membayangi dunia Islam hingga kini.

A. Kehidupan Bashar Al-Assad

Bashar Hafez al-Assad lahir pada 11 September 1965 di ibu kota Suriah, Damaskus. Ia merupakan anak kedua dari Hafez al-Assad dan Anisa Makhlof, pasangan dari keluarga Alawi, sebuah cabang minoritas dari Islam Syiah. Keluarga Assad dikenal memiliki posisi sosial yang cukup berpengaruh dalam komunitas Alawi, yang selama bertahun-tahun menjadi kelompok termarginalkan di Suriah hingga kemudian mendapat tempat di puncak kekuasaan melalui militer dan Partai Ba'ath. Masa kecil Bashar terbilang tenang, jauh dari sorotan politik, berbeda dari kakaknya, Basil al-Assad, yang dipersiapkan sebagai pewaris politik ayahnya. (van Dam, 2011)

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di Damaskus, Bashar mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Damaskus dan lulus sebagai dokter spesialis mata pada tahun 1988. Ia kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi oftalmologi di Western Eye Hospital, London. Selama masa studinya di Inggris, Bashar dikenal sebagai pribadi tertutup dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dibandingkan politik. Kehidupannya berubah drastis ketika

kakaknya Basil meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994, yang membuatnya dipanggil pulang ke Suriah dan mulai diarahkan untuk menjadi pewaris kekuasaan Hafez al-Assad. (Lesch, 2005)

Setelah kembali ke Suriah, Bashar menjalani pelatihan militer dan diberi pangkat dalam pasukan elite. Ia pun dimasukkan dalam struktur kekuasaan partai dan militer, serta mulai tampil dalam publik sebagai sosok calon pemimpin. Pada tahun 2000, ketika Hafez al-Assad meninggal dunia, parlemen Suriah segera merevisi konstitusi untuk menurunkan batas usia minimum presiden dari 40 menjadi 34 tahun agar Bashar dapat diangkat sebagai presiden. Tak lama kemudian, ia terpilih melalui referendum nasional yang hasilnya 97% mendukungnya menjadi presiden. (Seale, 1989)

B. Latar Belakang Politik

Sistem politik Suriah sebelum dan sesudah Bashar al-Assad dikenal sebagai rezim otoriter yang berakar pada ideologi Ba'athisme. Partai Ba'ath, yang didirikan dengan semangat pan-Arabisme, sekularisme, dan sosialisme, menjadi kendaraan utama bagi keluarga Assad untuk memonopoli kekuasaan. Bashar mewarisi sistem ini dari ayahnya yang selama tiga dekade memimpin Suriah dengan tangan besi. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Bashar mencoba mencitrakan diri sebagai reformis muda dengan visi modernisasi dan keterbukaan. Pada awal masa jabatannya, ia mencanangkan apa yang dikenal sebagai “Musim Semi

Damaskus”, yaitu ruang terbatas bagi kebebasan berekspresi dan pembentukan forum-forum intelektual. (Hinnebusch, 2001)

Namun euforia reformasi ini tak berlangsung lama. Ketika forum-forum tersebut mulai menuntut reformasi politik yang lebih substansial, Bashar menanggapi dengan penangkapan aktivis dan penutupan ruang publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia tampil dengan gaya kepemimpinan baru, pada dasarnya Bashar tetap mempertahankan struktur represif yang dibangun ayahnya. Ia juga melanjutkan praktik patronase dengan memberi posisi strategis kepada kerabat dekat dan komunitas Alawi untuk mempertahankan loyalitas politik dan militer (Balanche, 2018).

Bashar juga memanfaatkan jaringan intelijen dan militer untuk mengendalikan opini publik serta mengawasi aktivitas masyarakat. Struktur kekuasaan didasarkan pada sistem loyalitas keluarga, sektarian, dan militer yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin otoriter. Dalam tataran regional, ia menjaga hubungan erat dengan Iran dan Hizbullah Lebanon yang menjadi sekutu strategis dalam mempertahankan rezimnya, terutama dalam konteks perlawanan terhadap Israel dan hegemoni Barat di Timur Tengah. (Wehrey, 2017).

C. Kepemimpinan Bashar Al-Assad

Ideologi politik Bashar al-Assad tidak dapat dilepaskan dari warisan ideologis Partai Ba’ath, sebuah partai yang mengusung pan-Arabisme, sosialisme Arab, dan sekularisme

sebagai fondasi utamanya. Sebagai kelanjutan dari ayahnya, Bashar mempertahankan ideologi ini sebagai kerangka dasar dalam pemerintahan. Pan-Arabisme, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Arab, tetapi juga menjadi alat untuk menolak intervensi asing, khususnya dari Barat dan Israel. Ideologi ini menekankan pentingnya persatuan nasional melampaui sekat-sekat sektarian dan etnis, meskipun dalam praktiknya, pemerintahan Assad justru bergantung pada jaringan sektarian Alawi untuk mempertahankan kekuasaan.

Di sisi lain, sekularisme menjadi pilar utama dalam struktur pemerintahan Bashar al-Assad. Pemerintahannya secara eksplisit menolak campur tangan agama dalam politik negara. Meski demikian, bentuk sekularisme yang dijalankan Assad bersifat represif terhadap kelompok Islam politik, terutama Ikhwanul Muslimin, yang dipandang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas rezim. Ketegasan Bashar dalam menindas kelompok Islamis menunjukkan bahwa sekularisme yang diusungnya lebih bersifat politis daripada filosofis, yakni digunakan sebagai instrumen untuk mengamankan kekuasaan daripada sebagai komitmen pada pemisahan agama dan negara yang netral.

Bashar juga menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan nasionalisme otoriter. Dalam berbagai pidatonya, ia mengampanyekan pentingnya kedaulatan nasional, anti-imperialisme, dan penolakan terhadap intervensi asing. Retorika ini sering digunakan untuk

membenarkan tindakan keras terhadap oposisi dan demonisasi kelompok-kelompok pemberontak yang dituding sebagai alat kepentingan asing. Dengan demikian, ideologi politik Assad bersifat defensif dan konservatif: mempertahankan status quo dengan landasan sekularisme dan nasionalisme Arab sebagai tameng legitimasi (Heydemann, 2007).

Dalam praktik politiknya, Bashar al-Assad mengadopsi berbagai strategi yang mencerminkan kelangsungan rezim otoriter klasik, namun dengan pembaruan dalam bentuk dan pendekatan. Strategi pertama yang digunakan adalah membangun patronage sistem, yakni sistem patron-klien yang melibatkan pemberian jabatan, fasilitas ekonomi, dan keamanan kepada elite-elite militer, keluarga, dan komunitas Alawi. Melalui pendekatan ini, Bashar menciptakan loyalitas dari struktur kekuasaan yang solid dan sulit digoyahkan, terutama dari kalangan militer dan intelijen.

Strategi kedua adalah memonopoli narasi kebenaran melalui kontrol ketat atas media dan pendidikan. Pemerintahan Assad mengontrol hampir seluruh saluran informasi, termasuk televisi, surat kabar, dan media sosial. Melalui propaganda, rezim menggambarkan dirinya sebagai pelindung stabilitas dan sekularisme, sementara oposisi digambarkan sebagai ekstremis, teroris, atau agen asing. Strategi ini sangat efektif dalam membentuk opini publik domestik dan membenarkan kekerasan terhadap demonstran maupun pemberontak.

Strategi ketiga yang sangat menonjol adalah penggunaan kekerasan sistematis terhadap lawan politik. Sejak awal meletusnya protes pada tahun 2011, rezim Assad merespons dengan kekuatan militer brutal yang melibatkan penembakan terhadap demonstran, penyiksaan massal di penjara, serta pemboman kawasan sipil. Strategi ini bertujuan menciptakan ketakutan dan menghambat mobilisasi sosial. Dalam perkembangannya, Assad juga menggandeng milisi asing seperti Hizbullah dan Pasukan Quds Iran untuk mempertahankan kekuasaan, menunjukkan strategi survival yang sangat bergantung pada aliansi internasional.

Strategi keempat yang digunakan Assad adalah manipulasi sektarianisme. Meskipun secara ideologis menjunjung sekularisme, Assad secara pragmatis menggunakan identitas sektarian (khususnya Alawi-Syiah) untuk mengkonsolidasikan dukungan dan memecah belah oposisi. Ia menggambarkan dirinya sebagai pelindung minoritas (Alawi, Kristen, Druze) dari ancaman Islam radikal Sunni. Politik identitas ini efektif untuk mendapatkan simpati dari kelompok minoritas dan mendelegitimasi oposisi sebagai fundamentalis yang mengancam harmoni sosial.

D. Konflik Suriah dan Dampak Terhadap Dunia Islam

Akar konflik Suriah dapat ditelusuri dari sejarah panjang otoritarianisme politik di bawah kekuasaan keluarga Assad yang telah berkuasa sejak 1970-an. Hafez al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad, membentuk negara dengan sistem

sentralistik, represif, dan sangat militeristik melalui Partai Ba'ath yang berideologi pan-Arabisme dan sosialisme sekuler. Kepemimpinan ini diwariskan kepada Bashar al-Assad pada tahun 2000 tanpa proses demokratis yang sah, memperkuat praktik nepotisme dan penindasan terhadap oposisi politik, khususnya dari kalangan Sunni yang merupakan mayoritas populasi. Represi sistematis, ketidakadilan distribusi ekonomi, serta penindasan terhadap aspirasi kebebasan sipil dan politik menjadi bahan bakar ketidakpuasan rakyat Suriah yang akhirnya meledak pada tahun 2011 bersamaan dengan gelombang Arab Spring (Glass, 2016).

Di samping faktor internal, akar konflik Suriah juga berakar pada dinamika sektarianisme yang telah lama membentuk struktur sosial dan politik negara tersebut. Bashar al-Assad berasal dari komunitas Alawi sebuah sekte kecil dalam Islam Syiah yang secara historis mengalami marginalisasi, namun sejak era Hafez al-Assad memperoleh posisi strategis di militer dan birokrasi. Penguasaan oleh minoritas ini menimbulkan ketegangan dengan mayoritas Sunni, terutama ketika Alawi dijadikan fondasi loyalitas utama rezim Assad. Ketimpangan ini menimbulkan perasaan eksklusif dan diskriminasi di kalangan Sunni yang kemudian menjadi basis utama pemberontakan terhadap rezim. Maka, konflik Suriah tidak hanya merupakan perang sipil biasa, tetapi juga mencerminkan ketegangan sektarian yang telah lama dipendam dalam tubuh masyarakat Suriah.

Faktor ekonomi turut memperparah ketegangan politik dan sosial. Sebelum konflik pecah, Suriah mengalami krisis ekonomi akibat kekeringan berkepanjangan dari 2006 hingga 2010, yang menyebabkan migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota. Hal ini menambah beban ekonomi di wilayah urban dan menciptakan ketegangan antara kelompok migran miskin dengan elite kota yang lebih mapan. Ketidakmampuan pemerintah Assad dalam merespon krisis ini, ditambah dengan ketergantungan ekonomi pada sektor publik yang korup dan tidak efisien, memperburuk kesenjangan sosial dan mempercepat mobilisasi politik rakyat menuju revolusi (Lellis, 2013).

Konflik Suriah membawa dampak serius terhadap dunia Islam dalam bentuk meningkatnya ketegangan sektarian yang memecah belah solidaritas umat Muslim. Negara-negara Muslim terpecah dalam mendukung pihak-pihak yang bertikai: Iran, Irak, dan milisi Syiah seperti Hizbullah mendukung rezim Assad, sementara Arab Saudi, Turki, dan Qatar mendukung kelompok oposisi bersenjata Sunni. Persaingan ini memperjelas fragmentasi dunia Islam yang selama ini tersembunyi di bawah retorika persatuan umat, menjadikan Suriah sebagai ladang proksi pertempuran antara kepentingan regional dan mazhab Islam. Akibatnya, konflik Suriah tidak lagi dianggap sebagai urusan domestik semata, melainkan sebagai simbol konflik intra-Islam yang memperparah segregasi mazhab dan menyuburkan narasi permusuhan antar umat Islam sendiri. (Abdo, 2017)

Salah satu dampak utama dari konflik Suriah terhadap dunia Islam adalah meningkatnya ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah, yang tidak hanya terjadi di tingkat domestik Suriah, tetapi juga meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Rezim Assad yang berakar pada kelompok minoritas Alawiyah, cabang dari Syiah, mendapatkan dukungan dari Iran dan milisi Syiah seperti Hizbullah Lebanon, sementara sebagian besar oposisi berasal dari kelompok Sunni yang juga mendapatkan dukungan dari negara-negara Sunni seperti Arab Saudi, Turki, dan Qatar. Ketegangan ini bukan hanya memperdalam jurang perpecahan intra-Islam, tetapi juga menimbulkan konflik identitas yang menajam dalam komunitas Muslim di berbagai negara, menciptakan atmosfer saling curiga dan membenarkan kekerasan atas nama mazhab. Polarisasi ini turut memperkuat narasi-narasi ekstremis yang memanfaatkan konflik sebagai pembenaran untuk jihad sektarian. (Hegghammer, 2010)

Konflik Suriah juga menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di abad ke-21 yang berdampak luas terhadap umat Islam secara global, terutama dalam hal pengungsi dan solidaritas keagamaan. Lebih dari 13 juta warga Suriah terpaksa mengungsi, baik sebagai pengungsi internal maupun ke luar negeri, termasuk ke negara-negara Muslim seperti Turki, Yordania, dan Lebanon. Negara-negara Muslim menghadapi tantangan besar dalam menampung dan melindungi pengungsi Suriah, sekaligus menjadi ladang ujian bagi implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks solidaritas,

ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab kemanusiaan. Di sisi lain, konflik ini juga menunjukkan keterbatasan lembaga-lembaga Islam internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dalam merespons krisis kemanusiaan secara efektif dan terkoordinasi.

Dampak lain yang signifikan dari konflik Suriah terhadap dunia Islam adalah menguatnya radikalisasi dan perekrutan pejuang asing oleh kelompok ekstremis seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra. Suriah menjadi ladang jihad global yang menarik ribuan militan dari berbagai negara Muslim, yang kemudian membawa kembali ideologi kekerasan ke negara asal mereka, menciptakan ancaman baru bagi stabilitas dunia Islam. Dalam konteks ini, Suriah bukan hanya menjadi tempat perang saudara, tetapi juga simbol konflik global yang merusak citra Islam di mata dunia internasional, akibat kekejaman yang dilakukan oleh kelompok ekstremis atas nama agama. Kondisi ini memperparah Islam fobia di Barat dan menimbulkan tantangan berat bagi komunitas Muslim moderat dalam membangun narasi alternatif yang damai dan inklusif (Fadl, 2005).

Selain dampak sektarian dan radikalisasi, konflik Suriah turut memengaruhi dinamika geopolitik dunia Islam, mempertegas rivalitas antara blok negara-negara Islam konservatif (seperti Arab Saudi) dan negara-negara Islam revolusioner (seperti Iran). Konflik ini tidak hanya menciptakan perang proksi antara kekuatan regional, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan negara-negara Muslim

untuk membangun konsensus dalam menyikapi tragedi besar di antara sesama umat Islam. Sebaliknya, kekuatan non-Muslim seperti Rusia dan Amerika Serikat justru memainkan peran dominan dalam mengarahkan jalannya konflik dan penyelesaian politik, yang semakin menegaskan ketergantungan dunia Islam pada kekuatan luar. Akibatnya, posisi umat Islam dalam menghadapi krisis Suriah justru melemah secara kolektif, baik secara politik, ekonomi, maupun moral (Philips, 2016).

BAB XI

Fatah

Rudianto



Fatah adalah salah satu partai politik paling berpengaruh di Palestina, yang didirikan pada tahun 1959 di Kuwait oleh sekelompok pengungsi Palestina yang menganut ideologi nasionalisme sekuler. (Rahman, 2020) Fatah merupakan organisasi politik yang didirikan dengan misi pembebasan Palestina dari zionis Israel, Meskipun sebelumnya telah muncul gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dimasa itu, Fatah Pada awalnya, berjuang menggunakan jalur politik maupun kontak senjata. Namun, setelah Perjanjian Oslo 1993, Fatah menghentikan perjuangan bersenjataanya terhadap Israel. Berbeda dengan Hamas yang tetap melanjutkan perjuangannya dalam membebaskan tanah

Palestina. Organisasi politik ini merupakan hasil bentukan dari Liga Arab.

Pemimpin Fatah pada waktu itu adalah Yasser Arafat (Muhammed Abdel Raouf Arafat bin Qudwa al-Hussaein), sekaligus merangkap jabatan menjabat sebagai pemimpin PLO. Cikal bakal lahirnya organisasi besar di Palestina seperti PLO, Hamas dan Fatah tentunya dilatarbelakangi dari adanya konflik kependudukan dan perebutan kekuasaan wilayah. Masalah ini bermula dari gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Herzl, yang merupakan ketua komunitas Yahudi di Inggris, mengusung Zionisme sebagai suatu paham dan gerakan politik yang bersifat rasional dan ekstrem, dengan tujuan mendirikan negara khusus untuk bangsa Yahudi. (Mamad, 2021)

Konflik Israel-Palestina bermula dari keinginan bangsa Arab dan Yahudi untuk saling menguasai wilayah satu sama lain. Masing-masing pihak ingin wilayah tersebut menjadi milik Israel atau Palestina. Salah satu perang yang terjadi pada tahun 1967 memiliki dampak yang masih dirasakan hingga kini. Meskipun Palestina sempat memperluas wilayahnya, saat ini wilayah Palestina semakin menyusut dan sebagian besar wilayahnya menjadi bagian dari Israel. Oleh karena itu, Fatah kemudian mengatur strategi dan memilih jalur diplomasi sebagai alternatif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, meskipun pada awalnya, strategi perjuangan Fatah mengandalkan perlawanan bersenjata.

A. Ideologi Fatah dalam Pembebasan Tanah Palestina

Konflik antara Palestina dan Israel, yang telah berlangsung lama dalam sejarah dan melibatkan banyak negara Arab serta negara-negara Barat, tetap menjadi isu internasional yang menarik perhatian global hingga saat ini. (Wati, 2024) oleh karena itu, Presiden Yasser Arafat, yang merumuskan arah gerakan Fatah untuk Palestina, berperan penting dalam membentuk identitas Palestina yang merdeka. Ide dasar pendirian gerakan ini berawal dari pengalaman Front Perlawanan Rakyat dan keterkaitan dengan Batalyon Fedayeen, yang mempertemukan Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Nasseris. Inti dari gerakan ini mulai muncul setelah serangan Israel ke Jalur Gaza dan agresi tripartit terhadap Mesir pada tahun 1956. Para pemimpin seperti Khalil Al-Wazir, Salah Khalaf, dan Yasser Arafat mengumumkan secara resmi peluncuran gerakan Fatah pada 1 Januari 1965, yang diikuti dengan pengeboman terowongan Eilabun di wilayah Palestina, sebuah operasi militer yang menandai langkah penting dalam perjuangan ini.

Pada 10 Oktober 1959, sekelompok kecil warga Palestina yang terdiri dari kurang dari 20 orang berkumpul di Kuwait dan secara diam-diam membentuk Fatah, gerakan perlawanan yang kemudian memimpin konflik Palestina dengan Israel. Fatah adalah singkatan dari Harakat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini, yang berarti Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Nama Fatah mengandung makna ganda dalam bahasa Arab, di mana HTF berarti kematian, sementara FTH berarti

kemenangan. Di antara para pendirinya adalah Yasser Arafat, seorang insinyur berusia 28 tahun, Khalil Wazir (Abu Jihad), seorang guru berusia 22 tahun, dan Salah Khalaf (Abu Iyad), berusia 25 tahun. Abu Jihad dibunuh oleh agen Israel pada 1988, sementara Abu Iyad tewas pada 1991, kemungkinan oleh musuh PLO. Baru pada 1993, setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, Fatah sebagai faksi utama dalam PLO mendapatkan pengakuan Israel terhadap Palestina sebagai negara yang terpisah.

Hal demikian menjadi pemantik lahirnya gerakan seperti Kaffa, yang kemudian diikuti dengan pendirian gerakan Fatah oleh Arafat pada tahun 1959 sebagai upaya untuk membebaskan Palestina. Namun, setelah aneksasi Israel terhadap Yerusalem Timur pada tahun 1967, Arafat mulai menggabungkan pemikiran Islam ke dalam ideologi nasionalisnya, dengan menghubungkan Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan perjuangan umat Muslim. Melalui langkah ini, Arafat berusaha menginternasionalisasi perjuangan Palestina, menjadikannya sebagai bagian dari perjuangan global umat Muslim. Fatah menjadi kekuatan utama dalam politik Palestina setelah Perang Enam Hari pada 1967. Pada tahun yang sama, Fatah bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mendapatkan 33 dari 105 kursi di Komite Eksekutif PLO. Yasser Arafat, yang berasal dari Fatah, menjadi Ketua PLO pada 1969, setelah menerima jabatan tersebut dari Yahya Hammuda. Menurut BBC, Arafat mulai memimpin Komite Eksekutif PLO pada 1969, tahun yang

sama ketika Fatah tercatat melancarkan 2.432 serangan gerilya terhadap Israel.

Sepanjang tahun 1968, Fatah dan kelompok bersenjata Palestina lainnya menjadi target operasi besar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di desa Karamah, Yordania, tempat markas besar Fatah – serta kamp pengungsi Palestina berukuran sedang – berada. Nama kota itu berasal dari kata Arab untuk "martabat", yang mengangkat simbolismenya bagi orang-orang Arab, terutama setelah kekalahan Arab pada tahun 1967. Operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan terhadap Israel, termasuk serangan roket dari Fatah dan milisi Palestina lainnya ke Tepi Barat yang diduduki. Informasi tentang operasi itu tersedia jauh sebelumnya, dan pemerintah Yordania (serta sejumlah komando Fatah) memberi tahu Arafat tentang persiapan militer Israel dalam skala besar. Setelah mendengar berita itu, banyak kelompok gerilya di daerah itu, termasuk kelompok yang baru dibentuk George Habash, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan organisasi sempalan Nayef Hawatmeh, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), menarik pasukan mereka dari kota itu. Para pemimpin Fatah dinasihati oleh komandan divisi Yordania yang pro-Fatah untuk menarik pasukan dan markas mereka ke bukit-bukit terdekat, namun atas perintah Arafat, Fatah tetap bertahan, dan Angkatan Darat Yordania setuju untuk mendukung mereka jika pertempuran sengit terjadi.

B. Gerakan Perjuangan Fatah

Gerakan perjuangan dalam ideologi fatah dilihat dalam geopolitik fatah di tengah-tengah terobosan diplomasi internasional, jika di analisa melalui pemikiran Asyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul "Gerakan Pembebasan Islam" bahwa ditengah-tengah inisiatif dan terobosan diploma internasional itu, tidak terlihat cukup memadai. (Azra, 2020) Oleh sebab itu, penulis menyandingkan dengan pendapat Morgenthau yang mengemukakan bahwa Memahami kepentingan nasional dapat menjadi alat yang berguna untuk melakukan perbandingan. Salah satu hal menarik yang dibahas adalah pengakuannya bahwa kepentingan nasional dapat berasal dari dua sumber utama yakni badan religius atau keagamaan serta organisasi internasional. Persaingan antara keduanya jelas mempengaruhi kebijakan dan kepentingan nasional. Beberapa perbedaan antara keduanya terletak pada faktor politik, ekonomi, jangkauan, dan nilai-nilai vital. Oleh karena itu, jika salah satu dari dimensi tersebut terganggu, tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu akan mengubah bagaimana kepentingan nasional terbentuk. Morgenthau juga berpendapat bahwa kepentingan nasional terdiri dari dua elemen, yakni apa yang dianggap penting dan apa yang dianggap bernilai, yang akan menentukan kepentingan nasional itu sendiri.

Argumentasi diuraikan oleh Morgenthau dengan diplomasi Ideologi nasionalisme Fatah dalam upayanya membebaskan bangsa Palestina tidak terlepas daripada

hegemoni Amerika Serikat. Dominasi Amerika Serikat turut memengaruhi perjuangan Palestina dalam mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Melalui diplomasi dan hegemoni AS, Fatah sendiri, meskipun berhaluan Marxis dan terinspirasi dari perjuangan revolusi Aljazair. Organisasi ini, awalnya dikenal sebagai Harakah Tahrir Filistin dan kemudian berubah menjadi Harakah at-Tahrir al-Wathani al-Filisthini. (Muchsin, 2015) Seiring dengan berjalannya waktu, Saat ini, perjuangan tersebut terpecah menjadi dua faksi utama yakni Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan Fatah, yang mendominasi Palestinian Liberation Organization (PLO) di Tepi Barat. Fatah atau PLO cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh dan intervensi AS, sementara Hamas bersikap anti-AS serta menentang sekutu-sekutunya. Akibatnya, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kedua kubu ini. (Fuhaidah, 2012) ideologi politik fatah yang memasukkan pemikiran Islam ke dalam ideologi nasionalisme sekuler yang menuai banyak kritikan. Selain itu, ideologi fatah berkiblat pada paham marxisme dan juga tendensi Amerika Serikat.

Selain daripada itu, lahir suatu gerakan di Damaskus pada tahun 1967 yang dikomandoi oleh tokoh yang bernama George Habbas yang juga merupakan penganut paham *marix-Leninist*, gerakan ini disebut *Populer Front For The Liberation Of Palestina* (PFPL) dengan dasar ditegakkannya ialah untuk menegakkan kewibawaan dunia arab di daerah Palestina dan pendukung-pendukungnya di wilayah Palestina. Selanjutnya,

gerakan PFPL ini dapat menggunakan metode-metode menantang kehadiran Israel dan pendukung-pendukungnya.

Dengan demikian, sehingga Fatah ditasdiw mendapatkan tendensi AS yang juga merupakan salah satu cikal bakal perseteruan pandangan dunia Palestina sehingga Fatah dan Hamas. Selain itu, Para pendukung Hamas umumnya berasal dari kalangan konservatif dalam masyarakat Palestina yang menilai bahwa nasionalisme sekuler yang diperjuangkan oleh Fatah tidak sejalan dengan ajaran Islam, serta melihat PLO (*Palestin Liberation Organisation*) sebagai organisasi yang rentan terhadap korupsi, materialisme, dan berbagai bentuk penyimpangan. Namun, tahun 2017 menjadi momen bersejarah dalam perjalanan panjang konflik antara Fatah dan Hamas. Setelah hampir 11 tahun berseteru, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan melakukan rekonsiliasi. Keputusan ini disambut positif oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, sebagaimana disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun. Ia menyatakan bahwa "Presiden sangat menginginkan agar masalah ini segera terselesaikan dan kita dapat kembali bersatu dari segala aspek.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Fatah, sebagai salah satu partai politik paling berpengaruh di Palestina, memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Palestina sejak didirikan pada 1959. Dengan ideologi nasionalisme sekuler, Fatah bertujuan membebaskan Palestina dari penjajahan Israel dan menjadi bagian penting

dari pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Meskipun awalnya mengandalkan perlawanan bersenjata, setelah Perjanjian Oslo 1993, Fatah beralih ke jalur diplomasi sebagai alternatif untuk mencapai kemerdekaan Palestina, sementara Hamas tetap mempertahankan perjuangan bersenjata. Konflik yang dimulai dari persaingan penguasaan wilayah antara bangsa Arab dan Yahudi ini terus berlanjut, dengan Fatah tetap berperan penting meskipun mengalami perbedaan dengan Hamas, terutama dalam hal ideologi dan pendekatan terhadap diplomasi internasional. Selain itu, meskipun Fatah dan Hamas memiliki pandangan politik yang berbeda, terjadinya rekonsiliasi antara keduanya pada 2017 menunjukkan adanya usaha untuk mencari kesatuan di tengah konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, Fatah terus menjadi kekuatan dominan dalam politik Palestina, baik dalam hal perjuangan diplomatik maupun dalam peranannya di PLO, meskipun dihadapkan pada tantangan dari faksi-faksi lain dan intervensi kekuatan internasional seperti Amerika Serikat.

BAB XII

Orientalis dan Pandangannya Terhadap Islam dalam Lintasan Sejarah

Nur Saiful



Kemajuan suatu peradaban pada hakikatnya tercermin melalui perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Melalui ilmu pengetahuan, tata kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan terbentuk secara teratur dan berkesinambungan. Salah satu bukti eksistensi peradaban masa lampau dapat ditelusuri dari peninggalan intelektual berupa karya-karya tulis yang tersimpan hingga hari ini. Karya-karya tersebut, yang kini banyak terarsip dalam pusat-pusat penaskahan, mencerminkan tingkat intelektualitas dan dinamika pemikiran masyarakat pada masanya. Oleh karena itu, warisan keilmuan tersebut tidak semestinya dibiarkan terbengkalai, apalagi dianggap usang. Meski secara fisik tampak seperti onggokan naskah tua, substansi di dalamnya

mengandung nilai-nilai sejarah dan ilmu pengetahuan yang otentik serta relevan untuk ditelaah kembali pada masa kini.

Studi tentang Islam tidak hanya dilakukan oleh umat Muslim, tetapi juga oleh para sarjana Barat yang dikenal sebagai orientalis. Istilah "orientalis" merujuk pada para ilmuwan non-Muslim yang mempelajari dunia Timur, khususnya dunia Islam, dari berbagai aspek seperti teologi, sejarah, bahasa, budaya, dan peradaban. Kajian orientalis terhadap Islam telah melahirkan banyak literatur, mulai dari yang bersifat ilmiah hingga yang kental dengan motif ideologis. Di satu sisi, mereka berkontribusi dalam mengembangkan studi keislaman secara akademis. Namun di sisi lain, banyak pula yang menilai pendekatan mereka sarat dengan bias Barat dan agenda politik.

Orientalisme dalam pengertian sempit adalah kegiatan penyelidikan ahli ketimuran di Barat tentang agama-agama di Timur, khususnya tentang agama Islam. Kegiatan penyelidikan dalam bidang tersebut telah berlangsung selama berabad-abad secara sporadic, tetapi baru memperlihatkan eksistensinya yang luar biasa sejak abad XIX M. sikap dan pandangan terhadap masing-masing agama di Timur, khususnya agama Islam, sangat berbeda-beda menurut sikap mental dari kaum orientalis itu. (Souyb, 1985) Sementara itu, sebagian pihak lainnya memosisikan orientalis sebagai gabungan antara ilmuwan dan misionaris, yang menjadikan studi Islam sebagai instrumen dalam proyek dakwah atau hegemoni kultural.

Namun, dalam banyak studi orientalis, umat Islam sering digambarkan sebagai makhluk pasif yang diamati, dikritik secara sepihak, oleh perspektif Barat. Hal ini menunjukkan bahwa orientalisme, secara kognitif, telah menghilangkan subjektivitas eksistensi Islam, menggantikannya dengan narasi dominan yang menggambarkan Islam bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana struktur pemikiran Barat yang dicita-citakan. Karena itu, mengkritik orientalisme bukan sekadar tantangan akademis, tetapi juga upaya untuk memulihkan eksistensi umat Islam sebagai manusia otentik, yakni manusia yang mampu berbicara, memahami, dan memaknai dirinya sendiri dalam cakrawala budayanya. Makalah ini akan mengulas secara mendalam tentang pengertian orientalis, latar belakang kemunculan orientalisme, motif mereka dalam mengkaji Islam, serta respons umat Islam terhadap kajian orientalis.

Orientalis adalah kata serapan dari bahasa Perancis yang asal katanya adalah orient yang berarti "Timur". Secara geografis, kata ini dapat diartikan "dunia Timur" dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. (Shihab, 1990) Kata orient itu telah memasuki berbagai bahasa di Eropa, termasuk bahasa Inggris. Oriental adalah sebuah kata sifat yang bermakna; hal-hal yang bersifat timur, yang teramat luas ruang lingkupnya.

Menurut Dr. Affaf Sabrah orientalis adalah istilah yang luas yang meliputi semua kelompok-kelompok yang melakukan studi-studi ketimuran, baik ilmu pengetahuan, seni,

sastra, agama dan sejarah. Timur yang dimaksud meliputi bangsa-bangsa di Timur seperti India, Cina dan Jepang. Orang Barat yang mengkaji ketimuran tersebut, disebut orientalis. (Sabrah, 1975) Sedangkan kata orientalisme (Belanda) ataupun orietalism (Inggris) menunjukkan pengertian tentang suatu paham. Jadi orientalisme berarti sesuatu paham, atau aliran, yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di Timur beserta lingkungannya. Selain dari pada itu, Edward W. Said memahami orientalis sebagai suatu cara untuk memahami dunia Timur, berdasarkan tempatnya yang khusus menurut pengalaman orang Barat Eropa. (Said, 1996) Atau dengan kata lain orientalisme adalah suatu gaya berpikir yang berdasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologi yang dibuat antara "Timur" (*the Orient*) dan (hampir selalu) Barat (*the Occident*).

Oleh karena itu, meskipun orientalis memiliki makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan bangsa-bangsa Timur beserta lingkungannya sehingga meliputi seluruh bidang kehidupan, namun secara sempit, orientalis dapat diartikan sebagai kegiatan ahli ketimuran Barat tentang agama-agama di Timur, khususnya agama Islam. Kegiatan penyelidikan dalam bidang tersebut telah berlangsung selama berabad-abad secara sporadik, tetapi baru memperlihatkan intensitasnya yang luar biasa sejak abad ke 19 Masehi. Sikap dan pandangan terhadap masing-masing agama di Timur, khususnya agama Islam, sangat berbeda-beda menurut sikap mental orientalis itu. (Rahim, 2010)

Dari pengertian tersebut bisa dipahami orientalisme menekankan bahwa ia bukan sekadar disiplin akademis yang netral dan objektif, tetapi lebih merupakan produk epistemologi yang berasal dari konteks sosial, politik, dan ideologis yang sangat dipengaruhi oleh kolonialisme dan hegemoni Barat. Orientalisme bukan hanya studi tentang Timur, tetapi juga merupakan alat untuk membangun dan mempertahankan hegemoni budaya dan politik Barat atas dunia Timur, Terutama dunia Islam. Oleh karena itu, kajian tentang dunia Islam dan Timur pada umumnya harus direkonstruksi menurut model yang lebih menghargai perspektif lokal, dan terbebas dari stereotip, prasangka, dan reduksi yang selama ini melekat pada kajian orientalis. Pendekatan ini bertujuan untuk mencerminkan realitas yang lebih autentik, adil, dan partisipatif.

A. Karakter Kajian Orientalis

Adapun karakteristik mengenai kajian orientalis ini sebenarnya tidak terlepas dari pengertian orientalisme itu sendiri. Ada beberapa ciri khusus orientalisme ini, yaitu Kajian tentang orientalisme dalam kacamata dunia Barat ialah senjata yang ampuh untuk melawan Islam. Ada satu contoh mengenai politik Barat yang dapat menggambarkan bagaimana orientalisme dalam pandangan Barat. Ada seorang orientalis bernama Gibb yang bekerja sebagai konsultan untuk Inggris dan Amerika dalam merencanakan politiknya untuk membantu kekuatan Israel dalam melawan Arab yang saat itu

dianggap sebagai pusat Islam dunia. Dengan keberhasilannya itulah maka dianggap bahwa orientalis jika mereka ingin melawan musuh maka mereka akan mempelajari bagaimana musuh itu dahulu. (Saifullah, 2020)

Orientalisme mempunyai ikatan yang kuat dengan perang dunia kedua. Jika dilihat dari sejarah orientalisme, maka akan sangat terlihat bagaimana keterkaitan yang sangat erat hubungannya dengan kolonialisme. Sejarah menyebutkan bahwa setiap negara Barat yang termasuk dalam kategori penjajah, memiliki organisasi dan wadah orientalisme. Contohnya seperti Snouck Hurgronje salah seorang orientalis asal Belanda yang dulu juga menjajah Indonesia. Snouck juga mengkaji tentang Islam di Timur Tengah, dan waktu kembalinya Snouck ke Indonesia banyak sekali Ulama yang tertipu dengan kealiman yang ditunjukkan oleh Snouck. (Ghurab, 1992)

Kajian tentang orientalisme yang dianggap mempunyai keterkaitan kuat dengan proses kristenisasi, apabila diukur secara ilmiah dan objektif sifatnya, maka secara akademisi pernyataan dan pemikiran-pemikiran orientalisme tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif. Orientalisme berpijak pada landasan salah, sebelum membuat kajian tentang Islam, mereka sudah mengambil satu kesimpulan bahwa Islam rendah, hina dan label-label negatif lainnya yang mereka alamatkan untuk Islam. Apabila kita melihat dari segi tujuannya sudah tidak baik, makanya tidak

heran kalau hasil penelitiannya juga menyimpang dari argumen dan fakta sejarah yang sebenarnya.

Kajian orientalisme jika diukur dengan standar ilmiah dan juga objek sifatnya maka secara akademisi dapat dikatakan bahwa pemikiran orientalisme tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena orientalisme berdasarkan kepada landasan yang salah. Dari awal orientalis mengkaji Islam sudah membuat asumsi bahwa Islam adalah agama yang hina dan rendahan. Orientalis mengkaji Islam dengan tujuan yang dapat disebut negatif, maka hasil yang didapatkan juga negatif. Hal tersebut menjadi sebuah hal yang tidak mengherankan jika penelitian yang dilakukan orientalis akan menghasilkan suatu yang menyimpang dari fakta sejarah dan argumen yang sebenarnya.

Karakteristik studi orientalis tentang Islam mencerminkan keterkaitan erat antara pengetahuan, kekuasaan, dan ideologi. Studi orientalis tidak terbatas pada pemahaman objektif tentang Islam, tetapi bertujuan untuk mendefinisikan, mengendalikan, dan bahkan mendistorsi realitasnya untuk mendukung agenda politik, kolonial, dan agama Barat. Dengan demikian, orientalisme berfungsi sebagai alat representasi, tidak netral, melainkan penuh dengan bias struktural yang membentuk pandangan dominan dunia Islam. Pendekatan ini menjadikan kritik terhadap orientalisme bukan sekadar upaya untuk membantah narasi negatif tentang Islam, tetapi lebih merupakan langkah strategis dalam membongkar hegemoni pengetahuan kolonial yang telah lama mendominasi wacana

akademis tentang Timur. Kritik semacam ini membuka jalan untuk membangun studi Islam yang lebih adil, inklusif, partisipatif, dan membebaskan, di mana umat Islam dapat mengekspresikan diri dan mendefinisikan diri mereka sebagai aktor dalam proses produksi pengetahuan.

B. Perkembangan Orientalisme

Para peneliti berbeda pendapat tentang sejarah permulaan orientalisme ini, namun secara resmi dimulai dengan terbitnya ketetapan Majma" (konferensi) gereja Viena pada tahun 1312 H dengan membentuk sejumlah lembaga penelitian bahasa Arab di sejumlah universitas Eropa. Dengan demikian memungkinkan adanya orientalisme ini secara tidak resmi sebelumnya. Oleh karena itu ahli sejarah hampir sepakat bahwa abad ke-13 Masehi adalah permulaan orientalis bersifat resmi. Istilah Orientalisme sendiri sebenarnya baru mulai sangat populer selama periode kolonial di abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika istilah 'orientalis' diartikan sebagai seniman Barat yang diinspirasi oleh Timur, maupun sarjana Barat yang mengkhususkan diri pada studi bahasa, agama dan budaya ketimuran. (SAEED, 2016)

Adapun fase perkembangan Orientalisme yaitu Fase pertama Missionaris & Anti Islam (dimulai abad ke-16 M). Pada fase ini, adalah simbol gerakan anti-Islam yang dimotori oleh Yahudi dan Kristen. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap substansi ajaran Islam yang sejak dini sekali telah membeberkan kerancuan kedua agama itu. Selain itu

kekalahan bangsa Eropa Kristen dalam perang Salib juga memicu semangat anti Islam ini. Gerakan ini sejalan dengan misionaris. Selain itu, kekalahan bangsa Eropa dalam perang salib juga membangkitkan semangat anti Islam. Segovia, Nicholas Cusa, Jean Germain (seorang tokoh Kristen) memiliki strategi untuk menyebarkan kesan pada orang Timur dan Eropa. (Rochmat, 2023)

Fase kedua Kajian dan Cacian yang berawal dari abad ke 17 dan 18 Masehi. Fase ini terjadi beriringan dengan modernisasi Barat yang mana pada saat itu Barat berkepentingan untuk mempelajari Islam agar bisa menjadi berperadaban. Pada saat itu juga para Raja dan Ratu di Eropa mulai mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan dunia timur. Hal ini terbukti dengan Epernius yang menerbitkan buku tentang tata Bahasa Arab pertama kali. Kemudian ada Bedwell W yang menulis mengenai sejarah tentang hidup Rasulullah dan ada pula G. Sale yang menerjemahkan Al-Qur'an pada tahun 1734 dan mengatakan bahwa Islam adalah agama palsu dan lain sebagainya. (Teng, 2016)

Fase ketiga: Kajian & Kolonialisme pada abad ke 19 Masehi dan seperempat pertama pada abad ke 20. Periode ini berhubungan dengan era kolonialisme Barat ke berbagai negara Islam dalam bidang militer, kultural, politik dan ekonomi. Pada periode ini banyak orientalis yang memunculkan karya studi dalam bidang keislaman baik itu dalam Bahasa Arab dan Bahasa Persia. Periode ini juga ditandai

juga dengan bermunculannya beberapa pusat studi Islam. seperti *Society Asiatic of Paris* pada tahun 1822. Kemudian pada tahun berikutnya lahir *Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* di Inggris. Selanjutnya, Amerika juga mendirikan *School of Oriental Studies* pada tahun 1824 yang sekarang sudah diganti menjadi *School of Oriental and Africal Studies (SOAS)*. (Susmihara, 2017)

Fase keempat masa politik yaitu paruh kedua pada abad ke 19 Masehi. Islam dan umat Islam menjadi sentral kajian populer pada masa itu. Kajian-kajian yang dilakukan pada fase keempat ini tidak dilakukan karena alasan akademis saja namun juga untuk kepentingan kebijakan bisnis dan juga politik. Pada periode ini motif kajian orientalisme sedikit berubah, seperti sentimen keagamaan yang awalnya cenderung vulgar kemudian berubah menjadi sedikit lebih lembut. Para orientalis modern tidak lagi mengkaji Islam karena kebencian dan ketidaksukaan namun karena untuk memahami antara Islam dan Kristen. (Smith, 1981)

C. Pengaruh Orientalisme terhadap Dunia Islam

Orientalisme adalah gerakan intelektual dan ilmiah yang mempelajari dunia Timur, termasuk Islam dan peradabannya. Topik studi meliputi agama, peradaban, seni, sastra, bahasa, dan budaya masyarakat Timur. Dalam konteks Islam, orientalisme telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pandangan dunia Barat terhadap Islam. Namun, kontribusi ini tidak selalu positif, karena pendekatan

dan asumsi orientalis, dalam banyak hal, mencerminkan ketidaksetaraan intelektual, bias, dan upaya untuk mendominasi dunia Islam.

Secara umum, ketidakadilan intelektual para orientalis ukurannya berdasarkan pada pegangan serta neraca ilmiah pihak orientalis yang secara jelas mereka mencoba untuk mengkoar-kacirkan pemikiran umat Islam. Segala aspek mengenai Islam, Al-Qur'an, hadis, yang mereka kaji dengan sangat bersahaja. Dalam konteks kajian Islam, yang paling fatal dari metodologi orientalis ialah menempatkan Islam, (khususnya Al-Qur'an dan hadis) sebagai objek kajian yang disejajarkan kedudukannya dengan teori-teori produk manusia yang masih perlu diuji kebenarannya. Jika hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata bertentangan dengan konsep kitab suci, maka ketentuan wahyu dapat saja ditolak dan dapat diragukan kebenarannya. (Umar, 1978)

D. Penyimpangan Pemahaman Orientalis Tentang Hadis

Secara umum, penolakan para orientalis terhadap hadis adalah berkisar di sekitar persoalan keaslian hadis, direkayasa, kemudian beralih kepada nilai-nilai keaslian dan sejarah pengumpulan hadis yang lebih spesifikasi seperti isnadnya, cara pengumpulan dan masa pengumpulannya, faktor-faktor timbulnya sesuatu hadis serta istilah istilah yang berkaitan dengan Ulumul Hadis dan Ilm Mustalah al-Hadis. Dalam pengkajian hadis, sarjana-sarjana Barat telah memperkenalkan pengkajian hadis dengan mengikuti metode kritikan modern

selaras dengan pengkajian kesusteraan dan sejarah. Ini semua bertujuan untuk menunjukkan bahwa asa usul dan ciri-ciri kesusteraan hadis pada umumnya diragukan.

1. Pandangan Terhadap Al-Qur'an

Pandangan utama orientalis terhadap Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu percampuran unsur-unsur perjanjian lama (*old testament*), perjanjian baru (*new testament*) dan berbagai sumber-sumber lain termasuklah pengaruh agama Yahudi. Al-Qur'an juga biasanya dituduh sebagai bukan wahyu Tuhan, malahan ia adalah karangan nabi Muhammad Saw, ini adalah dakwaan klasik yang telah terdengar sejak zaman nabi Muhammad Saw. W. M Watt mengatakan bahwa ajaran Al-Qur'an berasal dan kepunyaan tradisi Judaeo-Christian tentang konsep ketuhanan, kenabian, wahyu, hari akhirat dan penolakan terhadap penyembahan berhala, dan yang lebih menyedihkan lagi Watt menyebutkan bahwa Islam merupakan tradisi Yahudi dan Kristen. (WATT, 1970)

Elmut gatje memiliki pendapat negatif tentang Al-Qur'an yaitu yang dalam bukunya *the Qur'an and its exegesis*, menganggap ayat-ayat tidak dengan wahyu telah masuk dalam mushaf Al-Qur'an, sedangkan ayat-ayat wahyu justru tidak dimasukkan ke dalamnya. Pendapat seperti ini tidak bisa disamakan dengan konsep *Naskh wa Mansukh*. Helmut Gadje juga menganggap redaksi bahasa Al-Qur'an seperti Bahasa yang bersajak para kabin. Sedangkan struktur eksternal bahasa Al-Qur'an menurut Gadje adalah kumpulan dari berbagai ragam Bahasa prosa pra-Islam. (Rochmat, 2023)

Kajian Orientalis terhadap Al-Qur'an memang berbeda, bahkan ada juga yang meragukan keaslian Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan oleh Taufiq Adnan Amal dalam bukunya rekonstruksi sejarah Al-Qur'an dalam buku *Bell's Introduction to the qur'an*, Montgomery Watt menyebutkan bahwa penjelajah barat yang pertama kali membuat klaim palsu terhadap bagian bagian Al-Qur'an adalah *Silvestre de sacy*. Yang merupakan Orientalis prancis yang meragukan 144 Surat ali-Imran yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya nabi Muhammad. (Muzayyin, 2015)

Sejarah kajian Al-Qur'an di barat sangat menarik untuk dikaji karena peradaban mereka banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Peradaban Islam banyak juga terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Itu sebabnya negara Barat mulai tertarik mengkaji Islam melalui kitab suci Al-Qur'an. Studi Qur'an di barat melalui tradisi penerjemahan. Terjemahan Al-Qur'an sangat membantu seseorang untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an meskipun tidak sepenuhnya.

2. Menggunakan Media Massa

Orientalis selalu bersama kolonialis dalam menyerang (memerangi Islam). Di negeri-negeri Islam sendiri, seluruh massa media modern selalu bekerja sama dengan Orientalis dalam memerangi Islam dan menggerogoti Dakwahnya. Maka umat Islam menghadapi perang pena, massa media yang membawa kebinasaan yang disampaikan mereka dalam surat-surat kabar, majalah-majalah, radio, televisi, film atau teater dan lain-lain. Massa media dipergunakan oleh musuh-musuh

Islam itu untuk menghancurkan umat Islam, melalui tulisan-tulisan, gambar-gambar, film-film, pikiran, buku-buku, sandiwara, pidato-pidato, dan uraian yang berkedok ilmiah. Ini lebih berbahaya dari serangan fisik langsung oleh militer lengkap dengan persenjataannya sebab tentara itu mudah dilihat dan diketahui gerakan dan penyerangannya.

Penggunaan media sebagai alat hegemoni kultural terbukti sangat efektif karena mampu menjangkau masyarakat luas dan membentuk pola pikir secara perlahan. Dalam hal ini, serangan melalui media lebih berbahaya daripada serangan fisik karena menyusup secara halus melalui wacana, citra, dan opini. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengembangkan kesadaran kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi melalui media dan mengembangkan media alternatif yang dapat mewakili nilai-nilai Islam secara adil dan objektif.

E. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Orientalisme

Orientalisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai motivasi yang saling terkait baik dari aspek ideologis, politik, maupun akademik. Kajian terhadap dunia Timur, khususnya Islam, oleh para ilmuwan Barat didorong oleh sejumlah faktor utama sebagai berikut:

1. Keagamaan

Sejak awal, orientalisme Barat terkesan mewakili Kristen dalam memandang Islam sebagai agama yang menentang

prinsip-prinsip mereka. Salah satu tujuan Islam adalah untuk menyempurnakan millah, yang dianggap sebagai kritik agama yang harus dijawab agar tidak berdampak pada pendukung agama Kristen. Kekhawatiran akan penyebaran doktrin Islam secara global membuat kaum orientalis menjadikan faktor ini sebagai tujuan utama dalam gerakan tersebut. Mereka khawatir jika umat Islam kuat dengan akar epistemologi dan ontologinya maka bisa dipastikan secara aksiologi seluruh aspek kehidupan akan berlangsung di bawah dunia Islam. Islam dianggap sebagai agama yang menyempurnakan millah sebelumnya, sehingga bagi sebagian pemikir Kristen, Islam merupakan bentuk kritik terhadap agama mereka yang harus dijawab dan dilawan secara teologis dan intelektual.

Kekhawatiran terhadap penyebaran agama Islam secara global telah mendorong banyak orientalis untuk mempelajari Islam secara mendalam, mencari celah untuk memutarbalikkan ajarannya. Mereka menyadari bahwa jika umat Islam kuat secara kognitif dan eksistensial, semua aspek kehidupan dapat dijalani dalam kerangka nilai-nilai Islam, yang dapat mengancam dominasi budaya dan agama Barat.

2. Kolonialisme

Kolonialisme memainkan peran yang sangat besar dalam muncul dan berkembangnya orientalisme sebagai suatu pendekatan ilmiah sekaligus ideologis terhadap dunia Islam dan Timur secara umum. Dalam konteks kolonialisme, orientalisme tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik yang netral, tetapi menjadi alat untuk memahami,

mengendalikan, bahkan mendominasi masyarakat Muslim di wilayah jajahan. Maka dari itu, tidak dapat dipisahkan antara proyek kolonial dan kemunculan orientalis sebagai agen pengetahuan yang turut memperkuat hegemoni Barat atas Timur.

Kemunculan orientalis pada masa kolonial sangat terkait dengan kebutuhan politik dan administratif imperium Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Untuk dapat menjajah dan mengatur masyarakat Islam yang memiliki tradisi dan sistem hukum tersendiri, para penguasa kolonial memerlukan pengetahuan mendalam tentang budaya, bahasa, dan ajaran Islam. Dari sinilah muncul ketertarikan untuk mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih, sejarah Nabi Muhammad, serta struktur sosial umat Islam. Kajian ini kemudian dikembangkan oleh para orientalis di lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kolonial.

Kolonialisme bukan hanya memperluas wilayah kekuasaan Barat, tetapi juga menciptakan dan mendorong berkembangnya orientalisme sebagai sarana untuk memahami sekaligus mengendalikan dunia Islam. Munculnya orientalis dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari proyek kekuasaan kolonial yang ingin menjadikan pengetahuan sebagai alat legitimasi dan dominasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi warisan orientalisme kolonial dan membangun pendekatan kajian Islam yang lebih adil dan otonom.

3. **Keilmuan**

Sejarah mencatat bahwa umat Islam berhasil mengembangkan sains dan teknologi di banyak negara, meskipun Barat belum memiliki apa-apa. Akibatnya, Barat sangat bersemangat untuk menerjemahkan karya-karya Muslim. Hal ini dilakukan secara besar-besaran setelah runtuhnya Baghdad sekitar abad 12 yang menjadi pusat perkembangan intelektual dan keilmuan Islam saat itu. Dampak yang ditimbulkan yakni warisan sains dan temuan para sarjana muslim saat itu banyak dipelajari kembali di Barat sehingga menjadikan tambahan referensi serta ide mereka dalam mengembangkan peradaban yang mereka inginkan.

Proses penerjemahan besar-besaran ini membuka cakrawala baru bagi para sarjana Barat dan menjadi landasan kemajuan ilmiah di Eropa. Terinspirasi oleh semangat Renaisans, banyak pemikir Barat terdorong untuk mempelajari teks-teks Arab dan Islam dari perspektif ilmiah dan filosofis, yang membuka jalan bagi munculnya orientalisme dalam kerangka akademis.

4. **Motif ekonomi**

Berbeda dengan dua motif sebelumnya aspek ini berangkat dari semangat GOLD (dalam salah satu 3G Kristenisasi). Sejalan dengan pengembangan industrialisasi, barat membutuhkan daerah jajahan sekaligus pasar. Peluang terlihat ada pada kaum Muslim yang ketika itu sedang terpuruk. Inilah yang mempengaruhi mereka untuk mengkaji

agama, kondisi demografi, budaya, kultur dan politik umat Islam, (Oktavia, 2022) hal ini dianggap sebagai salah satu kesempatan berharga dari orientalisme untuk menyebarkan aspek industrinya ke dunia Timur termasuk Islam. Melalui alat berupa gerakan Kolonialisme dan imperialisme motif ekonomi ini dikolaborasikan dengan motif lainnya, sehingga mampu menggeser paradigma dan kultur serta budaya masyarakat timur yang ada di hadapan mereka.

Dalam konteks ini, orientalisme menjadi sarana untuk memahami struktur sosial, budaya, dan agama masyarakat Islam, sehingga memudahkan penetrasi ekonomi Barat. Aspek ini sering menyertai proyek kolonial dan imperialis. Dalam hal ini, orientalisme menjadi bagian dari strategi dominasi ekonomi, melalui pemahaman sistem sosial dan budaya masyarakat Timur dan mengubahnya sesuai dengan kepentingan industri dan perdagangan Barat.

5. Motif politik

Pada masa ketika Eropa baru mulai bangkit dari masa kegelapan (Dark Ages), dunia Islam telah lebih dahulu mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pemerintahan. Peradaban Islam berkembang pesat dan meluas dari Timur Tengah hingga Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Tengah. Kecepatan penyebaran dan pengaruhnya yang kuat membuat Islam dipandang oleh Barat bukan hanya sebagai kekuatan spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Selain itu, Setelah negara-negara Islam terlepas dari penjajahan yang zalim,

kekuatan dan taktik kolonialisme terus berjalan, antara lain dengan menempatkan orang-orang pilihan yang berpengalaman dan luas pengetahuannya mengenai dunia Islam di Kedutaan-Kedutaan dan konsulat-konsulat mereka untuk memenuhi kepentingan politik kolonialismenya di negara-negara Islam. (el-Badawyy, 2007)

Saat Eropa keluar dari Abad Kegelapan, ia menghadapi kenyataan bahwa dunia Islam telah mencapai puncaknya. Hal ini membuat para penguasa Eropa khawatir, sehingga mendorong mereka melakukan upaya sistematis untuk memahami dan melemahkan kekuatan politik Islam. Salah satu bentuknya adalah menempatkan para ahli yang memiliki pengetahuan tentang dunia Islam di kedutaan atau konsulat mereka di negara-negara Islam untuk melaksanakan agenda politik dan diplomatik yang selaras dengan kepentingan Barat.

BAB XIII

Hubungan Islam dan Kristen Abad Pertengahan

Nurhidayat



Seluruh dunia peranan agama menjadi kekuatan yang semakin meningkat dan terus bertambah dalam kehidupan sosial dan individu. Agama Islam dan Agama Kristen adalah agama dengan pemeluk agama terbesar didunia, kedua agama ini memiliki mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dunia. Islam pernah menjadi Negara super power pada zamannya, sementara Kristen saat ini sedang menguasai dunia dimana dia dikenal sebagai polisi dunia. Karena semua agama wahyu tersebut bersumber dari Allah SWT, maka tentu saja agama-agama ter-sebut memiliki hubungan yang erat dalam lintasan sejarah. Bahkan, agama samawi yang telah turun berturut-turut itu selalu mengandung konsepsi-konsepsi hidup yang bertujuan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, agama Islam dan Kristen mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai belahan dunia dan kedua agama tersebut memiliki pengikut mayoritas di muka bumi ini. Oleh karena agama Islam dan agama Kristen merupakan agama mayoritas di muka bumi ini dan memiliki hubungan yang erat dalam lintasan sejarah, maka tentu saja korelasi antar keduanya sangat menarik untuk dikaji dan dicermati, dan fokus kajiannya adalah hubungan antara agama Islam dan agama Kristen pada abad pertengahan. Hubungan Islam dan Kristen yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antar umat beragama. Apakah terjadi konflik di antara kedua agama tersebut atautkah sebaliknya, yang terjadi hidup rukun dan dalam suasana penuh toleransi.

A. Kondisi Hubungan Islam dan Kristen Sebelum Abad Pertengahan

Rasulullah SAW. mendirikan Negara Madinah telah menjadikan Islam sebagai agama berkembang pesat hingga ke penjuru dunia. Persentuhan pertama Islam dengan kaum Kristen dimulai ketika Rasulullah SAW. mengirim utusan untuk menyampaikan surat tentang ajakan bagi Herklus untuk masuk Islam. Romawi kala itu banyak dihuni oleh bangsa Arab beragama Kristen. (Mubarakfiri, 1997) Pasca wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat melebarkan sayap kekuasaan Negara Madinah keluar jazirah Arab di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan dapat menaklukkan Persia. Langkah penaklukan

selanjutnya mengarah ke Utara dan untuk ke sekian kalinya wilayah Romawi, Suria dan Palestina mampu ditaklukkan.

Selanjutnya terjadi intensitas yang tinggi dalam percaturan antara Islam dan Kristen sebagai ideologi. Pergulatan kedua agama besar ini dilandasi oleh ajaran dasar bahwa keduanya merupakan agama transnasional. Kristen menghadapi situasi dimana umat Islam semakin kuat menyebarkan agama mereka dan melahap daerah umat Kristiani. Ajaran Islam telah mampu memasuki daerah Kristen di laut tengah-dari Anatolia menembus Gibraltar hingga Spanyol.

Umat Kristiani pada sisi lain semakin cemas dengan gerakan kaum Muslimin melebarkan sayap kekuasaan mereka. Meskipun secara faktual daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin masih tetap pada agama awal mereka. Dalam ajaran Islam, kelompok minoritas (*zimmi*) atau kelompok yang terlindungi (*musta'min*) tidak akan tersentuh dalam perpindahan agama mereka dan sebagai balasan dari jaminan tersebut, kedua kelompok ini diwajibkan membayar jizyah.

Puncak pergumulan Islam-Kristen pada masa selanjutnya melahirkan sebuah peristiwa miris yang kita kenal dengan perang salib. (Wajdi, 1995) Peristiwa kontra kemanusiaan ini berlangsung cukup lama dan bahkan sebagian menyimpulkan jika perang ini belum kunjung berakhir hingga saat ini.

B. Hubungan Islam dan Kristen Abad Pertengahan

Mengawali patra tulisan ini, akan dibahas terlebih dahulu periodisasi sejarah masa pertengahan. Dalam pandangan Ahmad M. Sewang, periodisasi sejarah mutlak ada dan selalu mengikuti tempat dan waktu. Runtut peristiwa diurut berdasar waktu dan peristiwa berdasar aktivitas manusia. (Sewang, 2005) Tulisan ini selanjutnya akan mengikuti pendapat Harun Nasution yang membagi periodisasi tersebut menjadi :

1. Periode Klasik (tahun 650-1000 M)
2. Periode Disintegrasi (1000-1250 M)
3. Pertengahan (tahun 1250-1800 M)
4. Tiga Kerajaan Besar (tahun 1500-1800 M)
5. Modern (tahun 1800-sekarang). (Nasution, 1975)

Peristiwa monumental yang mengikat Islam-Kristen pada ikatan emosional yang tinggi adalah “Perang Salib”. Telah disinggung pada bagian awal tulisan ini bahwa akar masalah musibah kemanusiaan ini adalah faktor dominasi dan kecurigaan masing-masing penganut. Peristiwa perang salib pertama kali dikumandangkan pada tanggal 20 November 1095 saat Paus Urbanus II dalam rapat dewan gereja memutuskan melawan umat Islam yang saat itu melancarkan ekspansi ke wilayah kekuasaan Alexis Comnenus di Asia. Permintaan Alexis Comnenus untuk melibatkan umat Kristiani dalam perang yang sementara dialaminya disahuti oleh Paus Urbanus II, maka terjadilah musibah kemanusiaan yang berlangsung sebanyak delapan periode dari tahun 1095-1244

M. (Thohir, 2004) Paus Urbanus sangat termotivasi untuk melancarkan serangan kepada kaum muslim di Timur karena motivasi ingin menyatukan ke Uskupan Agung di Barat dengan kepemimpinan tertinggi gereja Orthodox di Timur. Secara kronologis, perang salib melewati tujuh fase sebagai berikut :

Tahun 1050 di Sisilia, orang-orang Islam diusir dari daerah ini dan tak berapa lama kemudian tepatnya tahun 1063, tentara salib Prancis dan Spanyol sepakat untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaan Islam. Tentara salib berhasil menguasai daerah Antiokhia kemudian meneruskan perjalanan mereka ke Yerusalem dan menguasainya setelah mengepung daerah ini sekian lama. Tahun 1099-1187 kaum salib mendirikan kerajaan Kristen di Yerusalem yang wilayah kekuasaannya meliputi; Antiokhia, Edessa dan Tripoli. Secara pemerintahan, daerah ini di bawah kekuasaan Konstantinopel, namun gerejanya di bawah kekuasaan Paus di Roma. Kekalahan kaum muslimin pada perang kali ini lebih disebabkan oleh kelemahan umat Islam akibat wafatnya pemimpin Turki Saljuk yang bernama Malik Syah. (Amstron, 2003)

Berlangsung dari tahun (1147-1149), pada periode ini kemenangan ada di tangan kaum Muslimin setelah Nuruddin Zanki yang menggantikan ayahnya menjadi pemimpin Turki Saljuk. Nuruddin Zanki mampu memadamkan propaganda perang salib yang dilaksanakan oleh Bernard Clairvux. Pemimpin tentara salib kala itu adalah Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad dari Jerman.

Berlangsung dari tahun (1189-1192). Berawal dari kekalahan tentara salib di Tiberias oleh Sultan Saladin. Dalam perang ini, kaum salib dipimpin oleh Kaisar Friedrich III dari Jerman dan Barbarossa, Raja Richard dari Inggris. Raja Richard berhasil menguasai daerah pesisir dan merebut kota Akko kemudian mengikat perjanjian dengan Sultan Saladin yang berisi kebebasan peziarah untuk berkunjung ke Yerusalem. (Hillenbrand, 2005)

Berlangsung pada tahun (1202-1204) berawal dari keinginan Paus Innocentius untuk menguasai Mesir dengan mengirim tentara ke Eropa Barat. Namun pada kenyataannya, tentara tersebut tidak pernah tiba di Mesir, malah tentara tersebut menduduki Venesia dan Konstantinopel serta memaksa mereka untuk tunduk kepada gereja Roma.

Berlangsung pada tahun (1218-1221) Pasca wafatnya Paus Innocentius III, penerusnya Honorius melanjutkan usaha untuk menguasai Mesir dan membuahkan hasil dengan menduduki kota Damietta sebuah daerah pantai di Mesir pada tahun 1221.

Berlangsung pada tahun (1248-1249) Tahun 1244 Yerusalem kembali diduduki oleh tentara Islam dan akibat dari pendudukan ini, Raja Louis IX dari Prancis melakukan perang salib dan menyerang Mesir. Kerakusan Raja Louis untuk menguasai Mesir tak membuahkan hasil bahkan ia sendiri tertawan oleh tentara Islam dan dapat bebas setelah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal hingga kemudian ia kembali ke Prancis.

Berlangsung pada tahun (1270). Sultan Bybars keturunan bangsa Mamluk dari Mesir berhasil mengakhiri perang ini secara gemilang dengan menguasai seluruh kekuatan dan kekuasaan tentara salib secara berturut-turut menguasai kota Jaffa dan Antiokhia pada tahun 1286, Tripoli dan Lebanon tahun 1289, Kota Akko sebagai kota terpenting kaum salib juga direbutnya pada tahun 1291. Sejak itulah kekuatan tentara salib sudah tidak ada lagi sekaligus mengakhiri perang salib yang terjadi selama 7 periode.

Meski perang salib telah selesai pengaruh buruk dan pencitraan buruk terhadap kaum muslimin oleh Kristen masih terus berlangsung. Di antara bentuk pencitraan buruk tersebut adalah penyajian kaum muslimin dan Nabi Muhammad saw. sebagai penentang ajaran Nabi Isa as. Selanjutnya agama Islam diidentikkan sebagai agama pedang yang disebarluaskan dengan kekerasan. Dalam pandangan William Montgomery Watt, distorsi penggambaran Islam sebagai agama pedang tidak berhenti bahkan terus menerus terjadi hingga kurun waktu abad ke XIX.

Meski kalah dalam perang salib, kaum Kristen Barat banyak mengambil manfaat dari perseteruan ini. Mereka (kaum Kristen Barat) tidak akan mengenal peradaban modern yang mereka alami sekarang jika tidak terlibat dalam perang salib. Mereka membawa pulang ilmu-ilmu tentang pendirian rumah sakit, ilmu kedokteran modern, tempat mandi umum, buku-buku astronomi, geometri, sastra, peralatan, navigasi

dan berbagai pengetahuan lain yang menopang peradaban modern mereka.

Perang salib telah memberi manfaat langsung kepada Kristen dalam upaya penerjemahan kitab-kitab kedokteran, filsafat, kesusastaan dan agama. Proses ini kemudian melahirkan pencerahan ilmu renaissance dalam bentuk penerjemahan kembali buku-buku berbahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. (Faruqi, 2001)

Perang salib telah melahirkan persentuhan budaya Barat yang saat itu masih dalam masa kegelapan dengan kebudayaan Islam yang telah memasuki masa kecemerlangan. Pertemuan ini telah banyak menguntungkan bangsa Barat dalam berbagai aspek semisal; kebudayaan, seni, perdagangan dan industri. Pada sisi lain muncul paradigma baru sebagai akibat perang salib yaitu hubungan dagang antara daerah-daerah Islam dengan daerah Kristen

BAB XIV

Bagaimana Islam Mempengaruhi Dunia Barat yang Telah Mencapai Kemajuan Ini (Dunia Modern)

Muh. Fadel As'ad



Kemajuan dunia Barat modern dalam bidang sains, teknologi, pendidikan, dan filsafat sering kali diasosiasikan dengan peristiwa Renaisans dan Revolusi Ilmiah di Eropa. Namun, narasi tersebut kerap mengabaikan fase penting dalam sejarah manusia, yakni peran besar peradaban Islam dalam meletakkan fondasi intelektual yang menjadi batu loncatan bagi dunia Barat untuk mencapai kemajuan tersebut. Pada abad ke-8 hingga ke-15, ketika Eropa berada dalam era kegelapan (Dark Ages), dunia Islam justru mengalami masa keemasan (Golden Age), di mana ilmu pengetahuan

berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan teknologi.

Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Razi, dan Ibnu Rusyd menghasilkan karya-karya monumental yang tidak hanya memengaruhi dunia Islam, tetapi juga menjadi referensi utama bagi ilmuwan Eropa setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Melalui pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, Cordoba, dan Toledo, ilmu pengetahuan Islam menyebar ke Eropa dan memperkaya Khasanah intelektual Barat. Bahkan, tokoh-tokoh besar Eropa seperti Thomas Aquinas banyak mengadopsi pemikiran filosof Muslim untuk mengembangkan gagasan teologis dan filsafat Barat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan sains di era modern ini, sangat penting untuk meninjau kembali akar-akar sejarah yang membentuk kemajuan tersebut. Pengabaian terhadap kontribusi dunia Islam dalam narasi sejarah modern bukan hanya menciptakan kesenjangan pemahaman sejarah, tetapi juga mengaburkan nilai-nilai universal yang pernah dijembatani oleh lintas budaya dan agama.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pengaruh peradaban Islam, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, pemikiran filosofis, maupun kontribusi budaya lainnya, telah memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan dunia Barat dan kemajuan dunia modern pada umumnya.

A. Proses Transfer Ilmu Pengetahuan dari Dunia Islam ke Dunia Barat

Transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat merupakan proses panjang yang berlangsung sejak abad ke-8 hingga ke-14. Ketika Eropa berada dalam masa kegelapan intelektual, dunia Islam justru mengalami zaman keemasan. Salah satu aspek penting dari transfer ini adalah keberadaan pusat-pusat intelektual seperti Baghdad, Cordoba, dan Toledo, yang menjadi titik temu peradaban dan pertukaran pengetahuan antara Islam, Kristen, dan Yahudi.

Sejak abad ke-7, Islam berkembang pesat dari Jazirah Arab ke Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tengah dan Semenanjung Iberia. Ekspansi ini bukan hanya bersifat militer, tetapi juga membawa serta budaya dan ilmu pengetahuan yang tumbuh dari interaksi dengan berbagai peradaban kuno seperti Yunani, Persia, dan India (Lindberg, 2007). Perjumpaan antara dunia Islam dan Barat mulai terjadi secara intensif pada abad ke-8 hingga ke-12, baik melalui jalur militer (seperti Perang Salib), perdagangan di Laut Tengah, maupun melalui wilayah perbatasan seperti Al-Andalus (Spanyol Islam) dan Sisilia (Lyons, 2009). Di wilayah-wilayah ini, komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan terlibat dalam dialog intelektual. Lingkungan ini menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Eropa Latin.

Salah satu momen paling signifikan dalam transfer ilmu adalah Gerakan Penerjemahan yang dimulai di Baghdad pada masa Dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Al-

Ma'mun (abad ke-9). Ia mendirikan Bayt al-Hikmah (House of Wisdom), pusat penerjemahan dan kajian ilmu yang mempekerjakan ilmuwan Muslim, Kristen Nestorian, dan Yahudi (Gutas, 1998). Di sini, karya-karya besar dari Yunani seperti Aristoteles, Galen, Euclid, dan Ptolemaios diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun para ilmuwan Muslim tidak sekadar menerjemahkan—mereka mengembangkan, menyempurnakan, bahkan mengkritisi warisan tersebut.

Ilmu yang dikembangkan di dunia Islam kemudian mulai diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin di kota-kota seperti Toledo, Salerno, dan Palermo pada abad ke-12. Tokoh seperti Gerard of Cremona menerjemahkan lebih dari 70 karya, termasuk milik Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi (Burnett, 2001). Inilah awal masuknya pemikiran ilmiah Islam ke dunia Eropa. Peradaban Islam bukan hanya sebagai penjaga warisan klasik, tetapi juga pengembang ilmu baru. Tokoh-tokoh seperti:

1. Al-Khwarizmi: memperkenalkan al-jabr (aljabar) dan hisab (aritmetika), serta konsep algoritma yang menjadi dasar ilmu komputer modern (Nasr, 2006).
2. Ibnu Sina (Avicenna): menyusun *Al-Qanun fi al-Tibb*, ensiklopedia kedokteran paling berpengaruh hingga abad ke-17 di Barat.
3. Ibnu al-Haytham (Alhazen): mengembangkan pendekatan eksperimental dalam studi optik, yang menjadi cikal bakal metode ilmiah modern (Saliba, 2007).

4. Ibnu Rusyd (Averroes): memperkenalkan kembali pemikiran logis Aristoteles ke dunia Barat dan memengaruhi skolastisisme Kristen (Adamson, 2016).

Keilmuan dunia Islam sangat rasional dan bersifat sistematis. Karya-karya ini menjadi dasar bangkitnya pemikiran ilmiah di Eropa menjelang masa Renaisans. Penyebaran ilmu pengetahuan tidak hanya melalui buku, tapi juga melalui lembaga pendidikan dan jaringan ulama. Madrasah, perpustakaan, dan majelis ilmiah adalah institusi utama di dunia Islam yang mendorong perkembangan intelektual. Sistem pendidikan Islam mendorong debat terbuka (munazharah), hafalan, logika, dan literasi kritis (Rosenthal, 1992).

Model kelembagaan ini menginspirasi struktur awal universitas di Barat seperti Universitas Bologna, Paris, dan Oxford, baik dalam hal kurikulum (tujuh seni liberal), pembagian fakultas (hukum, kedokteran, filsafat), maupun pemberian gelar akademik (bachelor, master, doktor) (Huff, 2003).

Tak hanya institusi, jaringan ulama dan pelajar yang berpindah dari satu kota ke kota lain juga memperluas penyebaran ilmu. Mobilitas intelektual ini menjadi ciri khas dunia Islam dan mempercepat penyebaran pengetahuan hingga ke Barat. Kontribusi Utama Peradaban Islam dalam Ilmu Pengetahuan, Filsafat, dan Pendidikan sebagai Fondasi Dunia Modern Barat. Peradaban Islam pada Abad Pertengahan menjadi pusat produksi ilmu pengetahuan yang maju dan

metodologis. Muslim tidak hanya menjadi penjaga ilmu klasik, tetapi juga pencipta ilmu baru. Mereka mengembangkan berbagai disiplin: matematika, astronomi, kedokteran, optik, geografi, fisika, dan kimia.

Matematika: Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai “Bapak Aljabar,” menulis Kitab al-Jabr wa al-Muqabala, yang menjadi dasar perkembangan aljabar di Eropa (Al-Khawarizmi, 1831). Ia juga memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab yang digunakan di seluruh dunia Barat hingga kini, termasuk penggunaan angka nol (Katz, 1993).

Astronomi: Al-Battani dan Al-Zarqali menyusun tabel astronomi yang akurat dan memperbaiki sistem Ptolemaik. Observatorium di Maragha dan Samarkand melatih astronom Eropa awal, termasuk Copernicus.

Kedokteran: Karya Ibnu Sina (*Canon of Medicine*) dan Al-Razi (Kitab al-Hawi) menjadi referensi utama di fakultas kedokteran Eropa selama lebih dari lima abad. Ibnu Sina membagi penyakit secara sistematis dan menerapkan prinsip-prinsip empiris (Porter, 1997).

Optik dan Eksperimen: Ibnu al-Haytham mengembangkan metode ilmiah berbasis eksperimen dan observasi dalam karyanya Kitab al-Manazir. Ia menolak pandangan klasik bahwa cahaya berasal dari mata, dan justru membuktikan bahwa cahaya dipantulkan ke mata dari objek (Sabra, 2006). Pendekatannya disebut-sebut sebagai pra-sains modern. Kontribusi Muslim pada ilmu pengetahuan tidak hanya berupa isi (konten), tetapi juga pendekatan sistematis, logis, dan

berbasis empiris—semua ini menjadi dasar Revolusi Ilmiah di Barat pada abad ke-16.

Dalam bidang filsafat, dunia Islam berperan besar dalam mentransmisikan dan mengembangkan pemikiran Yunani, terutama karya-karya Plato dan Aristoteles, yang sempat hilang dari dunia Barat setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama yang secara aktif menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Al-Farabi mengembangkan teori negara ideal dan logika dalam kerangka pemikiran politik dan etika. Ibnu Sina (Avicenna) memadukan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme dalam kerangka metafisika dan kosmologi Islam. Karyanya sangat berpengaruh di kalangan filsuf skolastik Eropa. Ibnu Rusyd (Averroes) adalah tokoh penting dalam memperkenalkan kembali Aristoteles ke dunia Barat. Ia menulis komentar yang sangat sistematis dan kritis terhadap karya-karya Aristoteles, yang kelak diterjemahkan ke Latin dan memengaruhi Thomas Aquinas (Renan, 1861). Ibnu Rusyd bahkan memunculkan aliran Averroisme Latin di Eropa, yang mendorong pemisahan antara filsafat dan teologi serta menumbuhkan semangat rasionalisme di Barat.

Salah satu warisan besar dunia Islam bagi dunia Barat adalah dalam hal sistem pendidikan formal dan pengorganisasian ilmu. Madrasah di dunia Islam memiliki struktur dan kurikulum yang terorganisasi: diajarkan ilmu agama sekaligus ilmu logika, kedokteran, matematika, dan astronomi (Makdisi, 1981). Madrasah menggunakan sistem

gelar dan jenjang pendidikan (mutakaddim, mutawassit, mutakhir) yang kelak menginspirasi gelar akademik Barat (*bachelor, master, doctor*) (Huff, 2003). Perpustakaan besar seperti di Baghdad (Bayt al-Hikmah), Kairo (Dar al-‘Ilm), dan Cordoba memiliki ribuan manuskrip dan terbuka untuk umum—jauh sebelum universitas Eropa berdiri. Sistem ijazah (sertifikat kelulusan) yang diberikan guru kepada murid di dunia Islam adalah awal dari sistem lisensi ilmiah dan akademik yang diterapkan di universitas Eropa kemudian.

Universitas Eropa awal seperti Bologna, Paris, dan Oxford dibentuk dengan meniru struktur madrasah Islam, terutama dari segi kurikulum dan metode diskusi. Banyak istilah dalam bahasa Latin dan ilmu pengetahuan yang berasal dari Arab: *algebra, algorithm, alkali, azimuth, zenith*, dll. (Al-Khalili, 2011) Karya-karya Muslim yang diterjemahkan ke Latin menjadi bacaan wajib di Eropa abad pertengahan hingga awal modern. Dengan demikian, kontribusi peradaban Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membentuk cara berpikir ilmiah, rasional, dan sistematis yang mendasari kemajuan dunia Barat modern.

B. Warisan Intelektual Islam dalam Dunia Modern Barat: Jejak yang Masih Nyata

Warisan Islam dalam ilmu pengetahuan tidak berhenti di masa klasik. Banyak aspek dari sains dan teknologi modern masih menggunakan prinsip-prinsip, konsep, dan istilah yang berasal dari dunia Islam. Pengaruh ini bukan hanya berupa

istilah, tetapi juga cara berpikir dan pendekatan terhadap pengetahuan. Optik dan Metode Ilmiah: Ibnu al-Haytham dalam Kitab al-Manazir tidak hanya mematahkan teori optik Yunani, tetapi juga memperkenalkan metode eksperimental berbasis observasi, hipotesis, dan verifikasi. (SABRA, 1975) Pendekatan inilah yang menjadi dasar metode ilmiah modern yang digunakan di laboratorium, termasuk dalam studi fisika dan psikologi persepsi hari ini.

Matematika dan Komputer: Konsep algoritma, yang menjadi fondasi komputasi dan pemrograman modern, berasal dari Al-Khwarizmi. Istilah tersebut digunakan langsung dalam bahasa Inggris dan diterapkan dalam AI, kriptografi, dan data science bidang-bidang teknologi yang paling canggih hari ini.

Astronomi Modern: Banyak istilah teknis astronomi seperti nadir, zenith, dan azimuth berasal dari bahasa Arab. Metodologi pengamatan yang sistematis dan instrumen seperti astrolabe juga berasal dari penemuan Muslim dan masih digunakan dalam pendidikan astronomi hari ini. Dengan demikian, dunia modern tetap berjalan di atas rel yang diletakkan oleh para ilmuwan Muslim, baik dari segi teknik, metodologi, maupun bahasa ilmiah.

Filsafat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk rasionalisme dan pandangan dunia sekuler Barat. Ini terlihat dalam berbagai aspek: Logika dan Ontologi: Ibnu Sina memperkenalkan pembagian antara esensi dan eksistensi, serta membangun struktur logika dan epistemologi

yang diteruskan oleh Thomas Aquinas dan skolastisisme Barat. Sampai hari ini, filsafat eksistensial dan metafisika modern masih merujuk pada struktur yang dikembangkan oleh pemikir Islam. Averroisme dan Kritik terhadap Ortodoksi: Ibnu Rusyd menekankan bahwa filsafat dan wahyu tidak bertentangan, selama akal digunakan dengan tepat. Ia juga mengkritik literalitas dan memperkenalkan tafsir filosofis atas wahyu. Gagasan ini menyebar di Eropa dan mendorong munculnya humanisme Renaisans dan pemikiran sekuler.

Rasionalisme dan Hakikat Pengetahuan: Konsep bahwa pengetahuan harus bersandar pada bukti rasional dan dapat diuji secara logis sangat berakar dari tradisi Islam klasik. Gagasan ini diteruskan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Barat dan dalam tradisi filsafat modern seperti Cartesianisme, Empirisme, dan bahkan Positivisme. Rasionalitas, debat terbuka, dan otonomi intelektual yang dijunjung tinggi di universitas-universitas modern memiliki jejak kuat dari filsafat Islam abad pertengahan.

Salah satu bentuk warisan yang paling nyata adalah sistem kelembagaan pendidikan tinggi yang mengadopsi banyak aspek dari madrasah Islam. Struktur Madrasah vs Universitas: Madrasah seperti Nizamiyah, Al-Qarawiyyin, dan Al-Azhar telah menggunakan sistem kurikulum, jenjang pendidikan, dan pengajaran berbasis teks jauh sebelum Oxford dan Sorbonne berdiri. Sistem ini kemudian diadopsi di Eropa oleh para cendekiawan yang mempelajari pendidikan di dunia Islam melalui Andalusia dan Sisilia. Sistem Ijazah dan Gelar

Akademik: Ijazah (lisensi untuk mengajar atau mengutip dari guru tertentu) adalah bentuk awal dari sertifikasi ilmiah yang kini menjadi sistem gelar: bachelor, master, hingga doktor. Metode Debat dan Halaqah: Diskusi terbuka, munazarah (debat ilmiah), dan halaqah (lingkar diskusi) yang berkembang di masjid dan madrasah telah memberi inspirasi pada seminar dan colloquium akademik Barat. Selain itu, etos keilmuan Islam yang menjunjung tinggi *ṭalab al-‘ilm* (pencarian ilmu), keterbukaan intelektual, dan adab dalam diskusi masih menjadi nilai utama dalam budaya akademik modern.

Pengakuan Global: Banyak institusi internasional seperti UNESCO, British Museum, dan Smithsonian Institute telah menyelenggarakan pameran dan publikasi khusus tentang “*Golden Age of Islamic Science*”, mengakui kontribusi dunia Islam terhadap peradaban global. Reaktualisasi dalam STEM dan Pendidikan: Beberapa universitas dan laboratorium teknologi di Barat mulai menyoroti warisan Islam sebagai bagian dari kurikulum diversitas dan rekonsiliasi sejarah, misalnya melalui kursus *History of Islamic Science* di MIT dan Harvard. Revival dalam Dunia Muslim Sendiri: Warisan ilmiah ini juga menginspirasi dunia Islam untuk bangkit kembali, dengan pendekatan sains yang tidak bertentangan dengan nilai spiritual. Hal ini memberi peluang dialog lintas peradaban yang lebih sehat antara Barat dan dunia Islam modern.

BAB XV

Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Pembuatan Piagam Madinah

Abdul Rahim



Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 M menandai babak baru dalam sejarah Islam, tidak hanya sebagai gerakan spiritual, tetapi juga sebagai upaya membangun masyarakat yang teratur dan berkeadaban. Madinah pada waktu itu merupakan masyarakat majemuk yang dihuni oleh berbagai suku Arab (Aus dan Khazraj) serta komunitas Yahudi (Bani Qaynuqa', Bani Nadhir, dan Bani Qurayzah). Kehidupan sosial di Madinah sering diwarnai oleh konflik antar kelompok, dan belum ada struktur politik yang menyatukan seluruh penduduk kota tersebut.

Dalam konteks inilah, Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting sebagai pemersatu masyarakat dan perancang tatanan sosial baru yang berbasis pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif. Salah satu langkah

strategis yang dilakukan oleh Nabi adalah merumuskan Piagam Madinah (Ṣaḥīfat al-Madīnah)—sebuah dokumen sosial-politik yang dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini bukan hanya menjadi kesepakatan damai, tetapi juga menjadi dasar pembentukan komunitas politik yang disebut ummah, yang meliputi Muslim dan non-Muslim.

Pembuatan Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan dan visi kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya bertindak sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai negarawan dan arsitek sosial yang mampu merespons kebutuhan masyarakat plural dengan pendekatan inklusif.

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah dihuni oleh dua suku Arab besar, yaitu Aus dan Khazraj, serta beberapa suku Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Perseteruan panjang antara Aus dan Khazraj memuncak dalam Perang Bu'ats, yang menyebabkan kerugian besar di kedua pihak. Kondisi ini menciptakan kerinduan terhadap pemimpin netral yang mampu mendamaikan mereka.

Kaum Anshar (penduduk Madinah yang telah masuk Islam) melihat sosok Nabi Muhammad SAW sebagai figur ideal yang dapat mempersatukan dan menengahi konflik. Selain itu, pertambahan jumlah kaum Muslim dari golongan Muhajirin (yang hijrah dari Mekah) juga menambah kompleksitas sosial di Madinah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesepakatan

yang mengatur hubungan antar kelompok demi menjaga stabilitas kota.

Dalam kondisi demikian, Nabi Muhammad SAW memandang perlunya merumuskan sistem kesepakatan yang dapat menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda, baik dari segi agama, suku, maupun kepentingan. Langkah strategis itu kemudian terwujud dalam bentuk Piagam Madinah (Ṣaḥīfat al-Madīnah), sebuah dokumen sosial-politik yang disusun sebagai dasar koeksistensi damai antar penduduk Madinah. Dokumen ini bukan hanya menjadi perjanjian damai, tetapi juga berfungsi sebagai konstitusi pertama yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural dalam satu entitas politik yang disebut ummah, yang mencakup Muslim dan non-Muslim.

Piagam Madinah memuat berbagai ketentuan penting, seperti pengakuan atas kebebasan beragama, kewajiban pembelaan bersama jika kota diserang, serta penerimaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan hakim tertinggi. Penetapan hukum dalam piagam juga menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan norma-norma suku dan agama masing-masing selama tidak bertentangan dengan kesepakatan umum. Dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan komunitas plural dalam ikatan perjanjian sosial yang menjamin stabilitas dan keadilan.

Oleh karena itu, latar belakang sosial-politik Madinah yang terdiri atas fragmentasi sosial, potensi konflik, dan kebutuhan akan sistem keadilan yang inklusif menjadi faktor utama yang

mendorong lahirnya Piagam Madinah. Piagam ini sekaligus menunjukkan kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam membangun tatanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif.

Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin spiritual kaum Muslimin, tetapi juga menjadi arsitek politik dan sosial di Madinah. Beliau memprakarsai penyusunan Piagam Madinah demi menciptakan masyarakat yang harmonis. Piagam ini merupakan dokumen konstitusional pertama dalam sejarah Islam yang terdiri dari 47 pasal.

Peran Nabi Muhammad sangat terlihat dalam:

1. Inisiatif Penyusunan. Nabi Muhammad sendiri yang mengusulkan adanya kesepakatan tertulis antara seluruh elemen masyarakat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim.
2. Penyusunan Struktur Pasal. Dalam isi Piagam, terdapat tiga elemen utama: Penyatuan kaum Muhajirin dan Anshar sebagai satu umat Islam, Pengakuan terhadap eksistensi suku-suku Yahudi dan hak mereka untuk mempertahankan agama mereka, Penetapan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin dan penengah tertinggi dalam penyelesaian konflik.
3. Konsep Persatuan dan Keadilan. Nabi Muhammad menekankan bahwa seluruh pihak, meskipun berbeda keyakinan, adalah satu komunitas yang saling melindungi.

Nabi Muhammad juga berperan aktif dalam menerapkan piagam tersebut dan menjadi figur sentral dalam menjaga

komitmen antar kelompok. Nabi Muhammad SAW memainkan peran yang sangat strategis dalam perumusan Piagam Madinah, yang bukan hanya sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai landasan bagi tatanan sosial dan agama di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, kota tersebut sedang dilanda ketegangan sosial dan politik yang mendalam. Madinah terdiri dari dua kelompok mayoritas, yaitu kaum Anshar dan kaum Muhajirin, yang berasal dari Makkah, serta komunitas minoritas seperti suku-suku Yahudi (Bani Qaynuqa, Bani Nadhir, dan Bani Qurayzah). Konflik antar suku-suku Arab, terutama antara suku Aus dan Khazraj, telah berlangsung lama dan menjadi masalah besar yang mengancam stabilitas kota Madinah.

Melihat keadaan ini, Nabi Muhammad SAW menyadari pentingnya membangun kerangka hukum dan sosial yang dapat menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang yang sangat beragam tersebut. Pada saat itu, beliau tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang berusaha mengatur kehidupan sosial dan politik. Piagam Madinah lahir dari inisiatif Nabi sebagai solusi pragmatis untuk meredakan ketegangan antar kelompok yang berbeda, serta untuk menciptakan sistem hukum yang berlaku secara adil bagi semua pihak yang ada di Madinah. Piagam ini, yang terdiri dari 47 pasal, menjadi dokumen pertama yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah, termasuk antara umat Islam dan komunitas Yahudi.

Salah satu kontribusi besar Nabi Muhammad SAW dalam perumusan Piagam Madinah adalah konsep ummah wāḥidah (komunitas yang satu), yang menyatukan umat Islam dan non-Muslim dalam satu ikatan sosial-politik yang sama. Meskipun komunitas Madinah terdiri dari berbagai agama dan suku, Nabi Muhammad SAW menetapkan prinsip bahwa mereka semua adalah satu komunitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan kedamaian dan ketertiban kota Madinah. Prinsip ini sangat revolusioner, karena pada waktu itu, tidak ada masyarakat lain di dunia yang mengakui adanya kesetaraan antara kelompok yang berbeda agama dalam satu pemerintahan. Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW mengatur bahwa agama Yahudi, seperti halnya agama Islam, akan diakui dan dilindungi hak-haknya selama mereka tunduk pada piagam ini.

Peran Nabi Muhammad SAW juga tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur penyelesaian sengketa. Dalam beberapa pasal, disebutkan bahwa setiap perselisihan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa harus dibawa kepada Nabi Muhammad SAW untuk diputuskan secara adil. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga sebagai otoritas hukum tertinggi yang harus dihormati oleh seluruh komunitas Madinah. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, beliau bertindak sebagai penengah yang adil, mendengarkan semua pihak, dan memberikan keputusan yang memastikan keadilan bagi semua.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga berperan dalam merumuskan ketentuan yang mengatur hubungan antara kelompok Muslim dan Yahudi. Pasal-pasal dalam Piagam Madinah menyatakan bahwa kedua belah pihak harus saling membantu dalam menghadapi ancaman eksternal dan mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Namun, Piagam ini juga mengatur bahwa jika terjadi perselisihan internal, masing-masing pihak tetap harus bertanggung jawab atas urusan internalnya sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis Nabi dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas yang terjaga dalam masyarakat yang plural ini.

Lebih dari itu, Piagam Madinah mencerminkan pendekatan praktis dan kontekstual dari Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam pada kenyataan sosial-politik yang ada. Meskipun Nabi Muhammad SAW tetap mengedepankan prinsip-prinsip moral dan agama dalam perumusan Piagam ini, beliau juga mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan praktis yang ada. Piagam Madinah menjadi model konstitusi pertama yang menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta membangun kerangka sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim.

Pentingnya peran Nabi Muhammad SAW dalam perumusan Piagam Madinah bukan hanya terbatas pada aspek hukum dan politik, tetapi juga mencerminkan visi beliau dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan saling

menghormati. Piagam ini tidak hanya menjadi dasar pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penciptaan masyarakat yang berkeadilan sosial, serta pengakuan terhadap pluralisme agama dan budaya yang sangat penting bagi perkembangan Islam ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. I. Sabra, "Ibn al-Haytham," in *Encyclopedia of Islam*, ed. P. Bearman et al. (Leiden: Brill, 2006).
- A. I. Sabra, "The Optics of Ibn al-Haytham," in *History of Science* 13 (1975).
- A'yun, Q., & Budiman, A. (2024). Interaksi Sosial Nabi Muhammad Saw dan Komunitas Yahudi: Telaah Hadis dalam Perspektif Historis-Psikologis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 15(2).
- A'yun, Q., Zulfikri, Z., & Hakim, L. (2022). Dinamika Relasi Nabi SAW dengan Yahudi Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 4(1), 65-80.
- Abdul Rauf, Hasan M. el-Badawy. *Orientalisme dan Misionarisme; Menelikung Pola Pikir Umat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Abdullah, Z. (2009). Hubungan Islam dan Yahudi dalam Konteks Pluralisme Agama. *Jurnal Miqot*, 33(1).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabariy, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz. IV (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H.).
- Abū Yūsuf. *Kitāb al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1).
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>

- Adwan, I. M. A. (2019). Hamas charter: Changes and principles. In *Politics and Religion Journal* (Vol. 13, Issue 1).
- Affaf Sabrah, al-Mustasyriqn: Musykilt al-Ha«rah, al-Qhirah: Dr al-Nahah alArabiyah, 1975
- Ahmad Abdul Hamid Ghurab, *Menyingkap Tabir Orientalisme*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992. Terj. AM. Basalamah
- Ajid Thohir , *Perbandingan Peradaban di Kawasan Dunia Islam (Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam)*, (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- al-Balādhurī. *Futūḥ al-Buldān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, bāb: Khurūj al-Yahūd min Jazīrat al-‘Arab, no. 3053.
- al-Farūqī, Ismail dan Lois Lamyā, *Atlas Budaya Islam*, terjemahan Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 2001.
- al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- al-Khallāl. *Aḥkām Ahl al-Milal*. Tahqīq: ‘Aṭiyyah al-Zahrānī. Jilid 1.
- Al-Khwarizmi, *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabala*, ed. F. Rosen (Leipzig: 1831).
- al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- al-Mubarakfīrī, Ṣafiyyu al-Raḥmān. *Sirah Nabawiyah*, Terjemahan Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1997.
- al-Nadwi, Abū Ḥasan. *Islam Membangun Peradaban Dunia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1988.
- Al-Qur’anul Karim
- al-Qurṭubī. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Jilid 4.

- al-Ṭabarī. Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk. Ed. Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Turāth, 1967.
- Ali, K. Sejarah Islam Pra-Modern. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Amstron, Karen. Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang Teluk, terjemahan. Hikayat Darmawan. Jakarta: Serambi, 2003
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 11(1), 53-72.
- Anwar, K. (2016). Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah: Pengaruhnya terhadap Politik Islam. Al-Ahkam, 179-202.
- Azra, Azyumardi. Memahami Konflik barat-Islam dalam Era Globalisasi, Pengantar dalam Buku Karel Strenbrink, Kawan Dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995.
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2003).
- Bahri, S. (2018). Interaksi Antara Kaum Muslimin Dengan Kaum Yahudi. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 6(2), 89-99.
- Bartal, S. (2023). Hamas, Antisemitism and Social Media Incitement. DAXIYANGGUO - REVISTA PORTUGUESA DE ESTUDOS ASIÁTICOS / PORTUGUESE JOURNAL OF ASIAN STUDIES, 30. <https://doi.org/10.33167/1645-4677.daxiayangguo2023.30/pp.171-193>
- Bellah, Robert N. & Beyond Believe: Menemukan Kembali Agama: Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern, Jakarta: Paramadina, 2000

- Bruce Riedel. Who Are The Houthis, and Why Are We at War With Them (18 Desember 2017). [The Houthis: Who They Are and Why Conflict Exists](#) .
- Budisantoso, In Nugroho. Hubungan Kristen-Islam Pasca Tragedi WTC Dalam Perspektif Nostra Aetate, dalam Jurnal Orientasi Baru, Vol. 15 No. 1-2 Oktober 2006.
- Calore Hillenbrand, Perang Salib Sudut Pandang Islam, Cet.III; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Charles Burnett, "The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program in Toledo in the Twelfth Century," Science in Context 14, no. 1-2 (2001).
- Darman, A., Metodius, F. O. V., Sitohang, L. G., Letsoin, Y. S., & Blareq, Y. K. G. (2022). Radikalisme Timur-Tengah dan Pengaruhnya di Indonesia. Perspektif, 16(2). <https://doi.org/10.69621/jpf.v16i2.131>
- David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science (Chicago: University of Chicago Press, 2007).
- De Jong, Kees. Dari Perpisahan Kolonial ke Perjuangan Nasional Bersama, dalam Gema Teologi, Vol. 36 No. 2, Oktober 2012
- Den, Th. Van. End Christiaan De Jong, Sejarah Perjumpaan Gereja dan Islam, Jakarta: UPI STT Jakarta, t.th.
- Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (London: Routledge, 1998).
- el-Ansary, Waleed. dkk. Ed. Kata Bersama Antara Muslim dan Kristen, Cet. I; Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2019) h. 108.
- Engineer, Asghar Ali. Islam dan Pembebasan, terj Hairus Salim HS, Yogyakarta: Lkis, 1993

- Ernest Renan, *Averroès et l'Averroïsme* (Paris: Calmann-Lévy, 1861)
- Faeq, N., & Jahnata, D. (2020). The Historical Antecedents of Hamas. *International Journal of Social Science Research and Review*, 3(3). <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v3i3.49>
- Fatmah, F. (2018). Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 71-87.
- Fauzi, A., dan B. Santoso. “Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn al-Khattab.” *Dosis: Jurnal Ilmiah Pustaka Islam* 4, no. 1 (2016): 10–22.
- Febriani Amalina Shalihah dan Hasan Sidik. (2021). Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya Terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan. *Jurnal ICMES* 5(1): 22-42.
- Franz Rosenthal, *The Classical Heritage in Islam* (London: Routledge, 1992)
- George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).
- George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007).
- Hadi, H. Suharno. “Surat ‘Ahd ‘Umar: Telaah Sejarah dan Hukum.” *SULTAN: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 1–20.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Hamidullah, Muhammad. *Piagam Madinah: Dokumen Dasar Konstitusi Islam*. Jakarta: Al-Hidayah, 2011.

- Hammond, *Headline World Atlas*, (New Jersey: Hammond Incorporated Maplewood, 1969).
- Hannase, M. (2018). Respon Muslim Indonesia Terhadap Gerakan Islamisme Di Timur Tengah: Kasus Hamas Dan Konflik Palestina. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 12(2).
<https://doi.org/10.24239/rsy.v12i2.81>
- Haris, M. (2016). Sejarah Hubungan Yahudi dan Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 99-119.
- Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya* (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1985).
- Harvard University, "History of Science and the Islamic World," Course Catalog, 2023.
- Hasibuan, U. K. M. (2024). Hubungan Islam dan Yahudi Nasrani dalam Prespektif Hadis. *FUTURE ACADEMIA: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 247-261.
- Hasnida, H. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2).
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>
- Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Cet I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009).
- Hengky. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Hillenbrand, Carol. *Perang Salib Sudut Pandang Islam*, terjemahan Hariadi. Jakarta: serambi, 2005.

- Ho Hengkyo. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Humairah, A. E., & Hasaruddin, H. (2023). Hubungan Islam dan Yahudi Dalam Lintas Sejarah. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 714-729.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn al-Qayyim. *Ahkam Ahl al-Dhimmah*. Tahqiq: Yusuf al-Bakri dan Shu'ayb al-Arna'ut. Beirut: Dar al-Risalah, 1997.
- Ibn Kathir. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Sa'd. *Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar Sadir, 1960.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Ibnu Hisham. *Sirah al-Nabawiyyah*. Tahqiq: Mustafa al-Saqqa. Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Idris, M. A. (2022). Multikulturalisme Dan Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Penjahahan Hingga Reformasi). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.79-100>
- Jazuli, A., Ediyono, S., Malik, A., Ahmad, A. A. H., & Muslifah, S. (2023). The Hegemony Of Hamas And Its Impact On The Social Behavior Of The Palestinian Society. *Jurnal CMES*, 16(1). <https://doi.org/10.20961/cmes.16.1.67057>
- Jerald. F. Dirks, Salib di Bulan Sabit, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001. Kung, Hans. "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam", *Paramida* vol. I, 1998 Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Simbol Sejarah: Sebuah Refleksi*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985

- Jim Al-Khalili, *The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance* (New York: Penguin, 2011), 140.
- Jonathan Lyons, *The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization* (New York: Bloomsbury Press, 2009), 45.
- Khumairoh, M. I., & Fadhil, A. (2019). Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993). *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Kristianto, A., & Al Farisi, A. (2024). Argumentasi Nabi Muhammad dalam Menghadapi Serangan Yahudi: Sebuah Pendekatan Retoris. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1517-1532.
- Kurniyawan, T. (2021). Gerakan Perlawanan Hamas Dalam Konflik Israel- Palestina (1987-1993 M). UIN Sunan Kalijaga Press, 14(1).
- Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. M. (2022). Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 3(2).
<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>
- L. Esposito, John. *Bahaya Hijau*, Alihbahasa Sunarto. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- M. Sewang, Ahmad. *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- M. Watt, *Islam and The Integration of Society*, cet. IV, London: Routledge and Kegan Paul, 1970.
- Mahmoud, H., & Abuzerr, S. (2023). State of the health-care system in Gaza during the Israel–Hamas war. In *The Lancet* (Vol. 402, Issue 10419).
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02634-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02634-X)

- Majid, M. F. F., Muhammad, H. Z., Dinata, I., & Pratama, T. (2023). Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia. *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.9>
- Majlis Ulama Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, al-Qur'an dan Terjemahnya, Gowa Sulawesi Selatan: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Makrufli, M. (2021). PERIODESASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. *IndraTech*, 2(1). <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.91>
- Mālik bin Anas. al-Muwaṭṭa'. Riwayat Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī, Bāb: Mā jā'a fī Jazīrat al-'Arab, no. 1860.
- Mardenis. (2012). Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka. In *Mmh (Issue 2)*.
- Mhadhbi, A. (2023). Satu anak tewas tiap 10 menit dan 70% populasi Gaza mengungsi. *Bbc*.
- Mujib, A. (2021). Sejarah Masuknya Islam Dan Keragaman Kebudayaan Islam Di Indonesia. *Dewantara*, XI.
- Mulyawan, F., & Tiara, D. (2020). KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG. *UNES Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.151>
- Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik : Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, (Cet ke 3: Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Muthoharoh, M., & Ronal madiih, A. (2023). Historis Pendidikan Islam di Nusantara. *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(1). <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v14i1.324>

- Nasution, A. S. (2023). Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia Perspektif Sejarah Kritis Ibnu Khaldun. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 7(2). <https://doi.org/10.47006/er.v7i2.13186>
- Nasution, faizah. (2020). Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. In *Sejarah dan Kebudayaan islam* (Vol. 9, Issue 1).
- Nasution, Harun Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Buan Bintang, 1975
- Nawawī, al-. Minhāj al-Ṭālibīn. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- P. Huntington, Samuel. The Clash of Civilisation and The Remaking of Word Order. New York: Touchtone, 1998.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996).
- Peter Adamson, Philosophy in the Islamic World: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2016).
- Philip K. Hitti, History of the Arabs (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010).
- Rahman, B. J. (2020). Hamas dan Fatah: Tekanan Ideologi dalam Membebaskan Palestina. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2). <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5553>
- Rahmani, A. N. (2023). Dampak Perang Israel-Hamas Terhadap Harga Saham Dan Minat Beli Masyarakat Produk Pendukung Israel. *Academy of Education Journal*, 14(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2104>
- Rinaldy, A. (2023). Perbandingan Media Internasional: CNN dan Al-Jazeera Terkait Serangan Udara Pasukan Hamas

- ke Israel. *Review of International Relations*, 5(2).
<https://doi.org/10.24252/rir.v5i2.43277>
- Rosanti, D. E. (2022). *Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 10(January).
- Roy Porter, *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity* (New York: Norton, 1997).
- Rubinstein-Shemer, N., & Flamer, N. (2024). Projective Psychological Warfare (PPW): an analysis of Hamas Hebrew videoclips as part of its propaganda campaign against Israel (2007–2014). *Middle Eastern Studies*, 60(2). <https://doi.org/10.1080/00263206.2023.2186859>
- Rukmini, S. (2017). Hubungan Yahudi dan Islam dalam Lintasan Sejarah. *Al-Hikmah*, 19(2), 74-87.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*, terj. Shulkhah & Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Said, R. A. R., Alimuddin, A., & Ansharullah, A. (2019). Hubungan Islam dan Yahudi dalam Lintasan Sejarah. *AL ASAS*, 2(1), 25-39.
- Salim, S. (2016). Lektur Moderen Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1).
<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.238>
- Sari, D. L. (2018). Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1). <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.314>
- Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2006).
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. IV. Bandung: Mizan. Tahun 1990.

- Simanjorang, B. M., SyahPutra, B. A., Husin, M. H., Bangun, I. Br., Zawani, N., Siburian, T. D. N., Perangin-Angin, Z. G., & Prayetno. (2023). Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, 2(2).
- Simarmata, M. A. I., & Yuliana, N. (2023). Analisis Framing Konflik Israel-Palestina Dalam Sindonews.Com Dan Cnn Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(9).
- SJ. J. Bakker, *Piagam Nostra Aetate Konsili Vatikan II: Tafsiran Zaman Kita, Zaman Dialog Antar-Agama*. Jogjakarta: Kanisius, 1972.
- Smith, Wilfred Cantwekk. *The On Understanding Islam- Selected Studies*. The Hague Paris And New York: Mouton Publisher, 1981.
- Sou"yb, Joesoef *Orientalisme dan Islam*, Cet. II Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Sourdel, Dominique. *The Abbasid Caliphate*. Trans. L. Gardet. London: Routledge, 1970.
- Susilo, A. A., & Wulansari, R. (2020). Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 20(2). <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>
- Susmihara, *Sejarah Perkembangan Orientalis*, Jurnal Rihlah Volume V No. 1/2017.
- Syhab, A. (2017). Pengaruh Neo-Revivalis Islam Terhadap Sekulerisme Di Palestina. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(1). <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i1.51>
- Tabroni, R., Zakaria, M. M., Dienaputra, R. D., & Mulyadi, R. M. (2020). *Memandang Wajah Negara Islam Di Indonesia*:

- Usaha Pembelajaran Sejarah Melalui Materi Konflik.
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA,
10(1). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v10i1.4467>
- Tamin, Z., & Mollah, M. K. (2021). Sejarah Sosial Literasi Di Indonesia; Dari Tradisi Islam Hingga Perumusan Kebijakan. *Al-Ibrah*, 6(1).
- Teiner, D. (2021). Bibliography: Hamas. Perspectives on Terrorism, 15(4).
- The Polarization of the Hamas Movement in Palestine and Its Influence on Indonesian Defense Issues: A Geopolitical and Military Overview. (2021). *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 8(2).
<https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.138>
- Thohir, Ajib. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1997.
- Thohir, Ajib. Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Toby E. Huff, *The Rise of Early Modern Science* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Tomadehe, S., Syukur, S., & Susmihara, S. (2023). Sejarah Islam Modern Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8(2).
<https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1606>
- Umar, A. Muin. *Orientalisme dan Studi Tentang Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- UNESCO, "The Contribution of Islamic Culture to Science and Knowledge," 2024.
- Victor J. Katz, *A History of Mathematics: An Introduction* (New York: Addison Wesley, 1993).

- W Said, Edward. Orientalism diterjemahkan oleh Asep Hikmah dengan judul Orientalisme. Cet. III. Bandung: Pustaka. 1996.
- W. Montgremery Watt, Islam dan Peradaban Dunia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007).
- Wagemakers, J. (2010). Legitimizing pragmatism: Hamas' framing efforts from militancy to moderation and back? *Terrorism and Political Violence*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/09546551003765942>
- Wahab, M. A. (2021). Stigma tak Logis di Pernyataan Bahasa Arab Ciri-Ciri Teroris. [Www.Republika.Co.Id/](http://www.Republika.Co.Id/).
- Wardoyo, B. (2017). Pemerintah Hamas dan Prospek Perdamaian. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 8(2). <https://doi.org/10.7454/global.v8i2.254>
- Yahdi, M. (2023). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i1.39183>
- Yasin, Muhammad. "Ahl al-Dhimmah pada Masa Umar bin Khattab." *Al-Turas: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2024): 45–58.
- Zakaria, S. A., Ahmad, S., & Wahid, H. (2015). Boikot Mcdonald: Hukum Perlaksanaanya Di Malaysia Dan Kesan Terhadap Guna Tenaga. *EProsiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)*.

BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Yani adalah seorang pendidik dan akademisi yang saat ini aktif sebagai dosen pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia. Ia meraih gelar Magister Sejarah Peradaban Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2018, menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada tahun 2024, dan sejak itu telah mengumpulkan pengalaman luas dalam bidang sejarah peradaban Islam. Kontribusi penelitiannya dan gagasannya telah dipublikasikan dalam beberapa kolom opini, buku, dan jurnal yang diakreditasi secara nasional maupun internasional. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubunginya di ahmadyani01@iainpare.ac.id



Prof. Dr. H. Hasaruddin, M.Ag, Lahir di Wale, 09- 09- 1971. Prof. DR. H. Hasaruddin, S. Ag, M. Ag., telah aktif berceramah/ mengisi kajian keagamaan sejak duduk di bangku kuliah S1. Kajian yang biasa dibawakan tentang Islam dan Kemanusiaan, Islam sebagai agama Rahmat dan Kasih Sayang, Moderasi Beragama dan sebagainya. Tradisi membawa kajian/Ceramah dilanjutkan setelah aktif sebagai

seorang dosen pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga saat ini. Pendidikan S1 diselesaikan pada prodi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin Makassar, 1997, kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pendidikan S3 pada prodi Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar. Hingga saat ini, Prof. DR. H. Hasaruddin, S. Ag. M. Ag, aktif sebagai dosen Sejarah Peradaban Islam pada Prodi S1, S2, dan S3 UIN Alauddin Makassar, juga aktif sebagai muballigh IMMIM Makassar.



Rustam Magun Pikahulan, M.H, Lahir di Desa Iha (Maluku) 21 Februari 1994, menyelesaikan studi S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Setelah itu melanjutkan studi S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini

penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menulis buku pertama kali tahun 2019 yang berjudul “Hukum Perikatan”, kemudian pada tahun 2020 penulis kembali menulis buku dengan yang berjudul “Aspek Hukum Alih Teknologi dalam Investasi”, pada tahun 2021 menulis buku yang berjudul “Aspek Hukum Perbankan Syariah” dan pada tahun 2022 penulis kembali menulis buku yang berjudul “Hukum Lembaga Keuangan Syariah”. Selain menulis buku referensi untuk perkuliahan, penulis juga terlibat dalam penulisan buku chapter yang berjudul “Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsaan” bersama beberapa dosen pada lingkup IAIN

Parepare. Selain menulis, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian dengan bergabung pada beberapa organisasi kemasyarakatan dan juga aktif dalam kegiatan penelitian.



Iin Mutmainnah, S.H.I., M.H.I., lahir di Pangkajene Sidrap pada tanggal 3 Juni 1989. Ia merupakan Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Peradilan Agama dan S2 Syariah Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar masing-masing pada tahun 2011 dan 2015. Untuk dapat saling terhubung dapat mengirim pesan di email iinmutmainnah@iainpare.ac.id atau akun @iin_mutmainnah36 di Instagram.



Sri Karmila Dol, S.H., M.H., lahir di Makassar pada tanggal 6 Januari 1989. Ia merupakan Advokat pada kantor hukum Sri Karmila Dol Advokat & Konsultan Hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Hukum tahun 2011 di UIN Alauddin Makassar, Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Lulus Ujian Pendidikan Khusus Profesi Advokat tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan S2 Prodi Hukum pada tahun 2024 di Universitas Indonesia Timur Makassar. Untuk dapat saling terhubung dapat mengirim pesan di email dolmilaw89@gmail.com atau akun @Mhila Dol di Instagram.



Muh. Isra Syarif, S.H., M.H., lahir di Tongauna, Tanggal 17 November 1998. Berasal dari Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara. Ia merupakan Dosen dan Pengelola STIBA Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar Pada Tahun 2019 dan S2 Jurusan Syariah Hukum Islam di UIN

Alauddin Makassar Pada Tahun 2022. Untuk dapat saling terhubung dapat mengirim pesan di email muhammadisra@stiba.ac.id atau melalui akun Instagram @Muhammadisrasyari



Muhammad Rusydi Kadir, S.H., M.H., Lahir di Parigi Provinsi Sulawesi Tengah, pada 16 Juli 1997. Ia merupakan Ketua pengurus Yayasan Tarbiyah DDI Parigi, pernah mengabdikan diri sebagai Dosen LB di UIN Datokarama Palu sejak 2022-2024. Penulis menyelesaikan S1 Hukum Keluarga Islam di UII Yogyakarta pada tahun 2018 dan melanjutkan program

Magister Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2019-2021. Untuk dapat saling terhubung dapat mengirim pesan ke email rusyidikadir@gmail.com.



Abdul Hafid., S.Sos. S.HI., M.H. lahir di Mamasa 15 April 1982. Bekerja sebagai ASN di Kemenag Kabupaten Mamasa. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Pada UIN Alauddin Makassar jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam selesai Tahun 2009. Melanjutkan Pendidikan pada STAI DDI Polman Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhsyah) dan mendapat gelar S.HI tahun 2012 Selanjutnya program S2 Syariah/Hukum islam di UIN Alauddin Makassar selesai tahun 2021. Alamat email: abdulhafid3634@gmail.com



Nurhidayat Nurdin, SH, MH, Lahir di Kabupaten Bantaeng, tanggal 19 juli 1987, alumni pondok pesantren Annahdlah Makassar. Sehari- harinya membina santri-santriwati di pondok pesantren, menyelesaikan S1 dan S2 di Inkhas, Sukabumi.



Zulayka Muchtar adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam, yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia dikenal melalui kontribusinya dalam kajian fikih parenting dan dinamika keluarga pasca perceraian. Zulayka menyelesaikan pendidikan sarjana (S.H.) di Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2022 . Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan fokus pada Hukum Keluarga Islam. Tesisnya yang berjudul “Hak Anak dan Pola Asuh pada Keluarga Bercerai Perspektif Fikih Parenting (Studi Kasus di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo)” diselesaikan pada tahun 2023. Dalam dunia akademik, Zulayka aktif meneliti isu-isu sosial keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga dan peran gender dalam konteks Islam. Salah satu penelitiannya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah membahas perubahan peran ekonomi keluarga korban banjir bandang di Luwu Utara, serta dampaknya terhadap pembentukan keluarga Sakinah. Pada tahun 2024, Zulayka Muchtar berhasil lulus dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana diumumkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kompetensinya di bidang hukum keluarga dan kontribusinya dalam pelayanan publik. Penelitian Zulayka banyak menyoroti isu-isu seperti hak anak pasca perceraian, pola asuh dalam keluarga Islam, serta dampak bencana terhadap struktur dan peran dalam keluarga. Pendekatannya yang berbasis fikih parenting memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika keluarga Muslim di Indonesia. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan komitmen terhadap penelitian yang relevan secara sosial, Zulayka Muchtar merupakan salah satu akademisi muda yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.



Rudianto, Lahir di Kajang 05 Agustus 1993, ia merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami dan istri (Amiruddin dan Ibu Cekong). Jenjang pendidikan S1 pada jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan pada Prodi Dirasya Islamiah, Syariah dan Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017.



Nur Saiful, S.H., M.H. lahir di Kabupaten Gowa pada tanggal 06 Agustus 1996. Saat ini penulis merupakan mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi Syariah dan Hukum Islam. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan melanjutkan studi Magister (S2) di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada konsentrasi Syariah dan Hukum Tahun 2023. Untuk membangun komunikasi dan ruang diskusi yang konstruktif, penulis dapat dihubungi melalui email: nursaifulo6@gmail.com atau melalui akun Instagram: [@nrs_ifhull](https://www.instagram.com/nrs_ifhull).



Muh. Fadel As'ad, S.H., M.H., lahir di Kolaka pada tanggal 3 April 1997. Ia merupakan salah satu pengelola di IAI STIBA Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar dan Hukum dan S2 Syariah dan Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar, masing-masing pada tahun 2019 dan 2024, untuk dapat saling

terhubung dapat mengirim pesan di email muhfadelasad@stiba.ac.id



Tahwin Alamsyah, S.H., M.H., lahir di Jakarta pada 4 Desember 1996. Ia dikenal sebagai akademisi dalam bidang Hukum dan pemerhati lingkungan. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018, ia kemudian menyelesaikan pendidikan Magister konsentrasi Hukum

Tata Negara pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia tahun 2023. Dalam dunia akademik, ia aktif meneliti isu-isu sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satu penelitiannya telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah membahas tentang Dampak Overload Kendaraan Angkutan Barang. Sebagai pemuda ia aktif di berbagai organisasi, baik ormas islam ataupun organisasi kepemudaan, saat ini ia Menjabat sebagai Kepala Staf Resimen Mahasiswa Sulawesi Selatan periode 2022-2025 juga aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Pada tahun

2021 ia memulai karirnya di salah satu instansi pemerintah yang membidangi kebijakan transportasi darat.



Abdul Rahim, S.H.I.,M.H. Lahir di Bungoro Pangkep pada tanggal 02 Maret 1991. Ia merupakan penghulu sekaligus kepala KUA Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Penulis menyelesaikan pendidikan S 1 Jurusan Peradilan Agama di UIN Aladdin Makassar dan S2 Hukum Perdata di UMI masing-masing pada tahun 2014 dan 2018. Untuk dapat saling terhubung dapat mengirim pesan di email abdurahim0203912@gmail.com atau akun Facebook Abdul Rahim

